

**PERAN MODAL SOSIAL DALAM PARTISIPASI PEREMPUAN
PESANGGEM PADA PROGRAM PHBM
(PENGELOLAAN HUTAN BERSAMA MASYARAKAT)**
(Desa Tambakasri, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang)

**OLEH
RIZKY MAULANA**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS PERTANIAN
MALANG
2018**

**PERAN MODAL SOSIAL DALAM PARTISIPASI PEREMPUAN
PESANGGEM PADA PROGRAM PHBM
(PENGELOLAAN HUTAN BERSAMA MASYARAKAT)**

(Desa Tambakasri, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang)

Oleh

RIZKY MAULANA

145040100111113

PROGRAM STUDI AGRIBISNIS

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana Pertanian Strata Satu (S-1)**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS PERTANIAN
JURUSAN SOSIAL EKONOMI PERTANIAN
MALANG**

2018

LEMBAR PERSETUJUAN

Judul : Peran Modal Sosial dalam Partisipasi Perempuan Pesanggem
Pada Program PHBM (Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat)
(Desa Tambakasri, Kecamatan Sumbermanjing Wetan,
Kabupaten Malang)

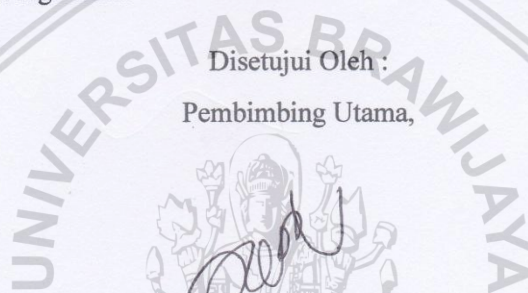
Nama : Rizky Maulana

NIM : 145040100111113

Program Studi : Agribisnis

Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama,



Dr. Ir. Yayuk Yuliati, MS.

NIP. 19540705 198103 2 003

Mengetahui,

Ketua Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian,

Mangku Purnomo, SP., M.Si., Ph.D

NIP. 19770420 200501 1 001

Tanggal Persetujuan



LEMBAR PENGESAHAN

Mengesahkan

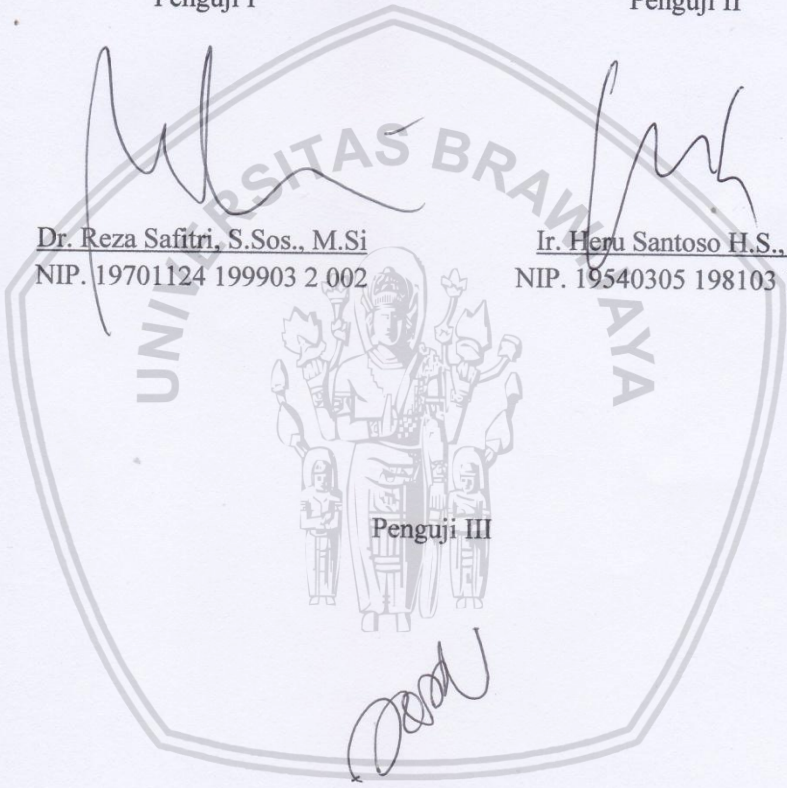
MAJELIS PENGUJI

Penguji I

Penguji II

Dr. Reza Safitri, S.Sos., M.Si
NIP. 19701124 199903 2 002

Ir. Heru Santoso H.S., SU
NIP. 19540305 198103 1 005



Penguji III

Dr.Ir. Yayuk Yulianti, MS.
NIP. 19540705 198103 2 003

Tanggal Lulus:



PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa segala pernyataan dalam skripsi ini merupakan hasil penelitian saya sendiri, dengan bimbingan komisi pembimbing. Skripsi ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang dengan jelas ditunjukkan rujukannya dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Malang, Mei 2018

Rizky Maulana

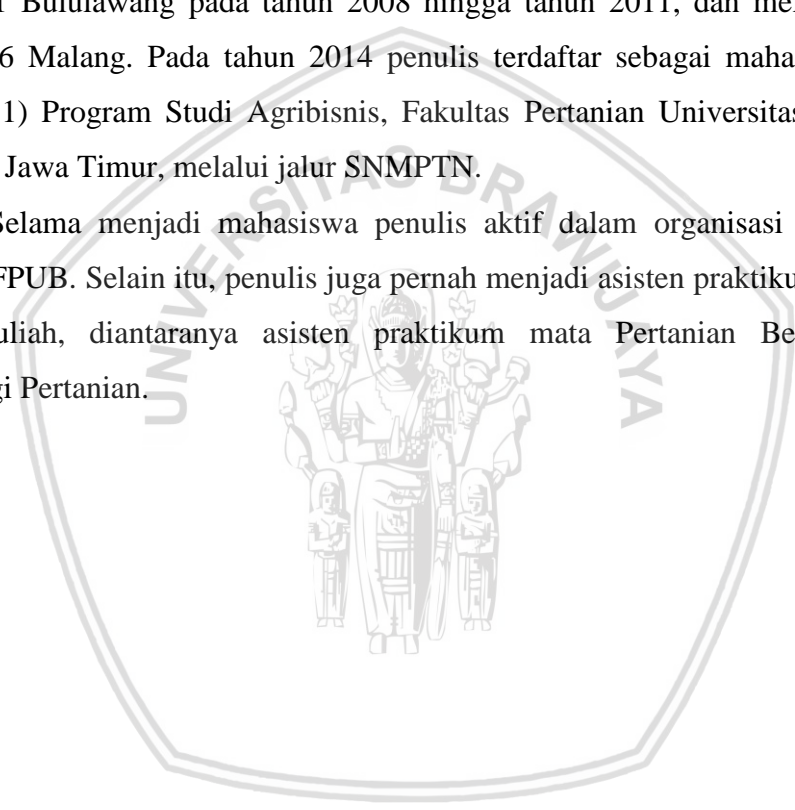


RIWAYAT HIDUP

Penulis merupakan putra dari Bapak Sugiono dan Ibu Lailatul Astutik. Penulis dilahirkan di Malang pada tanggal 14 November 1995. Penulis merupakan putra kedua dari dua bersaudara.

Penulis menempuh pendidikan Sekolah Dasar di SDN Sempalwadak pada tahun 2002 sampai tahun 2008, kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMPN 1 Bululawang pada tahun 2008 hingga tahun 2011, dan melanjutkan di SMAN 6 Malang. Pada tahun 2014 penulis terdaftar sebagai mahasiswi Strata Satu (S-1) Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya Malang, Jawa Timur, melalui jalur SNMPTN.

Selama menjadi mahasiswa penulis aktif dalam organisasi yaitu Sport Corner FPUB. Selain itu, penulis juga pernah menjadi asisten praktikum beberapa mata kuliah, diantaranya asisten praktikum mata Pertanian Berlanjut dan Sosiologi Pertanian.



HALAMAN PERSEMBAHAN

Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu

Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah Bacalah, dan Tuhanmulah yang maha mulia

Yang mengajar manusia dengan pena,

Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya (QS: Al-'Alaq 1-5)

Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan ? (QS: Ar-Rahman 13)

Niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat

(QS : Al-Mujadilah 11)

Alhamdulillah..Alhamdulillah..Alhamdulillahirobbil'alamin..

Sujud syukur kepada Tuhan yang Maha Agung nan Maha Tinggi nan Maha Adil nan Maha Penyayang, atas takdirmu telah kau jadikan aku manusia yang senantiasa berpikir, berilmu, beriman dan bersabar dalam menjalani kehidupan ini. Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal bagiku untuk meraih cita-cita besarku.

Lantunan Al-fatihah beriring Shalawat dalam silah merintih, menadahkan doa dalam syukur yang tiada terkira, terima kasihku untukmu. Kupersembahkan sebuah karya kecil ini untuk Bapak Ibuk tercinta, yang tiada pernah hentinya selama ini memberiku semangat, doa, dorongan, nasehat dan kasih sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan. Bapak ibu mohon terima kado kecil untuk membalas semua pengorbananmu.. dalam hidupmu demi hidupku kalian ikhlas mengorbankan segala perasaan tanpa kenal lelah, dalam lapar berjuang separuh nyawa hingga segalanya.. Maafkan anakmu Pak, Buk masih saja menyusahkanmu..

ya Allah ya Rahman ya Rahim... Terimakasih telah kau tempatkan aku diantara kedua malaikatmu yang setiap waktu ikhlas menjaga, membimbing dan medndidikku dengan baik..ya Allah berikanlah balasan setimpal syurga firdaus untuk mereka dan jauhkanlah mereka nanti dari panasnya api nerakamu

*Untukmu Bapak SUGIONO,,,Ibu LAILATUL ASTUTIK,..Terimakasih....
ttd. Anakmu)*

RINGKASAN

Rizky Maulana. 1450100111113. Peran Modal Sosial Dalam Partisipasi Perempuan Pesanggem pada Program PHBM (Pengolahan Hutan Bersama Masyarakat). Dibawah Bimbingan Dr. Ir. Yayuk Yulianti. MS.

Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) ialah suatu sistem pengelolaan sumberdaya hutan yang dilakukan oleh Perhutani dan masyarakat desa hutan dengan mempertimbangkan skala prioritas berdasarkan perencanaan partisipatif. Modal sosial merupakan bentuk nilai dan norma informal yang dimiliki masyarakat yang mampu mendorong partisipasi masyarakat dalam program PHBM. Tetapi pada kenyataannya, tingginya modal sosial yang masih belum mampu mendorong partisipasi masyarakat. Khususnya pada perempuan, terjadi ketidakmerataan partisipasi dalam program PHBM yang masih didominasi oleh laki-laki. Rendahnya partisipasi perempuan salah satunya disebabkan faktor-faktor gender yang mempengaruhi perempuan. Faktor gender tersebut ialah aktifitas, kontrol, akses dan manfaat yang menyebabkan posisi laki-laki lebih menguntungkan daripada perempuan. Oleh sebab itu penelitian ini bertujuan untuk 1). Menganalisis profil aktifitas, kontrol, akses dan mafaat perempuan pesanggem dalam PHBM. 2). Menganalisis modal sosial masyarakat Desa Tambakasri 3). Menganalisis tingkat partisipasi perempuan pesanggem dalam program PHBM 4). Menganalisis keterkaitan antara modal sosial dan partisipasi perempuan dalam PHBM.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian *explanatory* (penjelasan) yang dilakukan melalui pendekatan kuantitatif dan didukung dengan data kualitatif. Penelitian dilakukan di Desa Tambakasri pada bulan Februari hingga bulan Maret 2018. Responden pada penelitian ini ditentukan menggunakan metode purposive. Jumlah responden ditentukan menggunakan Simple Random Sampling dengan jumlah 33 orang. Pengumpulan data dengan menggunakan metode wawancara terstruktur, observasi dan studi literatur. Analisis data menggunakan metode analisis gender harvard, statistik deskriptif dan rank spearman.

Berdasarkan hasil penelitian data menunjukkan bahwa terjadi beban ganda pada profil aktifitas perempuan. Akses dan kontrol perempuan pada sumberdaya masih rendah dibanding dengan laki-laki. Manfaat dalam aspek pendapatan dan kesehatan merata didapatkan oleh laki-laki dan perempuan, sedangkan manfaat aspek jaringan didominasi keterlibatannya oleh laki-laki. Modal sosial yang dimiliki tergolong kategori tinggi dengan perolehan skor rata-rata 43. Tingkat partisipasi perempuan dalam program PHBM tergolong dalam kategori sedang dengan perolehan skor rata-rata 26,9. Hubungan antara modal sosial dan tingkat partisipasi dalam analisis rank spearman menunjukkan nilai 0,387 yang menunjukkan bahwa hubungan searah antara kedua variabel termasuk dalam kategori rendah.

SUMMARY

Rizky Maulana. 1450100111113. The Role Of Social Capital In The Participation Of Women Pesanggem on CBFM Program (Community Based Forest Management). Under The Guidance Of Dr. Ir. Yayuk Yuliati. MS.

Community Based Forest Management (CBFM) is a system of forest resource management conducted by Perhutani and forest village communities by considering priority scale based on participatory planning. Social capital is a form of informal values and norms owned by the community that can encourage community participation in the CBFM program. But in reality, the high social capital that is still not able to encourage community participation. Especially in women, there is an inequality of participation in the PHBM program that is still dominated by men. The low participation of women is caused by gender factors that affect women. Gender factors are the activities, dick, access and benefits that cause the position of men more profitable than women. Therefore, this study aims to 1). Analyze the profile of women's activities, control, access and mafaat pesanggem in PHBM. 2). Analyzing social capital of Tambakasri Village community 3). Analyze the participation rate of pesanggem women in the PHBM program 4). Analyzing the linkage between social capital and women's participation in CBFM.

This research is included in explanatory research (explanation) yng done through quantitative approach and supported by qualitative data. The research was conducted in Tambakasri Village in February until March 2018. Respondents in this study were determined using purposive method. The number of respondents is determined using Simple Random Sampling with 33 people. Data collection using interview method using questionnaire, observation and literature study. Data analysis using harvard gender analysis method, descriptive stratic and spearman rank.

Based on the results of the research data shows that there is a double burden on the profile of women's activities. Women's access and control over resources is still low compared to men. Benefits in the aspect of income and health are equally obtained by men and women, while the benefits of networking aspects are dominated by men. Owned social capital belongs to high category with the average score of 43. Female participation rate in PHBM program belong to medium category with average score 26,9. The relationship between social capital and the participation rate in the spearman rank analysis showed a value of 0.387 indicating that the relationship between the two variables included in the low category.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT Yang Maha Rahman, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya. Sholawat serta salam kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan kemudahan dan kelancaran yang diberikan.

Penyusunan skripsi ini disusun guna melengkapi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan tugas akhir dalam studi pendidikan jenjang strata satu (S-1) berupa skripsi bagi mahasiswa Universitas Brawijaya, Fakultas Pertanian, Program Studi Agribisnis.

Skripsi berjudul “Peran Modal Sosial dalam Partisipasi Perempuan Pesanggem pada Program PHBM (Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat) (Desa Tambakasri, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang)” berupaya menjelaskan partisipasi perempuan pada program PHBM dan menjelaskan modal sosial yang ada di dalam program tersebut.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada Ibu Dr. Ir. Yayuk Yuliati, Ms. Selaku pembimbing skripsi yang telah membimbing, membantu, dan memberi saran sehingga penulis dapat menyusun skripsi dengan baik

Penulis menyadari dalam penyusunan proposal skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan sebagai perbaikan. Penulis berharap dapat memberikan manfaat bagi pembaca.

Malang, 2 Mei 2018

Penulis

DAFTAR ISI

| | halaman |
|--|-------------|
| RINGKASAN | i |
| SUMMARY | ii |
| KATA PENGANTAR..... | iii |
| RIWAYAT HIDUP | iv |
| DAFTAR ISI..... | v |
| DAFTAR GAMBAR..... | viii |
| DAFTAR TABEL | ix |
| DAFTAR LAMPIRAN..... | xi |
| I.PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 5 |
| 1.3 Batasan Masalah | 8 |
| 1.4 Tujuan Penelitian..... | 8 |
| 1.5 Kegunaan Penelitian..... | 8 |
| II. TINJAUAN PUSTAKA | 9 |
| 2.1 Penelitian terdahulu | 9 |
| 2.1.1 Telaah Penelitian Terdahulu..... | 9 |
| 2.2 Teori | 15 |
| 2.2.1 Modal Sosial..... | 15 |
| 2.2.2 Unsur Unsur Modal Sosial | 16 |
| 2.2.3 Gender dalam Pengambilan Keputusan | 17 |
| 2.2.4 Peran Gender Dalam Pengelolaan Lingkungan..... | 19 |
| 2.2.5 Ketidakadilan gender..... | 19 |
| 2.2.6 Gender dan Pembagian Tugas (Peran) dalam Rumah Tangga..... | 22 |
| 2.2.7 Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM)..... | 23 |



| | |
|---|-----------|
| 2.2.8 Partisipasi dalam porgram PHBM..... | 24 |
| III. KERANGKA PEMIKIRAN..... | 26 |
| 3.1 Kerangka Pemikiran | 26 |
| 3.2 Hipotesis | 28 |
| 3.3 Definisi Operasional Dan Pengukuran Variabel | 28 |
| IV. METODE PENELITIAN..... | 36 |
| 4.1 Jenis Penelitian | 36 |
| 4.2 Penentuan Lokasi dan Waktu Penelitian | 36 |
| 4.3Teknik Penentuan Responden | 36 |
| 4.4 Teknik Pengumpulan Data | 37 |
| 4.5Teknik Analisis Data | 39 |
| 4.6 Pengujian Hipotesis | 43 |
| V. HASIL DAN PEMBAHASAN..... | 44 |
| 5.1 Gambaran Umum | 44 |
| 5.1.1 Kondisi Geografis | 44 |
| 5.1.2 Jumlah Penduduk | 45 |
| 5.1.3. Mata pencaharian | 47 |
| 5.1.4 Pendidikan | 49 |
| 5.1.5 Sarana Prasarana | 50 |
| 5.2 Karakteristik Responden | 51 |
| 5.2.1 Usia Responden..... | 51 |
| 5.2.2 Pendidikan Responden | 52 |
| 5.2.3 Jenis pekerjaan respoden | 53 |
| 5.2.3 Luas Kepemilikan Lahan Tetelan | 53 |
| 5.3 Analisis Gender pada PHBM | 54 |
| 5.3.1 Aktititas produktif | 55 |
| 5.3.2 Kegiatan Reproduksi | 60 |
| 5.3.3 Akses dan Kontrol Perempuan terhadap Sumberdaya | 67 |
| 5.3.4 Manfaat..... | 70 |

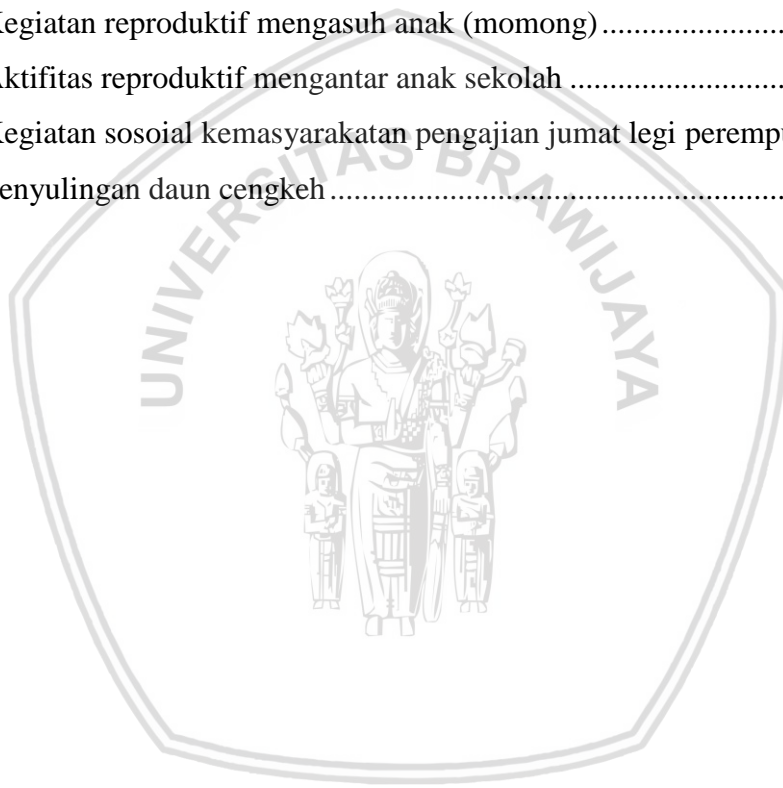


| | |
|--|------------|
| 5.4 Modal sosial pada program PHBM | 71 |
| 5.4.1 Kepercayaan (Trust) | 71 |
| 5.4.2 Nilai dan norma | 74 |
| 5.4.3 Jaringan (<i>Network</i>) | 77 |
| 5.4.4 Tingkat modal sosial | 79 |
| 5.4 Tingkat Partisipasi Perempuan Pesanggem dalam Program PHBM | 80 |
| 5.5.1 Perencanaan Program PHBM | 81 |
| 5.5.2 Pelaksanaan program PHBM | 83 |
| 5.5.3 Manfaat program PHBM | 85 |
| 5.5.4 Monitoring dan evaluasi program PHBM | 88 |
| 5.5.5 Tingkat Partisipasi Perempuan dalam program PHBM | 91 |
| 5.6. Hubungan modal sosial dan tingkat partisipasi | 92 |
| 5.6.1 Hubungan Tingkat modal Sosial dengan tingkat partisipasi perempuan pesanggem | 93 |
| 5.6.2 Peranan Modal sosial dalam peningkatan partisipasi dan pengaruh ketidakadilan gender | 93 |
| VI. PENUTUP | 100 |
| 6.1 Kesimpulan | 100 |
| 6.2 Saran | 101 |
| DAFTAR PUSTAKA | 102 |
| LAMPIRAN | 105 |



DAFTAR GAMBAR

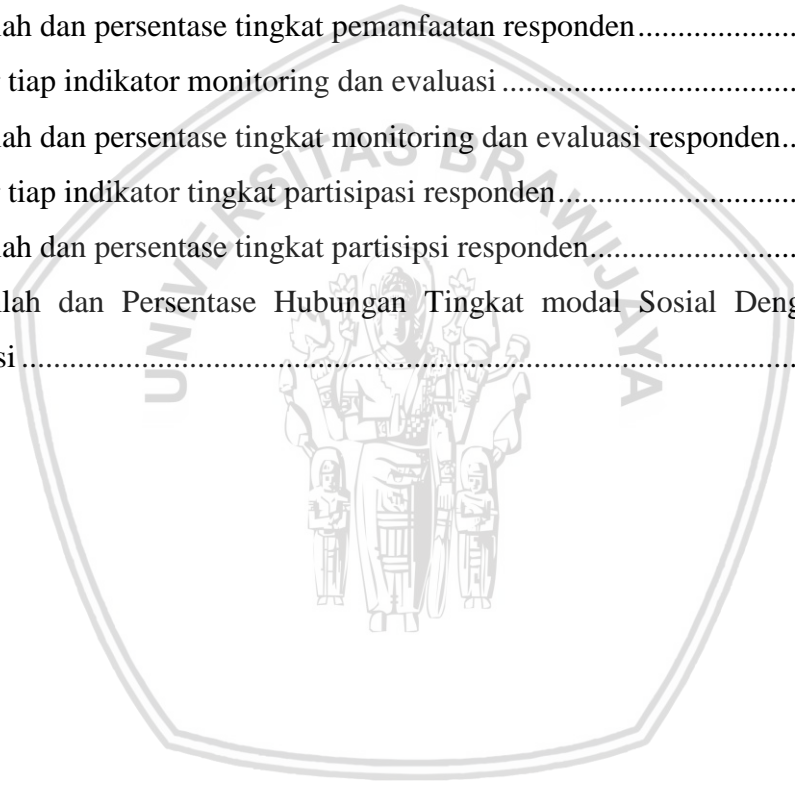
| No | Teks | Halaman |
|----|--|---------|
| 1. | Kerangka Pemikiran..... | 27 |
| 2. | Peta Desa Tambakasri, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang..... | 44 |
| 3. | Tingkat Pendidikan | 50 |
| 4. | Memanen cengkeh oleh pesanggem perempuan | 56 |
| 5. | Kegiatan reproduktif mengasuh anak (momong)..... | 63 |
| 6. | Aktifitas reproduktif mengantar anak sekolah | 64 |
| 7. | Kegiatan sosial kemasyarakatan pengajian jumat legi perempuan | 67 |
| 8. | Penyulingan daun cengkeh | 87 |



DAFTAR TABEL

| No | Teks | Halaman |
|-----|---|---------|
| 1. | Perbedaan Penelitian dengan Penelitian Terdahulu | 10 |
| 2. | Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Modal Sosial..... | 28 |
| 3. | Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Tingkat Partisipasi..... | 32 |
| 4. | Kategori tingkat partisipasi pada program PHBM..... | 41 |
| 5. | Kategori tingkat modal sosial pada program PHBM | 41 |
| 6. | Kategori tingkat partisipasi dan modal sosial per indikator..... | 41 |
| 7. | Kriteria korelasi..... | 42 |
| 8. | Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin..... | 45 |
| 9. | Sebaran usia penduduk menurut kelompok usia..... | 46 |
| 10. | Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencarian..... | 48 |
| 11. | Tingkat Pendidikan | 49 |
| 12. | Usia responden berdasarkan tingkatan di Desa Tambakasri tahun 2018..... | 52 |
| 13. | Tingkat Pendidikan Responden..... | 52 |
| 14. | Jenis pekerjaan responden..... | 53 |
| 15. | Luas penguasaan lahan tetelan milik responden | 54 |
| 16. | Persentase pembagian kerja produktif | 57 |
| 17. | Pembagian peran kerja produktif | 58 |
| 18. | Persentase Pembagian kerja reproduktif | 61 |
| 19. | Pembagian Kerja Reproduksi..... | 62 |
| 20. | Aktifitas Sosial Masyarakat | 65 |
| 21. | Pembagian peran pada kegiatan sosial masyarakat | 66 |
| 22. | Akses dan Kontrol Sumberdaya Berdasarkan Jenis Kelamin | 68 |
| 23. | Manfaat Jaringan bagi Penduduk Laki-laki dan Perempuan..... | 70 |
| 24. | Skor Rata-Rata Indikator Kepercayaan..... | 72 |
| 25. | Jumlah dan persentase responden berdasarkan tingkat kepercayaan..... | 73 |
| 26. | Skor Indikator Norma dan Nilai..... | 74 |
| 27. | Jumlah dan persentase responden menurut tingkat norma..... | 76 |

| | |
|--|----|
| 28. Skor pada Setiap Indikator Jaringan | 77 |
| 29. Jumlah dan persentase responden menurut tingkat jaringan..... | 78 |
| 30. Skor pada Setiap Indikator Modal Sosial..... | 79 |
| 31. Jumlah dan persentase responden menurut tingkat modal sosial..... | 80 |
| 32. Skor rata-rata indikator perencanaan | 82 |
| 33. Jumlah dan persentase responden menurut tingkat perencanaan..... | 83 |
| 34. Skor pada Setiap Indikator Pelaksanaan | 84 |
| 35. Jumlah dan persentase responden menurut tingkat pelaksanaan | 85 |
| 36. Pemanfaatan Perempuan Terhadap Sumber Daya Alam | 86 |
| 37. Jumlah dan persentase tingkat pemanfaatan responden..... | 88 |
| 38. Skor tiap indikator monitoring dan evaluasi | 89 |
| 39. Jumlah dan persentase tingkat monitoring dan evaluasi responden..... | 90 |
| 40. Skor tiap indikator tingkat partisipasi responden..... | 91 |
| 41. Jumlah dan persentase tingkat partisipasi responden..... | 91 |
| 42. Jumlah dan Persentase Hubungan Tingkat modal Sosial Dengan Tingkat Partispasi..... | 94 |



DAFTAR LAMPIRAN

| No | Teks | Halaman |
|-----|--|---------|
| 1. | Dokumentasi | 106 |
| 2. | Karakteristik Responden | 110 |
| 3. | Perolehan skor dan kategori modal sosial trust..... | 112 |
| 4. | Perolehan skor dan kategori modal sosial Norma..... | 113 |
| 5. | Perolehan skor dan kategori modal sosial Jaringan | 114 |
| 6. | Perolehan skor dan kategori modal sosial dalam PHBM | 115 |
| 7. | Perolehan skor dan kategori Partisipasi tahap perencanaan..... | 116 |
| 8. | Perolehan skor dan kategori Partisipasi tahap pelaksanaan | 117 |
| 9. | Perolehan skor dan kategori Partisipasi tahap pemanfaatan | 118 |
| 10. | Perolehan skor dan kategori Partisipasi tahap monitoring dan evaluasi | 119 |
| 11. | Perolehan skor dan kategori Partisipasi pada program PHBM..... | 120 |
| 12. | Analisis Rank Spearman SPSS Hubungan modal sosial dan partisipasi .. | 121 |
| 13. | Hasil uji Validitas variabel pada SPSS | 122 |
| 14. | Hasil uji Realibilitas pada SPSS | 125 |
| 15. | Kuisisioner Penelitian | 126 |



I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keberadaan masyarakat yang hidup disekitaran hutan menjadi modal sekaligus kunci dalam menjaga keadaan hutan tetap lestari terlepas dari keadaan hutan yang lama kelamaan semakin buruk. Buruknya lingkungan hutan semakin diperparah dengan masalah perusakan hutan. Indonesia sebagai negara yang mempunyai sumberdaya alam berlimpah juga mengalami kerawanan dan kerusakan lingkungan hutan karena hal serupa, Damayanti (2011) menyebutkan bahwa penyebab kerusakan lingkungan di Indonesia dikarenakan politik penebangan tanpa izin (*illegal logging*), disamping karena perambahan (*forest encroachment*), peladangan berpindah (*shifting cultivation*), kebakaran hutan (*forest fires*).

Perum Perhutani sebagai BUMN diberi mandat untuk mengelola hutan negara agar tetap lestari disamping itu Perhutani juga dituntut untuk memberikan perhatian yang besar kepada masalah sosial ekonomi masyarakat, terutama masyarakat pedesaan yang sebagian besar tinggal di sekitar hutan dengan peluncuran Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Menurut Perum Perhutani dalam laman resminya menjelaskan bahwa PHBM dilaksanakan berbasis desa hutan dengan ruang lingkup di dalam dan di luar kawasan hutan baik berbasis lahan maupun bukan lahan dengan mempertimbangkan skala prioritas berdasarkan perencanaan partisipatif. Nilai dan Proporsi berbagi dalam PHBM ditetapkan sesuai dengan nilai dan proporsi masukan faktor produksi yang dikontribusikan oleh masing-masing pihak (perusahaan, masyarakat desa hutan, pihak yang berkepentingan).

Sistem di dalam PHBM, hutan terbagi dalam pangkuan desan hutan, tiap pangkuan desa hutan memiliki lembaga sebagai pengurus pengelolaan hutan yaitu Lembaga Kemitraan Desa Pengelola Hutan (LKDPH). LKDPH merupakan lembaga resmi yang mengikat seluruh Kelompok Tani Hutan dalam bermitra dengan Perhutani di tingkat desa. LKDPH merupakan lembaga yang memiliki AD/ART dan berbadan hukum dengan anggota para penggarap yang tergabung dalam Kelompok Tani Hutan dan anggota masyarakat lain yang peduli dengan

keberadaan dan kelestarian hutan. Penggarap lahan atau *pesanggem* merupakan satuan terkecil pada pengelolaan hutan dalam program PHBM. Pesanggem sebagai mitra perhutani akan diberi hak pengelolaan lahan hutan yang diatas namakan rumah tangga masing-masing. Sehingga pesanggem berhak atas luasan lahan tertentu melakukan pengelolaan dan pemanfaatan sesuai dengan peraturan yang ada pada program PHBM.

Pelaksanaan program PHBM tidak selalu berdampak baik pada perjalanan programnya. Dampak negatif pelaksanaan program PHBM salah satunya disebabkan paradigma pembangunan kehutanan yang tersentralisasi. Paradigma pembangunan kehutanan yang tersentralisasi dan top down berdampak pada pengelolaan sumberdaya hutan yang berorientasi kepentingan ekonomi tanpa disertai upaya rehabilitasi dan konservasi hutan yang berimbang, serta terpinggirkannya masyarakat dalam pengelolaan hutan (Suhardjito, 1998). Pengelolaan hutan yang demikian menyebabkan berbagai permasalahan hutan seperti deforestasi (penggundulan hutan) baik secara luasan lahan maupun secara kualitas yaitu ketidakmampuan hutan berfungsi sebagaimana mestinya. Akibat lain adalah ketimpang tindakan serta beda persepsi pihak yang berwenang dalam pengelolaan hutan yang mengakibatkan timbulnya konflik baik antara pemerintah, masyarakat maupun pihak lain yang terlibat (Arifandy dan Sihaloho, 2007)

Perempuan adalah pihak yang dirugikan dengan terjadinya berbagai permasalahan berkaitan dengan kerusakan hutan. Menurut Saleh (2014) kerusakan dan berkurangnya sumberdaya hutan telah mengakibatkan beban perempuan semakin berat dalam menjalankan tanggung jawabnya, berkaitan dengan peran secara tradisional untuk memastikan keberlangsungan pangan keluarga yang didapat dari hutan. Dampak negatif lain yang ditimbulkan dari pembangunan yang bersifat top down menimbulkan kesadaran perlunya pendekatan partisipatif dalam pembangunan kehutanan. Berbagai program telah dilaksanakan oleh perhutani yang melibatkan masyarakat lokal mulai dari Pendekatan Kesejahteraan tahun 1982-1984, Perhutanan Sosial 1984, Pembinaan Masyarakat Desa Hutan Terpadu 1994-1998, PHBM 2001- sekarang (Perhutani, 2018). Namun demikian masih perlu dipertanyakan apakah pelibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan telah benar-benar melibatkan masyarakat laki-laki dan perempuan secara

berimbang. Mengingat dalam kegiatan pembangunan kehutanan, perempuan umumnya kurang diberi kesempatan sebagaimana laki-laki. Kurangnya kesempatan tersebut dikarenakan partisipasi perempuan dalam suatu kegiatan program yang kurang mendapat perhatian dan penjelasan yang memadai (Prastiti, 2012).

Sejalan dengan bahasan gender dan lingkungan bahwa perempuan harusnya terlibat dalam program-program pengelolaan hutan seperti dijelaskan oleh Broidotti *et al.*, 1995 (*dalam* Yuliati 2014) bahwa perempuan merupakan bagian integral dengan sistem sosial, sehingga mempunyai kesetaraan hak dan kewajiban termasuk dalam pengelolaan lingkungan. Terlebih lagi peningkatan partisipasi perempuan dalam pengelolaan lingkungan merupakan komitmen pemerintah Indonesia yang dinyatakan secara tegas dalam dokumen-dokumen kebijakan.

Salah satu kebijakan terkait partisipasi perempuan disebutkan oleh Kementrian Negara Lingkungan Hidup, 2003 (*dalam* Nurhaeni et al, 2009) bahwa kebijakan tentang peningkatan partisipasi perempuan di tingkat global ditandai dengan diadakannya Konferensi Tingkat Tinggi Bumi di Rio de Janeiro pada tahun 1992 yang telah menghasilkan agenda 21. Salah satu isinya tertuang pada bab 24 dengan judul “Tindakan Global untuk Perempuan guna mencapai Pembangunan yang berkelanjutan” dimana dalam bab tersebut menyatakan perempuan telah dipertimbangkan sebagai kelompok yang memiliki peran cukup signifikan dalam mewujudkan tercapainya pembangunan berkelanjutan. Tidak hanya pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Bumi di Rio de Janeiro, KTT Bumi di Johannesburg Afrika Selatan pada tahun 2002 menghasilkan salah satu hasil konferensi tersebut menggaris bawahi perlunya pemberdayaan perempuan didalam pengelolaan lingkungan hidup.

Berdasarkan kebijakan-kebijakan tersebut sebenarnya peran perempuan menjadi signifikan karena perempuan menjadi kelompok yang dipertimbangkan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan pada program PHBM. Pentingnya pelibatan perempuan dalam pembangunan mengharuskan adanya usaha untuk menjadikan perempuan benar-benar berpartisipasi aktif dalam program pembangunan. Partisipasi perempuan dalam program pengelolaan hutan yaitu PHBM tidak terlepas dari modal-modal yang ada dalam masyarakat. Salah

satu modal yang terbentuk akibat hubungan yang terjalin antara perhutani dan masyarakat dalam hubungan kemitraan dalam pengelolaan hutan pada program PHBM ialah modal sosial.

Modal sosial dapat dikatakan modal yang dimiliki oleh masyarakat sebagai hasil dari hubungan-hubungan sosial yang terjalin diantara sesama anggota dapat memungkinkan koordinasi yang efektif dan efisien serta kerjasama untuk keuntungan dan kebajikan bersama. Kerjasama yang terjalin mempunyai tujuan untuk mempermudah akses terhadap sumberdaya, sehingga dalam hubungan kemitraan pada PHBM modal sosial menjadi kunci dalam pencapaian tujuan tersebut. Sesuai dengan definisi modal sosial menurut Lin (2000) bahwa modal sosial adalah modal yang ada dalam hubungan relasi dan dengan modal ini individu berusaha mempunyai akses terhadap sumberdaya tertentu, atau sekurang-kurangnya dapat mencapai apa yang diharapkan melalui tindakan instrumental atau tindakan ekspresif.

Pentingnya modal sosial menurut Santoso (2007) pada masyarakat yang terlibat program PHBM yaitu modal sosial akan berpengaruh pada sikap konsisten masyarakat dalam memelihara sumberdaya hutan. Hal ini sesuai dengan tujuan program PHBM yaitu tetap menjaga hutan lestari. Santoso (2007) juga menjelaskan bahwa modal sosial merupakan prasyarat utama melakukan tindakan bersama dalam melakukan tindakan bersama dalam mengelola sumberdaya hutan pada ragam elemen pokok yaitu saling percaya, jaringan sosial kolektif dan pranata yang mengandung nilai, norma, sanksi yang berfungsi sebagai pelumas ampuh melicinkan kehidupan sosial. Tindakan mengelola sumberdaya hutan secara bersama mengisyaratkan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam program PHBM. Dengan kata lain modal sosial merupakan strategi yang baik digunakan untuk pendekatan dalam pemberdayaan masyarakat terutama dalam pengembangan ekonomi pedesaan.

Terlibatnya perempuan dalam kegiatan di hutan dapat dikatakan tinggi karena aktifitas perempuan kawasan hutan tidak terlepas dari sumber daya alam yang ada di hutan. Shiva *et al.* , 2005 (*dalam* Yuliati 2014) menjelaskan bahwa partisipasi perempuan dalam program agroforestri masih rendah, padahal peranan perempuan di kawasan hutan sangat tinggi. Selain itu peranan perempuan sering

luput dari perhatian. Sehingga perlu adanya pembahasan lanjut mengenai perempuan dan lingkungan seperti yang dijelaskan oleh Yuliati (2014) fakta bahwa perempuanlah yang lebih *concern* terhadap persoalan-persoalan lingkungan tetapi luput dari perhatian. Rendahnya partisipasi perempuan tidak lain karena posisi perempuan kurang menguntungkan dalam sistem sosial. Sehingga isu-isu gender seperti marginalisasi, stereotip, kekerasan, subordinasi, dan beban ganda bisa saja terjadi kepada perempuan yang menyebabkan partisipasi yang kurang optimal pada suatu program pembangunan seperti PHBM.

Program PHBM salah satunya diselenggarakan di Desa Tambakasri Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang. Kecamatan Sumbermanjing termasuk dalam Sub Satuan Wilayah Pengembangan Area Dampit memiliki 21, 328 Ha yang mana jumlah ini adalah yang terbesar di antara kecamatan lain yang ada di Kabupaten Malang (Laporan Tahunan Dinas Pertanian dan Perkebunan dalam Pratama, 2016). Pada Desa Tambakasri sendiri memiliki luasan hutan sebesar 325 Ha. Wilayah hutan yang cukup luas ini diharapkan turut serta perempuan dalam berpartisipasi pada program. Tetapi partisipasi perempuan pada program masih rendah. Sedangkan peran perempuan dalam dikawasan hutan sangat tinggi. Hal tersebut dikarenakan beberapa faktor yang mengekang perempuan pada kegiatan-kegiatan produktif, reproduktif dan sosial kemasyarakatan. Oleh karena itu perlu adanya penelitian tentang modal sosial masyarakat desa dalam mengelola hutan dan hubungannya dengan partisipasi perempuan terhadap program PHBM.

1.2 Rumusan Masalah

Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) merupakan upaya dari pemerintah dalam mengatasi krisis lingkungan dengan menyelamatkan sumber daya hutan dan lingkungan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan. PHBM dirancang sebagai sistem dalam pengelolaan lingkungan hutan dengan menempatkan seluruh stakeholder sekaligus masyarakat kawasan hutan dalam pengelolaan dan pembagian hasil berupa sharing dengan perhutani. Sistem ini dijalankan oleh lembaga hutan yaitu dengan pembentukan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) atau untuk Kabupaten Malang dengan sebutan

Lembaga Kemitraan Desa Pengelola Hutan (LKDPH) yang bekerja sama dengan perhutani dan turut mensukseskan program PHBM.

Perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan pada seringkali terjadi pada pelaksanaan PHBM. Perbedaan peranan ini timbul akibat *sexiest* atau jenis kelamin yang membedakan jenis kegiatan yang dilakukan hingga pengambilan keputusan. Pekerjaan perempuan dikawasan hutan melingkupi kegiatan produktif, reproduktif dan sosial kemasyarakatan Tetapi peranan laki-laki sampai saat ini dominan dalam kegiatan yang mencakup kegiatan produktif. Perempuan dianggap kurang dominan dalam pekerjaan produktif misalnya usahatani sedangkan perempuan dianggap sangat dominan pada kegiatan reproduktif karena sudah dianggap sebagai kegiatan domestik perempuan. Keadaan tersebut terjadi karena berbagai macam faktor dan salah satunya dapat dilihat dari stereotip bahwa perempuan selalu mengalah, manut atau menurut, luwes, lemah lembut dan lain-lain sehingga menutup kesempatan perempuan dalam mengeksplor diri dalam berbagai bidang baik ekonomi, sosial maupun budaya. Berdasarkan permasalahan tersebut penting dalam penelitian untuk menganalisis peran perempuan pada profil kegiatan, kontrol dan akses dan manfaat pada PHBM.

Pelaksanaan program PHBM masyarakat memiliki nilai, norma, dan aturan tersendiri dalam pengelolaannya. Modal sosial yang dimiliki oleh pesanggem yang tergabung pada LKDPH merupakan suatu elemen yang dapat menjaga kelestarian hutan dengan aturan-aturan yang dimilikinya. Nilai, norma adat dan manfaat yang dirasakan dari program PHBM menimbulkan kepercayaan tersendiri antar masyarakat pengelola hutan, sehingga masyarakat secara proaktif akan berpartisipasi untuk ikut andil dalam pelaksanaan program PHBM. Menurut Santoso (2007) bahwa pada masyarakat yang masih memelihara elemen modal sosial di pedesaan tepian hutan, baik tipe adat, rakyat, maupun negara cenderung lebih konsisten untuk memelihara sumberdaya hutan daripada masyarakat yang telah mengalami pemudaran nilai dan norma modal sosial. Oleh karena itu, menjadi penting dalam penelitian ini untuk mengidentifikasi modal sosial masyarakat khususnya perempuan dalam PHBM.

Pelaksanaan program PHBM menjadikan partisipasi anggota sangat diharapkan untuk menjalankan program. Partisipasi yang diharapkan tidak hanya

partisipasi laki-laki tetapi juga perempuan karena program PHBM adalah program yang berwawasan gender. Tetapi dari beberapa penelitian dapat diketahui partisipasi perempuan masih rendah karena dalam paradigma pembangunan perempuan lah yang seringkali luput dari perhatian meskipun peranannya dalam persoalan lingkungan sangat tinggi. Yuliati (2014) menjelaskan bahwa masih banyak penelitian yang menunjukkan partisipasi perempuan dalam program agroforestri masih rendah, padahal peranan perempuan di kawasan hutan sangat tinggi. Selain itu peranan perempuan sering luput dari perhatian sehingga penting untuk menganalisis bagaimana partisipasi perempuan pesanggem pada PHBM.

Luputnya perhatian terhadap perempuan juga terjadi karena modal sosial yang terdapat pada masyarakat. Karena modal sosial yang ada dalam masyarakat juga mempengaruhi tingkat partisipasi dari perempuan untuk melakukan dan terlibat dari suatu program yang dijalankan. Sehingga untuk mengetahui tingkat partisipasi perempuan dalam PHBM, maka modal sosial perlu diidentifikasi perannya. Sehingga dari identifikasi tersebut mengetahui bagaimana modal sosial dalam lingkup pekerjaan perempuan apakah nantinya akan merubah atau tidak merubah keadaan perempuan dalam keterlibatannya dalam sebuah lembaga LKDPH maupun dalam program PHBM.

Dari uraian permasalahan di atas dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana profil aktifitas, kontrol dan akses perempuan pesanggem terhadap sumberdaya dan manfaat dalam PHBM ?
2. Bagaimana modal sosial pesanggem di Desa Tambakasri ?
3. Bagaimana tingkat partisipasi perempuan pesanggem dalam program PHBM ?
4. Bagaimana hubungan modal sosial yang dimiliki masyarakat dengan partisipasi perempuan dalam program PHBM ?

1.3 Batasan Masalah

Agar penelitian lebih terarah, terfokus dan menghindari pembahasan yang terlalu luas sehingga ditetapkan batasan masalah penelitian. Masalah penelitian dibatasi pada permasalahan partisipasi dan modal sosial perempuan sebagai pesanggem pada program PHBM.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Menganalisis profil aktifitas, kontrol dan akses perempuan pesanggem terhadap sumberdaya dan manfaat dalam PHBM.
2. Menganalisis modal sosial masyarakat di Desa Tambakasri.
3. Menganalisis tingkat partisipasi perempuan pesanggem dalam program PHBM.
4. Menganalisis hubungan modal sosial yang dimiliki masyarakat dengan partisipasi perempuan dalam program PHBM.

1.5 Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Bagi peneliti, penelitian ini merupakan proses belajar yang ditempuh peneliti sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya
2. Bagi perhutani dan pemerintah, penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pemerintah daerah sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan yang menyangkut pengelolaan lingkungan yang melibatkan masyarakat.
3. Bagi kalangan *stakeholder* dan yang terkait, penelitian ini diharapkan memberikan gambaran sejauh mana laki-laki dan perempuan ikut serta dalam program PHBM dan menerimana manfaat atas keikutsertaanya.
4. Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan mengenai pentingnya aspek modal sosial dan partisipasi pada gender dalam berbagai macam pembangunan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian terdahulu

2.1.1 Telaah Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil kajian terhadap beberapa penelitian terdahulu, seperti ditunjukkan dalam Tabel.1, maka dapat diidentifikasi perbedaan penelitian yang telah dilakukan dengan penelitian sebelumnya. Berikut telaah penelitian terdahulu dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan :

1. Pada penelitian ini lebih ditekankan untuk menganalisis modal sosial yang kaitanya dengan partisipasi perempuan dalam pelaksanaan PHBM yang berperspektif gender. Sedangkan analisis gender digunakan sebagai ciri khas penelitian perempuan untuk melihat faktor-faktor perempuan yang mempengaruhi partisipasi dari segi aktivitas, akses, kontrol dan manfaat dari program PHBM.
2. Penelitian terdahulu lebih banyak menganalisa gender dari keterlibatan dalam PHBM dari aspek kesejahteraannya. Ada juga yang menganalisa tentang modal sosial dari masyarakat dalam pelaksanaan PHBM tidak membahas partisipasi dari laki-laki dan perempuan atau perspektif gendernya.
3. Perbedaan lainnya juga bisa dilihat dari lokasi penelitian dimana penelitian akan dilakukan di Desa Tambakasri Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang. Selama ini, belum ada penelitian sejenis yang dilakukan di tempat tersebut. Sementara, penelitian terdahulu dilakukan di berbagai wilayah yang tersebar di Indonesia dan di beberapa negara lainnya.
4. Unit analisis pada penelitian terdahulu modal sosial masih membahas unit masyarakat secara luas tanpa dibaedakan menurut gender. Sedangkan penelitian ini unit analisisnya adalah perempuan sebagai unit utama, sedangkan laki-laki sebagai pembanding saja.

Secara lebih rinci, perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan disajikan pada Tabel 1 sebagai berikut :

Tabel 1. Perbedaan Penelitian dengan Penelitian Terdahulu

| no | Peneliti, Judul, tahun, penerbit | Aspek Kajian dan Tujuan Penelitian | Metode Penelitian | Hasil Penelitian |
|---|--|---|---|--|
| 1 | <p>Laili Zumrotul Bahriyah (2006). Analisis Gender dalam kegiatan pengelolaan hutan bersama Masyarakat (Kasus di Desa Pulosari, RPH Pangalengan, BKPH Pangalengan, KPH Bandung Selatan, Perum Perhutani Unit III Jawa Barat dan Banten). Skripsi Institut Pertanian Bogor.</p> | <ul style="list-style-type: none"> a. PHBM melibatkan anggota masyarakat yang tinggal di hutan b. Identifikasi partisipasi, curahan kerja dan pembagian kerja laki-laki dan perempuan dalam PHBM budidaya kopi c. Analisis kontribusi laki-laki dan perempuan pada pendapatan rumah tangga dari kegiatan PHBM budidaya kopi. | <ul style="list-style-type: none"> a. Metode penelitian deskriptif b. Pendekatan penelitian kualitatif c. Pengumpulan data dengan wawancara dan studi literatur d. Penentuan responden dipilih secara acak berdasar kepemilikan lahan e. Penentuan jumlah responden berasal dari populasi RT peserta PHBM sebanyak 67 orang. Jumlah responden diamati dari tiap strata dengan alokasi berimbang. | <ul style="list-style-type: none"> a. Partisipasi perempuan pada tahap perencanaan lebih rendah daripada tahap pelaksanaan PHBM b. Pengambilan keputusan untuk kegiatan produktif dalam RT strata I didominasi laki-laki c. Pengambilan keputusan kegiatan reproduktif strata II,III,IV sebagian besar merupakan kesepakatan bersama. d. Curahan waktu perempuan pada kegiatan produktif budidaya kopi dan kegiatan lain lebih rendah dibanding laki-laki. e. curahan waktu perempuan dalam kegiatan reproduktif pada berbagai strata lebih tinggi dibanding laki-laki. |
| <p>Perbedaan dengan penelitian terdahulu: Perbedaan tempat penelitian pada penelitian terdahulu dilakukan di Bandung sedangkan penelitian ini dilakukan di Kabupaten Malang. Fokus penelitian berbeda yaitu pada fokus penelitian terdahulu lebih membahas analisis gender pada usaha tani kopi melalui curah kerja, pengambilan keputusan, pembagian kerja laki-laki dan perempuan dan analisis pendapatan. Sedangkan pada penelitian ini berfokus pada partisipasi perempuan pada PHBM yang di analisis hubungannya dengan modal sosial dan analisis gender harvard</p> | | | | |

| no | Peneliti, Judul, tahun, penerbit | Aspek Kajian dan Tujuan Penelitian | Metode Penelitian | Hasil Penelitian |
|---|--|--|--|---|
| 2 | Tri Marhaeni Pudji Astuti (2012). Ekofeminisme dan Peran Perempuan dalam Lingkungan. Indonesian Journal of Conservation. Vol. 1 No. 1 – Juni 2012 (ISSN: 2252-9195) Hlm. 49-60 | <ul style="list-style-type: none"> a. Ekofeminisme menggambarkan isu lingkungan berkaitan dengan perempuan. b. Perempuan mempunyai peran sentral dalam pengelolaan lingkungan c. Tujuan penelitian untuk mengemukakan berbagai contoh peran perempuan dalam lingkungan hidup di berbagai negara. d. Tujuan selanjutnya implementasi dan peran perempuan secara nyata dalam pengelolaan lingkungan. | <ul style="list-style-type: none"> a. Metode penelitian fenomenologi b. Pendekatan penelitian kualitatif | <ul style="list-style-type: none"> a. Masalah lingkungan tidak hanya berpusat pada lingkungan yang bersifat fisik tetapi juga sosial dan budaya. Sosial budaya yang dimaksud merupakan pola pikir, nilai, adat, dan kebiasaan masyarakat setempat. b. Pola pikir yang memahami humanis dan empati identik dengan pola pikir ekofeminisme yang membuat terobosan keadilan untuk alam dan analogi masyarakat bahwa alam dimitoskan sebagai perempuan. |
| <p>Perbedaan dengan penelitian terdahulu :</p> <p>Pada penelitian terdahulu fokus penelitian pada peran perempuan dan implementasi kegiatan perempuan dalam kegiatan pengelolaan lingkungan. Metode penelitian fenomenologi dan pendekatan penelitian kualitatif. Sedangkan pada penelitian ini tidak hanya berfokus pada peran perempuan pada pengelolaan lingkungan melalui program PHBM tetapi juga pada partisipasi dan modal sosial perempuan. Analisis yang digunakan pada penelitian ini berbeda karena menggunakan deskriptif statistik, analisis gender dan rank spearman.</p> | | | | |

| no | Peneliti, Judul, tahun, penerbit | Aspek Kajian dan Tujuan Penelitian | Metode Penelitian | Hasil Penelitian |
|--|---|---|---|---|
| 3 | <p>Moh Ngabdani, Chatarina Muryani, R.Sudaryanto (2015)</p> <p>Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) Di Desa Girimulyo Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi.</p> <p>Jurnal GeoEco Vol 1, No.1 (Januari 2015) hal 58-66</p> | <p>a. Untuk mengetahui pelaksanaan program PHBM di Girimulyo Kec. Jogorogo Ngawi</p> <p>b. Mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat dalam PHBM di Girimulyo</p> <p>c. Mengetahui upaya yang dilakukan oleh dinas kehutanan dalam pelaksanaan PHBM di Girimulyo</p> | <p>a. Metode penelitian survey</p> <p>b. Pendekatan kualitatif</p> <p>c. Analisis data deskriptif</p> | <p>a. Partisipasi masyarakat Girimulyo cukup baik pada PHBM dilihat dari berbagai kegiatan teknis kehutanan maupun non teknis</p> <p>b. Implementsai PHBM Girimulyo cukup berjalan baik dilihat dari segi administratifnya</p> <p>c. Tenaga pendamping lapang yang berasal dari unsur LSM dan penyuluh lapang kehutanan oleh LMDH Girimulyo direspon baik dalam rangka pemantapan kelembagaan LMDH.</p> |
| <p>Perbedaan dengan penelitian terdahulu :</p> <p>Fokus penelitian terdahulu yaitu pada partisipasi masyarakat pada pelaksanaan program PHBM. Sedangkan pada penelitian ini obyek penelitian modal sosial dalam partisipasi perempuan pesanggem pada PHBM adalah perempuan dan fokusnya tidak hanya partisipasi, yaitu modal sosial dan faktor-faktor yang berhubungan dengan partisipasi melalui analisis harvard. Pada penelitian terdahulu tidak melakukan analisis dengan rank spearman sedangkan pada penelitian ini menggunakan analisis rank spearman untuk melihat kedekatan atau hubungan antar variabel.</p> | | | | |

| no | Peneliti, Judul, tahun, penerbit | Aspek Kajian dan Tujuan Penelitian | Metode Penelitian | Hasil Penelitian |
|--|--|---|---|--|
| 4 | Evi Juita K. Nababan, Rommy Qurniati dan Asihing Kustanti (2016). Modal Sosial pada Pengelolaan dan Pelestarian Hutan Mangrove di Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur. Jurnal Sylva Lestari Vol. 4 No 2, April 2016 (89-100) | <ul style="list-style-type: none"> a. Keadaan hutan mangrove di Kecamatan Maringgai mengalami kerusakan b. PHBM sebagai program untuk mengajak masyarakat turut serta dalam program c. Modal sosial yang dibutuhkan dalam masyarakat agar program bisa berjalan lancar | <ul style="list-style-type: none"> a. Pendekatan kualitatif dan kuantitatif b. metode deskriptif dan skoring c. penentuan responden dengan metode simple random sampling d. penentuan jumlah sampel responden dengan slovin | <p>Tingkat modal sosial mayoritas rendah.</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) Kelompok dan jaringan tergolong rendah (b) Kepercayaan dan solidaritas tergolong rendah (c) kolektif dan kerjasama tergolong rendah (d) informasi dan komunikasi tergolong rendah (e) kohesi dan inklusi rendah (f) pemberdayaan dan aksi politik juga tergolong rendah |
| <p>Perbedaan dengan penelitian terdahulu:</p> <p>Penelitian terdahulu berfokus hanya pada modal sosial masyarakat pada pengelolaan hutan. Tujuan pada penelitian terdahulu menggambarkan keadaan modal sosial masyarakat dalam mengelola hutan dengan skoring, sedangkan pada penelitian ini tidak hanya menggambarkan modal sosial dengan skoring tetapi juga dianalisis hubungan variabel modal sosial dengan partisipasi menggunakan alat analisis rank spearman.</p> | | | | |

| no | Peneliti, Judul, tahun, penerbit | Aspek Kajian dan Tujuan Penelitian | Metode Penelitian | Hasil Penelitian |
|--|---|---|--|---|
| 5 | Ahmad Zikri Fadilah (2016) Hubungan Modal Sosial dengan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) | a. Identifikasi modal sosial masyarakat terhadap LMDH dalam pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat b. Identifikasi partisipasi masyarakat desa hutan dalam PHBM Menganalisa hubungan modal sosial masyarakat dengan partisipasi masyarakat dalam PHBM | a. Jenis penelitian kuantitatif b. Penentuan responden menggunakan simple random sampling b. Analisis data rank spearman | a. Tingkat modal sosial berada pada kategori tinggi dan tingkat partisipasi berada pada kategori rendah dan sedang. b. Hubungan antara tingkat kepercayaan, pengetahuan dan ketaatan pada norma, tingkat jaringan dan juga tingkat modal sosial dengan tingkat partisipasi terdapat hubungan yang tidak nyata. |
| <p>Perbedaan dengan penelitian terdahulu :</p> <p>Penelitian terdahulu lebih meneliti modal sosial dan partisipasi masyarakat dengan tidak membedakan laki-laki dan perempuan. Pada penelitian ini urgensi penelitian adalah lemahnya partisipasi perempuan sehingga meneliti modal sosial dan partisipasi perempuan pada program PHBM . Selain itu pada penelitian terdahulu tidak membahas gender dalam pengelolaan hutan, tetapi dalam penelitian ini terdapat analisis gender sebagai bentuk analisis partisipasi perempuan berdasarkan analisis harvard yaitu profil aktifitas, kontrol, akses dan manfaat.</p> | | | | |

Sumber: Data sekunder yang diolah penulis, 2018.

2.2 Teori

2.2.1 Modal Sosial

Modal sosial (*social capital*) merupakan satu terminologi baru yang dikembangkan oleh ahli-ahli sosial untuk memperkaya pemahaman individu tentang masyarakat dan komunitas. Modal sosial menjadi khasanah perdebatan yang menarik bagi ahli-ahli sosial dan pembangunan khususnya awal tahun 1990-an. Teori tentang modal sosial ini pada awalnya dikembangkan oleh seorang sosiolog Perancis bernama Pierre Bourdieu, dan oleh seorang sosiolog Amerika Serikat, James Coleman. Bourdieu menyatakan ada tiga macam modal, yaitu modal uang, modal sosial, dan modal budaya, dan akan lebih efektif digunakan jika diantara ketiganya ada interaksi sosial atau hubungan sosial.

Fukuyama (1995) mendefinisikan, modal sosial sebagai serangkaian nilai-nilai atau norma-norma informal yang dimiliki bersama diantara para anggota suatu kelompok yang memungkinkan terjalinnya kerjasama di antara anggota kelompok. Adapun Cox (1995) mendefinisikan, modal sosial sebagai suatu rangkaian proses hubungan antar manusia yang ditopang oleh jaringan, norma norma, dan kepercayaan sosial yang memungkinkan efisien dan efektifnya koordinasi dan kerjasama untuk keuntungan dan kebajikan bersama.

Modal sosial dapat digunakan untuk segala kepentingan, namun tanpa ada sumber daya fisik dan pengetahuan budaya yang dimiliki, maka akan sulit bagi individu individu untuk membangun sebuah hubungan sosial. Hubungan sosial hanya akan kuat jika ketiga unsur diatas berkesinambungan (Hasbullah, 2006 dalam Fadilah 2016). Modal sosial (*social capital*) dapat didefinisikan sebagai kemampuan masyarakat untuk bekerja bersama, demi mencapai tujuan-tujuan bersama, di dalam berbagai kelompok. Sejumlah kejanggalan dan kegagalan tersebut muncul di permukaan karena para ekonom penganut mazab neo-klasik menganggap bawa faktor-faktor kultural dari perilaku (*behavior*) manusia sebagai makhluk rasional dan memiliki kepentingan diri (*self interested*) menjadi sesuatu yang dikesampingkan (Fukuyama, 1992).

Modal sosial adalah sumberdaya yang dapat dipandang sebagai investasi untuk mendapatkan sumberdaya baru. Di mana kebudayaan tersebut dapat

membantu masyarakat atau komunitas supaya bisa menumbuhkembangkan kehidupan ekonomi masyarakat atau komunitas tersebut. Kemampuan komunitas mendayagunakan modal sosial membuat penggunaan modal menjadi lebih efektif dan efisien sehingga memungkinkan terciptanya sistem pengelolaan yang berkelanjutan (Hasbullah, 2006) dalam Fadilah (2016).

Modal sosial merupakan sumber daya yang muncul dari adanya relasi sosial dan partisipasi, kerja sama, saling peduli, dan hubungan timbal balik. Kepercayaan dan norma dalam modal sosial dianggap sebagai komponen sangat penting karena menopang hubungan relasi sosial yang ada. Dalam hal ini dapat diartikan jika tidak ada kepercayaan, maka hubungan relasi sosial yang ada tidak dapat dikatakan sebagai modal sosial. Anggita (2013) mendefinisikan modal sosial sebagai sumberdaya yang muncul dari adanya relasi sosial yang dapat digunakan sebagai perekat sosial untuk menjaga kesatuan anggota kelompok dalam mencapai tujuan bersama. Ditopang oleh adanya kepercayaan dan norma sosial yang dijadikan acuan bersama dalam bersikap, bertindak, dan berhubungan satu sama lain. Modal sosial terdiri dari beberapa komponen, yaitu relasi sosial, kepercayaan, dan norma.

2.2.2 Unsur Unsur Modal Sosial

Harsono (2014) mengatakan bahwa modal sosial terdiri dari tiga poin penting, yaitu kepercayaan (*trust*), norma yang berlaku secara timbal balik (*norm of reciprocity*), dan jaringan sosial (*social network*) yang berkembang di antara individu yang ada di masyarakat dan kebanyakan merupakan organisasi sosial masyarakat yang bersifat formal maupun informal. Hal tersebut selaras dengan teori Putnam *et al.* (1993) yang juga menegaskan bahwa modal sosial seperti *trust* (rasa saling percaya), *norm* (norma), dan jaringan kerja, memudahkan terjadinya koordinasi dan kerja sama untuk kemanfaatan bersama.

a. Kepercayaan (*trust*)

Merupakan komponen mengenai bagaimana seseorang percaya kepada orang lain dalam suatu komunitas ataupun diluar komunitas. Hal ini berkaitan dengan bagaimana harapan-harapan yang muncul dari A yang mempercayai B dengan harapan bahwa harapan-harapan tersebut dapat terpenuhi. Sehingga kepercayaan bersifat timbal balik. Dalam kaitannya dengan keberhasilan

program, kepercayaan sangat berpengaruh dalam bagaimana unit-unit yang ada dalam program tersebut bisa saling bekerja secara fungsional. Karena kepercayaan yang timbul dalam kelompok tertentu akan menimbulkan kepuasan yang akan berdampak positif.

b. Jejaring (*network*)

Merupakan komponen mengenai banyaknya relasi-relasi yang terbentuk dari suatu komunitas di dalamnya maupun antar komunitas. Hal ini berkaitan dengan seberapa banyak seseorang yang dikenal dengan berbagai kelebihan dan kekurangan sehingga dapat dioptimalkan akses tersebut untuk berbagai kebutuhan. Selain itu, banyaknya jejaring memudahkan seseorang untuk meminta bantuan ketika sedang kesusahan karena semakin banyak jejaring, semakin banyak opsi yang muncul untuk diminta bantuannya. Hal ini menjadi penting dalam konteks keberhasilan program.

c. Norma (*norms*)

Merupakan komponen berisi peraturan-peraturan yang terdapat dalam suatu hubungan relasional, baik itu di masyarakat maupun di kelembagaan tertentu. Peraturan-peraturan yang dimaksud adalah peraturan tertulis dan tidak tertulis. Penekanan di komponen ini adalah mengenai ada tidaknya suatu norma dan bagaimana kepatuhan orang-orang yang berada di dalam aturan tersebut berlaku. Semakin patuh anggota-anggota suatu komunitas tertentu, maka semakin baik modal sosialnya. Dalam keberhasilan program, kepatuhan terhadap norma akan berguna untuk mengontrol para penerima agar tetap berada pada jalur yang telah disepakati.

2.2.3 Gender dalam Pengambilan Keputusan

Di dalam rumah tangga setiap hal yang menyangkut kepentingan keluarga atau bahkan pribadi-pribadi anggota memiliki cara tertentu untuk mengambil keputusan. Ada keluarga yang pengambilan keputusan tertinggi adalah ayah, ada yang bersama-sama (ayah dan ibu), ada pula yang ibu saja. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengambilan keputusan didasarkan pada jenis kelamin dan posisi seseorang dalam kehidupan sosial. Sejalan dengan pendapat (Yani, 2012) bahwa pengambilan keputusan dalam keluarga oleh perempuan dipengaruhi

karakteristik seseorang seperti umur, jenis kelamin, pendidikan, pendapatan, pengalaman dan posisi seseorang dalam kehidupan sosial.

Pembagian peran yang berjalan dalam suatu masyarakat tertentu seringkali meletakkan perempuan pada posisi yang kurang menguntungkan, misalnya dibatasi akses dan kontrolnya terhadap pengambilan keputusan, bahkan keputusan-keputusan yang menyangkut dirinya dan kehidupannya. Dalam banyak hal, perempuan diharuskan tunduk pada keputusan yang diambil laki-laki. Penelitian (Agusnawati, 2006) pengambilan keputusan sektor pertanian pada pengelolaan hutan kemiri menyebutkan posisi perempuan dalam pengambilan keputusan masih lemah dan didominasi oleh laki-laki dalam hal perencanaan, akses kontrol sumberdaya dan modal. Selama ini peran perempuan dalam sektor pertanian di pedesaan sangat tinggi namun seringkali tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pengembangan sektor pertanian. Menurut Handayani dan Sugiarti (2002) perempuan belum berperan maksimal dalam pembangunan disebabkan pemahaman perempuan cenderung hanya sebatas peran domestik sehingga kurang diperhatikan dalam penentu kebijakan pembangunan.

Penempatan kaum perempuan dalam posisi yang seolah-olah tidak penting dalam aktivitas pengelolaan sumber daya alam ini disebabkan adanya mitos negatif yang masih berkembang, antara lain: perempuan adalah istri di rumah, hasil hutan adalah domain laki-laki, laki-laki adalah kepala rumah tangga, perempuan adalah anggota masyarakat yang pasif, perempuan kurang produktif dibanding laki-laki (Suharjito et al, 2003). Tidak disemua tempat, perempuan kehilangan hak dalam pengambilan keputusan. Kasus seperti penelitian (Lesmana, 2005) pada penerapan teknologi pada usaha tani salak pondoh Nglumut menunjukkan bahwa perempuan dominan dalam penentuan usaha tani aspek pengawinan, waktu panen, penanganan pasaca panen hingga pemasaran. Dominansi perempuan dalam hal ini dikarenakan perempuan mendominasi dalam pengambilan keputusan bidang penggunaan pendapatan harian sebab seorang perempuan (istri) juga sekaligus menjadi pengelola rumah tangga yang banyak mengetahui dan banyak terlibat dalam urusan tersebut.

2.2.4 Peran Gender Dalam Pengelolaan Lingkungan

Gender menggambarkan peran laki-laki dan perempuan sebagai hasil dari kontribusi sosial budaya. Perbedaan peran ini bukan disebabkan perbedaan biologis, melainkan oleh nilai-nilai, norma-norma, hukum-hukum, ideologi dari masyarakat yang bersangkutan. Perbedaan gender suatu kelompok masyarakat berbeda dengan kelompok masyarakat lainnya.

Dalam suatu kelompok masyarakat posisi perempuan ada yang ditinggikan, direndahkan atau bahkan sejajar dalam segala bidang atau pada bidang tertentu daripada laki-laki. Karena gender merupakan hasil konstruksi sosial budaya, maka perbedaan gender dalam suatu masyarakat dapat berubah dari waktu ke waktu. Keluarga atau rumah tangga merupakan satuan masyarakat terkecil dimana segala macam hubungan antara laki-laki dan perempuan dapat tercermin. Mulai dari pembedaan peran, pembagian kerja, penguasaan dan akses atas sumber-sumber baik fisik, maupun ideologis, hak dan posisi (Simatauw *et al.* 2001 dalam Fadilah, 2016)

2.2.5 Ketidakadilan gender

Kondisi yang mencerminkan ketertinggalan perempuan dalam aspek tertentu dapat disebut sebagai ketidakadilan gender. Pernyataan ini sesuai dengan pendapat Fakhri (2008) dalam Rahayu (2016) menyatakan, ketidakadilan gender adalah suatu sistem dan struktur yang menempatkan laki-laki maupun perempuan sebagai korban dari sistem tersebut. Ketidakadilan gender termanifestasikan dalam berbagai bentuk ketidakadilan, terutama pada perempuan; misalnya marginalisasi, *subordinasi*, stereotipe/pe-labelan negatif sekaligus perlakuan diskriminatif, kekerasan terhadap perempuan, beban kerja lebih banyak dan panjang. Manifestasi ketidakadilan gender tersebut masing-masing tidak bisa dipisahkan, saling terkait dan berpengaruh secara dialektis. Menurut Handayani dan Sugiarti (2002) ketidakadilan gender dapat berupa :

- 1) Marginalisasi

Proses peminggiran yang mengakibatkan kemiskinan, banyak terjadi pada negara berkembang seperti penggusuran dan eksploitasi. Marginalisasi terhadap perempuan terjadi sejak berada di rumah tangga, diskriminasi terjadi atas anggota keluarga yang lelaki dan perempuan. Proses tersebut mengakibatkan memiskinkan kaum perempuan di bidang ekonomi. Proses marginalisasi perempuan dari segi sumbernya bisa berasal dari kebijakan pemerintah, keyakinan, tafsiran agama, keyakinan tradisi, dan kebiasaan atau bahkan asumsi ilmu pengetahuan. Hal ini berpengaruh terhadap adanya dominasi laki-laki. Perempuan dianggap mempunyai pandangan yang bersifat *feminin*, artinya perempuan hanya dianggap sebagai pengasuh, keibuan, dan lembut. Figur dominan perempuan di mana saja, masih tetap sama dengan zaman paleolitik yaitu sebagai ibu dan pengasuh anak-anaknya. Figur dominan perempuan seperti inilah yang dianggap sebagai kendala besar bagi terwujudnya kesetaraan gender.

2) Subordinasi

Subordinasi ialah anggapan tidak penting dalam keputusan politik (Handayani dan Sugiarti, 2002). Dengan kata lain subordinasi merupakan keyakinan keyakinan bahwa salah satu jenis kelamin dianggap lebih penting atau lebih utama dibanding jenis kelamin lainnya. Pandangan gender, menimbulkan subordinasi lebih identik terjadi terhadap perempuan. Adanya anggapan bahwa perempuan itu irasional, emosional, maka dianggap tidak dapat memimpin dan oleh karena itu harus ditempatkan pada posisi yang tidak penting (Fakih, 2008) dalam (Rahayu, 2016). Sehingga dapat disimpulkan bahwa sub-ordinasi merupakan penomorduaan posisi perempuan dibanding laki-laki. Bentuk-bentuk subordinasi terjadi dalam segala macam perbedaan tempat dan waktu. Misalnya di Jawa, yang beranggapan bahwa perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi. Bahkan, pemerintahan pernah memiliki peraturan bahwa suami dapat mengambil keputusan sendiri ketika hendak belajar jauh dari keluarga. Praktik seperti itulah yang sesungguhnya berangkat dari suatu kesadaran gender yang tidak adil.

3) Stereotype

Stereotipi adalah pelabelan terhadap suatu kelompok atau jenis pekerjaan tertentu. Secara umum stereotipi merupakan pelabelan atau penandaan yang selalu berakibat pada ketidakadilan, sehingga dinamakan pelabelan negatif. Menurut (Rahayu, 2016) Salah satu *stereotype* yang berkembang berdasarkan pengertian gender, yakni terjadi terhadap salah satu jenis kelamin, yaitu perempuan. Hal ini mengakibatkan terjadinya diskriminasi dan berbagai ketidakadilan yang merugikan kaum perempuan. Misalnya pandangan terhadap perempuan yang tugas dan fungsinya hanya melaksanakan pekerjaan yang berkaitan dengan pekerjaan domestik atau kerumahtanggaan. Hal ini tidak hanya terjadi dalam lingkup rumah tangga tetapi juga terjadi di tempat kerja dan masyarakat, bahkan di tingkat pemerintah dan negara.

Apabila seorang laki-laki marah, ia dianggap tegas, tetapi bila perempuan marah atau tersinggung dianggap emosional dan tidak dapat menahan diri. Standar nilai terhadap perilaku perempuan dan laki-laki berbeda, namun standar nilai tersebut banyak menghakimi dan merugikan perempuan. Label kaum perempuan sebagai “ibu rumah tangga” merugikan, jika hendak aktif dalam “kegiatan laki-laki” seperti berpolitik, bisnis atau birokrat. Sementara label laki-laki sebagai pencari nafkah utama, (*breadwinner*) mengakibatkan apa saja yang dihasilkan oleh perempuan dianggap sebagai sambilan atau tambahan dan cenderung tidak.

4. *Violence* (kekerasan).

Berbagai bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan sebagai akibat perbedaan, muncul dalam berbagai bentuk. Kata kekerasan merupakan terjemahan dari *violence*, artinya suatu serangan terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Kekerasan tidak hanya menyangkut serangan fisik saja seperti perkosaan, pemukulan dan penyiksaan, tetapi juga yang bersifat non fisik, seperti pelecehan seksual sehingga secara emosional terusik. Pelaku kekerasan bermacam-macam, ada yang bersifat individu, baik di dalam rumah tangga sendiri maupun di tempat umum, ada juga di dalam masyarakat itu sendiri. Pelaku bisa saja

suami atau ayah, keponakan, sepupu, paman, mertua, anak laki-laki, tetangga, atau majikan.

5. Beban Kerja Ganda.

Bentuk lain dari diskriminasi dan ketidakadilan gender adalah beban kerja ganda yang harus dilakukan oleh salah satu jenis kelamin tertentu secara berlebihan. Dalam suatu rumah tangga pada umumnya beberapa jenis kegiatan dilakukan laki-laki, dan beberapa dilakukan oleh perempuan. Bagi perempuan yang bekerja, selain bekerja di tempat kerja juga masih harus mengerjakan pekerjaan rumah tangga.

Perempuan dengan ekonomi lemah memiliki peran ganda yang mereka emban, yaitu sebagai seseorang yang mengurus rumah tangga dan sebagai pencari nafkah untuk keluarga. Selain itu, penghasilan perempuan hanya dianggap sebagai “penghasilan tambahan” bagi rumah tangganya. Perempuan dengan ekonomi lemah juga kesulitan dalam mengakses fasilitas publik, karena fasilitas publik di pedesaan masih minim dan bagi mereka yang tinggal di perkotaan juga harus mengeluarkan biaya yang mahal untuk mendapatkannya

2.2.6 Gender dan Pembagian Tugas (Peran) dalam Rumah Tangga

Pembagian kerja adalah mengalokasikan anggota rumah tangga laki laki dan perempuan, dewasa dan anak-anak untuk melakukan berbagai kegiatan sesuai dengan peranannya dalam kegiatan produktif dan reproduktif. Pembedaan tugas dalam rumah tangga biasanya berdasar kegiatan yang menghasilkan uang, memelihara dan merawat keluarga, pergaulan masyarakat keagamaan/ritual, pesta maupun aktifitas sosial lain (Yuliati, 2014)

Pembagian tugas atau peran sebenarnya sulit untuk dibatasi, mana tugas untuk perempuan dan mana untuk laki-laki, karena sebenarnya pembagian tugas gender kebanyakan bisa dilakukan oleh keduanya. Pembagian tugas laki-laki dan perempuan perlu dilakukan untuk berbagi tanggung jawab secara adil. Pembagian tugas yang baik tidak menjadikan gender sebagai masalah karena pembagian peran laki-laki dan perempuan tersebut menguntungkan kedua belah pihak. Pembagian peran dalam rumah tangga terdiri dari produktif dan reproduktif

Kegiatan produktif adalah kegiatan yang menghasilkan uang atau barang. Sedangkan kegiatan reproduktif adalah kegiatan yang menjamin kelangsungan hidup manusia dan keluarga seperti melahirkan dan mengasuh anak, serta pekerjaan rumah tangga. Perempuan pada umumnya memiliki dua peran yaitu peran reproduktif dan produktif, sementara laki-laki hanya produktif, dan sedikit reproduktif. Sebagai anggota komunitas sosial, laki-laki dan perempuan juga dilibatkan pada kegiatan sosial sebagai bentuk peran sosial seperti perayaan, selamatan, keikutsertaan dalam organisasi (Handayani dan Sugiarti, 2002)

Berdasarkan hasil penelitian di Yucatan-Honduras menunjukkan bahwa pada awalnya bidang pertanian merupakan pekerjaan laki-laki. Namun seiring terjadinya degradasi lahan pertanian telah meningkatkan peran perempuan pada kegiatan pertanian. Tenaga kerja laki-laki pada rumah tangga yang lahan pertaniannya marginal (miskin) dan peka erosi cenderung meninggalkan pertaniannya dan bekerja di sektor non-pertanian (off-farm). Sehingga beban tenaga kerja perempuan cenderung bertambah berat, yakni bukan hanya bertanggung jawab untuk kegiatan reproduksi melainkan juga pada lahan pertaniannya. Peran tenaga kerja perempuan tersebut tergantung ketersediaan tenaga anak dewasa yang dapat membantu bekerja dan keberadaan anak bayi dan balita (Paolisso *et al.* 1999 dalam Suharjito *et al.*, 2003)

2.2.7 Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM)

Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) adalah suatu sistem pengelolaan sumberdaya hutan dengan pola kolaborasi yang bersinergi antara Perum Perhutani dan masyarakat desa hutak atau pihak yang berkepentingan dalam upaya mencapai keberlanjutan fungsi dan manfaat sumberdaya hutan yang optimal dan peningkatan IPM yang bersifat fleksibel, partisipatif dan akomodatif (Pratama, 2010). Pengembangan PHBM dimaksudkan untuk memberikan akses kepada masyarakat atau kelompok masyarakat di sekitar hutan dan para pihak terkait (stakeholder) sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing, untuk mengelola hutan secara partisipatif tanpa mengubah status dan fungsi hutan berdasarkan prinsip-prinsip PHBM sebagai berikut :

- a. Perubahan pola pikir pada semua jajaran Perum Perhutani dari birokratis, sentralistik, kaku dan ditakuti menjadi fasilitator, fleksibel, akomodatif dan dicintai.
- b. Perencanaan partisipatif dan fleksibel sesuai dengan karakteristik wilayah.
- c. Fleksibel, akomodatif, partisipatif dan kesadaran akan tanggung jawab sosial.
- d. Keterbukaan, kebersamaan, saling memahami dan pembelajaran bersama.
- e. Bersinergi dan terintegrasi dengan program-program Pemerintah Daerah.
- f. Pendekatan dan kerjasama kelembagaan dengan hak dan kewajiban yang jelas.
- g. Peningkatan kesejahteraan masyarakat desa hutan.
- h. Pemberdayaan masyarakat desa hutan secara berkesinambungan.
- i. Mengembangkan dan meningkatkan usaha produktif menuju masyarakat mandiri dan hutan lestari.
- j. Supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan bersama para pihak (Pratama, 2016)

Model-model PHBM telah dilaksanakan Perhutani dan berjalan sejak berdirinya Perum Perhutani tahun 1972, bahkan sebelum itu, dengan melibatkan/mengikutsertakan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya hutan, antara lain dalam program Perhutanan Sosial, Agroforestry, Sylvofishery, PMDH (Pembangunan Masyarakat Desa Hutan), PMDH-T (Pembangunan Masyarakat Desa Hutan Terpadu) yang implementasinya dilaksanakan pada kegiatan tumpangsari, insus tumpangsari, penanaman di bawah tegakan, Perhutanan Sosial, tebangan, pemasaran, pembangunan sarana dan prasarana, dll. Kegiatan tersebut berkelanjutan dan sudah menjadi budaya dan ladang kesempatan bekerja dan berusaha bagi masyarakat dan stakeholders, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraannya dan kemandirian melalui peningkatan pendapatan dan produksi pangan.

2.2.8 Partisipasi dalam program PHBM

Fadilah (2016) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa PHBM memiliki rangkaian kegiatan yang didalamnya melibatkan masyarakat dalam pengelolaan hutan. Program tersebut berazas kemitraan dan memiliki prinsip untuk saling

menyelaraskan kepentingan para pemangkuanya/ *stakeholder*. Nugroho (2012) menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat desa dapat dikembangkan secara luas hingga tak terbatas, tetapi diharapkan secara aktif penerima manfaat dan pelaksana dapat terlibat langsung dalam proses pelaksanaan program-program dan kegiatan yang dilaksanakan didesa.

Menurut Cohen dan Uphoff (1977) dalam Fadillah (2016) partisipasi adalah istilah deskriptif yang mencakup berbagai kegiatan dan situasi yang beranekaragam karena besar sekali kemungkinan terjadinya kesalah pahaman tentang sebab dan akibat, ruang lingkup dan penyebarannya sedangkan menurut Theresia (2008), partisipasi anggota masyarakat dalam kegiatan pembangunan yaitu adanya sikap mendukung dan adanya keterlibatan masyarakat secara individu, kelompok atau ke dalam kesatuan bersama, perencanaan dan pelaksanaan program atas dasar tanggung jawab sosial.

Ada beberapa macam atau bentuk partisipasi yang dikemukakan oleh para ahli, antara lain menurut Yadov (1980) dalam Theresia (2008) menjelaskan ada empat macam kegiatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan yaitu:

1. Partisipasi dalam pembuatan perencanaan dan partisipasi dalam pengambilan keputusan
2. Partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan
3. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan
4. Partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi.

III. KERANGKA PEMIKIRAN

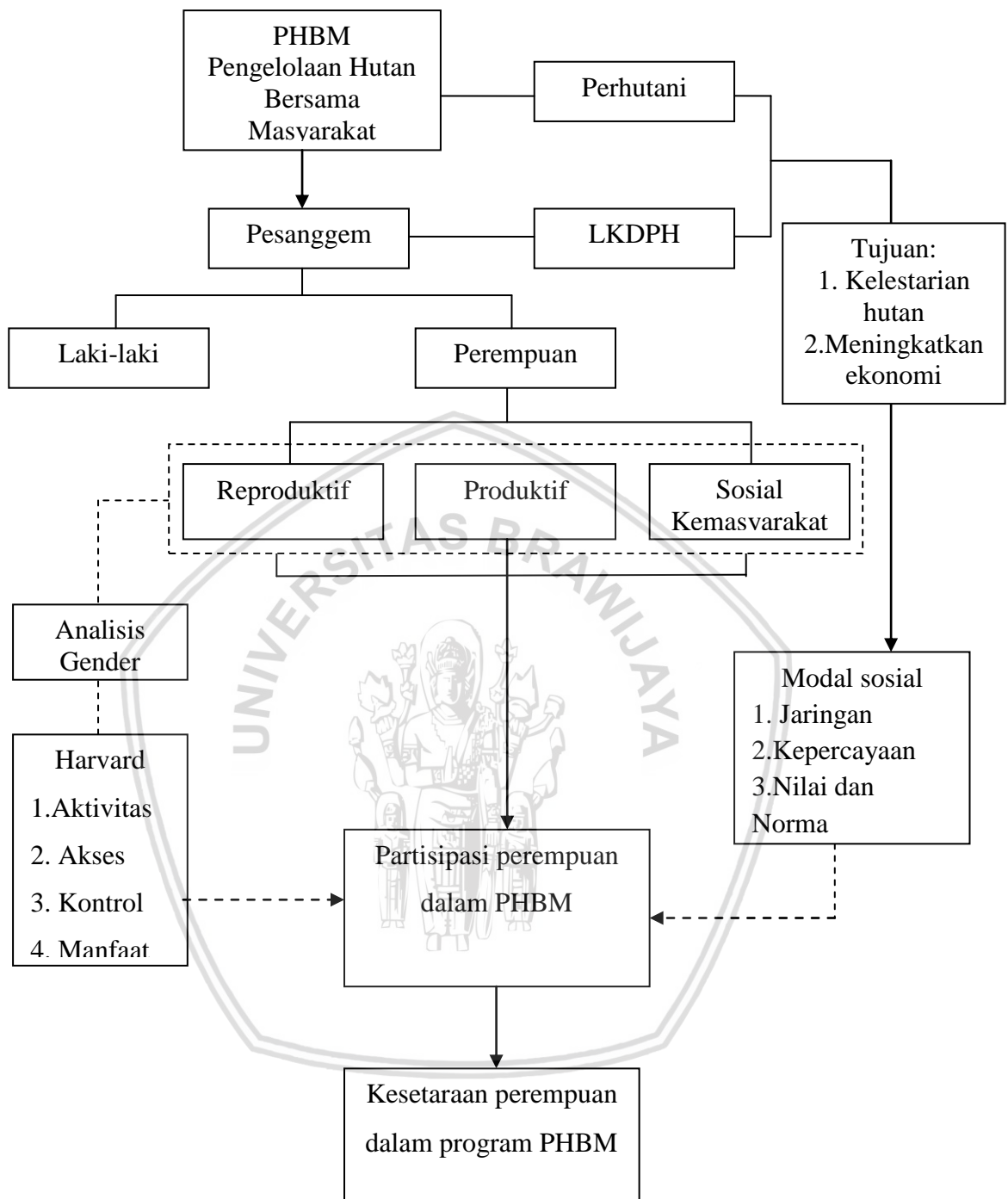
3.1 Kerangka Pemikiran

Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) merupakan upaya dari pemerintah untuk menjaga lingkungan hutan dengan melibatkan masyarakat dalam pengelolaannya. Keterlibatan masyarakat pada program yaitu dengan menjadi pesanggem. Pesanggem adalah sebutan bagi masyarakat yang mengelola lahan hutan. Dalam pelaksanaannya pesanggem diberikan petak lahan hutan untuk berusaha tani dengan tetap menjaga kelestarian hutan.

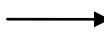
Pengelolaan yang demikian menyebabkan program PHBM tidak akan berjalan apabila masyarakat tidak berpartisipasi dalam program karena penggerak program adalah masyarakat sekitar. Masyarakat dibedakan secara biologis atau seksual menjadi laki-laki dan perempuan. Keduanya terlibat dalam suatu program tetapi yang menjadi masalah adalah ketidakadilan dalam gender.

Permasalahan masyarakat hutan biasanya terdapat perbedaan peranan yang timbul akibat *sexiest* atau jenis kelamin. Peranan laki-laki sampai saat ini dianggap lebih dominan dari perempuan dalam kegiatan salah satunya pekerjaan produktif. Bahasan gender lebih memfokuskan pada perempuan, kegiatan perempuan dikawasan hutan melingkupi kegiatan produktif, reproduktif dan sosial kemasyarakatan. Dalam hal ini masalah aktifitas, kontrol, akses, dan manfaat akan partisipasi perempuan dalam PHBM.

Selain itu, modal sosial yang ada dalam masyarakat juga mempengaruhi tingkat partisipasi dari perempuan untuk melakukan dan terlibat dari suatu program yang dijalankan. Modal sosial dalam lingkup pekerjaan perempuan apakah nantinya akan merubah keadaan perempuan dalam keterlibatannya dalam sebuah lembaga LKDPH maupun dalam program PHBM.



Skema 1. Kerangka Pemikiran : modal sosial dalam partisipasi perempuan pesanggem pada PHBM

Keterangan :  alur pemikiran

 Analisis

3.2 Hipotesis

Berdasarkan latar belakang dan tujuan penelitian maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

1. Diduga terdapat hubungan antara modal sosial masyarakat terhadap partisipasi perempuan pesanggem dalam program PHBM.

3.3 Definisi Operasional Dan Pengukuran Variabel

Tabel 1. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Modal Sosial

| Variabel | Definisi Operasional | Indikator | Kategori Pengukuran | Skor | |
|---------------------|--|-----------|---|---|---|
| Kepercayaan (Trust) | Pengharapan yang muncul dalam sebuah komunitas (sesama pesanggem, pengurus LKDPH, masyarakat bukan pesanggem) berupa sikap saling percaya, adanya transfer informasi, keterbukaan, sikap saling memotivasi dan adanya hubungan yang bersifat kooperatif berdasarkan norma yang dimiliki bersama, demi kepentingan seluruh komunitas. | 1 | Kepercayaan antara sesama pesanggem | Tinggi (saling percaya, adanya transfer informasi, adanya keterbukaan dalam memaparkan pendapat, saling memotivasi) | 3 |
| | | | | Sedang (saling percaya, adanya transfer informasi namun jarang, masih belum adanya keterbukaan antar sesama anggota, saling memotivasi) | 2 |
| | | | | Rendah (tidak saling percaya, tidak adanya transfer informasi, tidak adanya keterbukaan antara anggota, dan tidak ada sikap saling memotivasi) | 1 |
| | | 2 | Kepercayaan anggota terhadap pengurus LKDPH | Tinggi (saling percaya, adanya transfer informasi, adanya keterbukaan dalam memaparkan pendapat kepada pengurus, melaksanakan tugas sesuai intruksi) | 3 |

Tabel 2. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Modal Sosial (*lanjutan...*)

| Variabel | Definisi Operasional | Indikator | Kategori Pengukuran | Skor | |
|----------|----------------------|-----------|---|--|---|
| | | | Sedang (saling percaya, adanya transfer informasi namun jarang, masih belum adanya keterbukaan kepada pengurus, melakukan tugas belum sepenuhnya sesuai intruksi) | 2 | |
| | | | Rendah (tidak percaya, tidak adanya transfer informasi, tidak adanya keterbukaan kepada pengurus, tidak melakukan tugas sesuai dengan intruksi) | 1 | |
| | | 3 | Kepercayaan anggota dengan masyarakat sekitar non anggota (tengkulak dan lembaga pemasaran lain) | Tinggi (adanya transfer informasi, adanya ketebukaan dalam memaparkan pendapat) | 3 |
| | | | Sedang (adanya transfer informasi namun jarang, masih belum adanya keterbukaan antar masyarakat) | 2 | |
| | | | Rendah (tidak adanya transfer informasi, tidak adanya keterbukaan antar masyarakat) | 1 | |
| | | 4 | Tingkat kerjasama dalam kegiatan produktif | Tinggi | 3 |
| | | | | Sedang | 2 |
| | | | | Rendah | 1 |
| | | 5 | Tingkat kerjasama dalam kegiatan sosial (hajatan, kegiatan desa) | Tinggi | 3 |
| | | | | Sedang | 2 |
| | | | | Rendah | 1 |

Tabel 2. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Modal Sosial (*lanjutan...*)

| Variabel | Definisi Operasional | Indikator | Kategori Pengukuran | Skor | |
|--------------------------------------|--|-----------|---|---|---|
| Norma dan Nilai (Norm and Values) | Aturan yang berlaku berupa kesepakatan atau aturan dalam hubungan kemitraan dan hubungan sosial yang dijadikan pedoman dalam bertingkah laku. Aturan dapat berbentuk tertulis dan tidak tertulis meliputi norma dan peraturan didalam kelompok, masyarakat, dan pada gender. | 1 | Peraturan dibuat oleh kelompok | Ada dan berjalan | 3 |
| | | | | Ada tapi tidak berjalan | 2 |
| | | | | Tidak ada peraturan | 1 |
| | | 2 | Anggapan(persepsi) terhadap aturan-aturan dan norma yang mengatur hak dan kewajiban anggota | Semua peraturan menguntungkan bagi anggota | 3 |
| | | | | Sebagian menguntungkan sebagian merugikan | 2 |
| | | | | Merugikan | 1 |
| | | 3 | Pelaksanaan sanksi terhadap pelanggaran peraturan (norma) | Terdapat sanksi yang dijalankan oleh anggota | 3 |
| | | | | Terdapat sanksi namun tidak dijalankan oleh anggota | 2 |
| | | | | Tidak ada sanksi apapun | 1 |
| | | 4 | Pelaksanaan norma dan nilai yang ada di masyarakat | Ada dan dilaksanakan | 3 |
| | | | | Ada namun tidak dilaksanakan | 2 |
| | | | | Tidak ada | 1 |
| | | 5 | Anggapan terhadap wanita bekerja di sektor publik | Baik | 3 |
| | | | | Tidak baik | 2 |
| | | | | Sangat tidak baik | 1 |
| | | 6 | Anggapan wanita memperoleh pengetahuan | Penting | 3 |
| | | | | Tidak penting | 2 |
| | | | | Sangat tidak penting | 1 |

Tabel 2. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Modal Sosial (*lanjutan...*)

| Variabel | Definisi Operasional | Indikator | Kategori Pengukuran | Skor | |
|--------------------|--|-----------|--|---|---|
| | | 7 | Anggapan wanita menduduki jabatan penting | Baik | 3 |
| | | | | Tidak baik | 2 |
| | | | | Sangat tidak baik | 1 |
| | | 8 | Anggapan wanita bersekolah hingga jenjang yang tinggi | Baik | 3 |
| | | | | Tidak baik | 2 |
| | | | | Sangat tidak baik | 1 |
| Jaringan (Network) | jaringan yang memfasilitasi terjadinya komunikasi, interaksi dan relasi pada program PHBM. Fasilitas dalam jaringan berupa tingkat pengenalan atau mengetahui pihak yang terlibat pada PHBM dan dukungan yang terjadi antara pesanggem dengan perhutani, LKDPH, aparat desa dan lembaga-lembaga yang ada didalam desa. | 1 | Mengetahui pihak perhutani | Mengetahui seluruhnya | 3 |
| | | | | Mengetahui sebagian | 2 |
| | | | | Tidak mengetahui | 1 |
| | | 2 | Mengetahui pihak LKDPH | Mengetahui seluruhnya | 3 |
| | | | | Mengetahui sebagian | 2 |
| | | | | Tidak mengetahui | 1 |
| | | 3 | Dukungan dari aparat dalam desa | Adanya dukungan dari aparat desa dan pemimpin informal dalam desa | 3 |
| | | | | Adanya dukungan dari aparat desa dan pemimpin informal dalam satu desa namun belum sepenuhnya | 2 |
| | | | | Tidak ada dukungan | 1 |
| | | 4 | Dukungan dan kerjasama kegiatan dengan lembaga-lembaga yang ada di desa (PKK, Karang taruna dll) | ada kerjasama dengan lembaga | 3 |
| | | | | ada kerjasama sedang dirintis | 2 |
| | | | | tidak ada kerjasama | 1 |
| Skor Maksimal | | | | 51 | |
| Skor Mminimal | | | | 17 | |

Tabel 2. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Tingkat Partisipasi

| Variabel | Definisi Operasional | Indikator | Kategori Pengukuran | Skor |
|---|--|--|---|------|
| Tingkat partisipasi pesanggem pada tahap perencanaan program PHBM | Keterlibatan pesanggem dalam perencanaan program PHBM meliputi kehadiran dalam rapat, keterbukaan dan keberanian dalam pemberian saran, ikut mengusulkan pendapat pada kegiatan negosiasi dan terlibat pada proses perjanjian dalam program PHBM | 1 Kehadiran anggota pesanggem dalam rapat perencanaan (penyuluhan dan sosialisasi) PHBM | 3-4 kali kehadiran | 3 |
| | | | 1-2 kehadiran | 2 |
| | | | Tidak pernah hadir | 1 |
| | | 2 Keikutsetaan anggota pesanggem dalam pemberian saran | Anggota ikut serta aktif dalam penyampaian pendapat/usulan | 3 |
| | | | Anggota jarang/hanya ikut-ikutan dalam penyampaian pendapat | 2 |
| | | | Tidak pernah menyampaikan pendapat | 1 |
| | | 3 Keikutsertaan dalam negosiasi, meliputi : 1. Penentuan jenis tanaman 2. Penentuan luas dan pembagian lahan andil 3. Penentuan Lokasi PHBM (lahan, kantor sekretariat, tempat rapat) 4. Penentuan pola tanam | Ikut serta 3-4 kegiatan | 3 |
| | | | Ikut 1-2 kegiatan | 2 |
| | | | Tidak pernah ikut | 1 |
| | | 4 Keikutsertaan dalam perjanjian, meliputi : 1. Penentuan jangka waktu kontrak 2. Penandatanganan/persetujuan kontrak | Ikut 2 kegiatan | 3 |
| | | | Ikut 1 kegiatan | 2 |
| | | | Tidak pernah ikut | 1 |

Tabel 3. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Tingkat Partisipasi (lanjutan...)

| Variabel | Definisi Operasional | Indikator | Kategori Pengukuran | Skor | |
|---|--|--|--|---------------------------|---|
| Tingkat partisipasi pesanggem pada tahap pelaksanaan program PHBM | Keteterlibatan pesanggem dalam kegiatan pelaksanaan program PHBM didalam kelompok dan dilapangan. Keterlibatan pesanggem dalam kelompok yakni pada kehadiran rapat rutin sedangkan keterlibatan pesanggem dilapangan yakni pada kegiatan usaha tani meliputi : pengolahan lahan, penanaman, perawatan, panen dan pasca panen hingga tanggung jawab atas kelestarian hutan | 1 Kehadiran anggota pesanggem dalam pertemuan rutin yang diselenggarakan LKDPH | 2 kali kehadiran | 3 | |
| | | | 1 kali kehadiran | 2 | |
| | | | Tidak pernah hadir | 1 | |
| | | 2 Kegiatan persiapan lahan | Ikut 3-4 kegiatan | 3 | |
| | | | 1. Pembuatan larikan | Ikut 1-2 kegiatan | 2 |
| | | | 2. Pembuatan Lubang tanam | Tidak ikut semua kegiatan | 1 |
| | | | 3. Pembuatan ajir | | |
| | | 4. Pemeliharaan tanaman pokok | | | |
| | | | 3 Kegiatan perawatan tanaman, meliputi : 1. Penanaman 2. Penyulaman 3. Penyiangan 4. Pemupukan | Ikut 3-4 kegiatan | 3 |
| | | | | Ikut 1-2 kegiatan | 2 |
| | | | | Tidak ikut semua kegiatan | 1 |
| | | | | | |
| | | 4 Kegiatan pemanenan dan pasca panen 1. Panen 2. Pengangkutan 3. Penjemuran 4. Pengolahan | Ikut 3-4 kegiatan | 3 | |
| | | | Ikut 1-2 kegiatan | 2 | |
| | | | Tidak ikut semua kegiatan | 1 | |
| | | | | | |
| | | 5 Kegiatan pengamanan hutan dan penjagaan kelestarian hutan 1. Reboisasi 2. Pencegahan kebakaran 3. Pencegahan pencurian kayu | Ikut 3-4 kegiatan | 3 | |
| | | | Ikut 1-2 kegiatan | 2 | |
| | | | Tidak ikut semua kegiatan | 1 | |
| | | | | | |

Tabel 3. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Tingkat Partisipasi (lanjutan...)

| Variabel | Definisi Operasional | Indikator | | Kategori Pengukuran | Skor | | |
|--|---|---|--|---------------------|--|---------------------------------|---|
| Tingkat partisipasi pesanggem dalam tahap pemanfaatan program PHBM | Keterlibatan pesanggem dalam menikmati hasil dan manfaat berupa hasil hutan dan ilmu pengetahuan yang didapat dari mengikuti program PHBM | 1 | Pemanfaatan sumber daya hutan | 3 pemanfaatan | 3 | | |
| | | | 1. pemanfaatan tanaman utama (kopi) | 2 pemanfaatan | 2 | | |
| | | | 2. pemanfaatan tanaman anjuran (cengkeh, durian) | 1 pemanfaatan | 1 | | |
| | | 2 | Pengetahuan tentang hutan dari penyuluhan dan pelatihan program PHBM | 3 | 3. pemanfaatan sumberdaya hutan lain | | |
| | | | | | Memperoleh banyak pengetahuan | 3 | |
| | | | | | Mengetahui sedikit pengetahuan | 2 | |
| | | 3 | Pengembangan usaha | | Tidak mendapat pengetahuan | 1 | |
| | | | | | Adanya pengembangan usaha yang sudah berjalan | 3 | |
| | | | | | Adanya pengembangan usaha namun masih tahap merintis | 2 | |
| | | Tingkat partisipasi pesanggem dalam tahap monitoring dan evaluasi | Keterlibatan pesanggem dalam mengawasi dan menilai kelestarian hutan meliputi kegiatan rapat, pelaporan keadaan tanaman tegakan beserta tanaman utama dan penyampaian kendala dilapang | 1 | Kehadiran pertemuan rutin dalam rapat evaluasi | Tidak adanya pengembangan usaha | 1 |
| 2 kali kehadiran | 3 | | | | | | |
| 1 kali kehadiran | 2 | | | | | | |
| 2 | Pelaporan kegiatan | | | | Tidak pernah hadir | 1 | |
| | | | | | Melakukan pelaporan tiap waktu yang disepakati | 3 | |
| | | | | | Melakukan pelaporan tetapi tidak kontinyu | 2 | |
| | | | | | Tidak pernah melakukan pelaporan | 1 | |
| | | | | | | | |

Tabel 3. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Tingkat Partisipasi (*lanjutan...*)

| Variabel | Definisi Operasional | Indikator | | Kategori Pengukuran | Skor | |
|---------------|----------------------|-----------|-------------------------------|---|---|---|
| | | 3 | Penyampaian kendala di lapang | Aktif mengemukakan kendala yang terjadi di lapang | 3 | |
| | | | | | Kurang aktif dalam penyampaian kendala yang terjadi di lapang | 2 |
| | | | | | Tidak pernah mengemukakan kendala yang ada dilapang | 1 |
| Skor Maksimal | | | | | 42 | |
| Skor Minimal | | | | | 14 | |

Tingkatan variabel modal sosial dan partisipasi diukur menggunakan metode skoring menggunakan pengukuran skala likert. Skala likert yang digunakan ialah tiga tingkatan yaitu 1,2 dan 3. Skala tersebut digunakan untuk menunjukkan tingkat variabel pada modal sosial dan partisipasi termasuk dalam kategori tinggi, sedang ataupun rendah. Berikut adalah pengukuran variabel berdasarkan skor :

Skor 1 = Rendah

Skor 2 = Sedang

Skor 3 = Tinggi

IV. METODE PENELITIAN

4.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *mix methods*, pendekatan kuantitatif untuk membahas tingkat modal sosial, partisipasi dan hubungan antara partisipasi dan modal sosial, sedangkan pendekatan kualitatif untuk menjelaskan analisis gender harvard pada partisipasi perempuan pada program PHBM. Jenis penelitian yang dilakukan ialah penelitian penjelas (*explanatory research*), dimana penelitian ini mengukur hubungan variabel-variabel dan kemudian menguji hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya. Menurut Singarimbun dan Efendy (1995) *explanatory research* merupakan tipe penelitian yang menguji hubungan variabel-variabel dan menguji hipotesis dengan alat statistika. Pada penelitian ini akan menguji hubungan variabel modal sosial terhadap tingkat partisipasi perempuan dalam program PHBM.

4.2 Penentuan Lokasi dan Waktu Penelitian

Penentuan lokasi yang akan dilakukan secara *purposive* atau sengaja yaitu terletak pada Desa Tambakasri Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang. Penelitian telah dilakukan pada bulan Februari sampai dengan Maret 2018. Tempat penelitian dipilih karena berbagai alasan yaitu :

1. Tempat penelitian termasuk kawasan penduduk hutan yang hidup dan tinggal di sekitar hutan milik perhutani
2. Terdapat program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) yang aktif dijalankan oleh masyarakat setempat
3. Terdapat Lembaga Kemitraan Desa Pengelola Hutan (LKDPH) sebagai lembaga yang menjalankan program PHBM
4. Mayoritas perempuan di daerah Desa Tambakasri melakukan sebagian besar pekerjaannya di hutan dan juga ikut melaksanakan program PHBM

4.3 Teknik Penentuan Responden

Terdapat dua subjek dalam penelitian ini yaitu responden dan informan. Responden adalah seseorang atau individu yang dapat memberikan informasi mengenai dirinya sendiri terkait kondisi dirinya dengan program PHBM. Populasi

didefinisikan sebagai jumlah keseluruhan unit analisa yang ciri-cirinya akan diduga (Sugiyono, 2015). Populasi yang dimaksud ialah perempuan dalam rumah tangga petani Dusun Sidorejo Desa Tambakasri yang mengelola lahan hutan dan mempunyai lahan dari perhutani sebanyak 173 rumah tangga.

Sampel yang dipilih sebanyak 33 responden menggunakan rumus slovin dan 3 responden sebagai cadangan. Pemilihan responden dilakukan dengan teknik pengambilan *simple random sampling*. Teknik tersebut dipilih karena dalam setiap pelaksanaannya, program PHBM hanya memperbolehkan rumah tangga anggota LKDPH saja yang dapat mengikuti program PHBM.

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan :

- n : jumlah sampel
 N : jumlah populasi
 e : batas toleransi kesalahan

$$\frac{173}{1 + (173 \times 0,0225)} = 32,9$$

Informan merupakan seseorang atau individu yang dapat menjelaskan dan memberikan keterangan berupa gambaran mengenai dirinya sendiri, keluarga, pihak lain dan lingkungannya terkait kondisi dan perkembangan Program PHBM. Informan juga dapat dikatakan sebagai pihak yang mampu mendukung kelancaran informasi yang diberikan. Banyaknya informan di sini tidak dibatasi, akan tetapi informan tersebut sudah dapat memberikan informasi yang relevan dan dapat membantu peneliti dalam menjawab perumusan masalah dalam penelitian ini. Penetapan informan dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive* kepada ketua dan pengurus LKDPH dan instansi yang terkait yang mengetahui jelas berjalannya program PHBM.

4.4 Teknik Pengumpulan Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Pengumpulan data primer didapatkan secara langsung dari responden melalui wawancara. Sedangkan data sekunder diperoleh dari laporan, data

pendukung yang ada dalam monografi desa dan materi lain yang dapat mendukung penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan antara lain:

a. Wawancara terstruktur

Teknik wawancara dilakukan dengan memberikan beberapa pertanyaan kepada responden sesuai dengan pertanyaan yang ada pada kuisioner sebagai pedoman dalam penggalian data kepada petani sehingga pertanyaan yang diajukan dapat tersusun secara struktur.

b. Wawancara Mendalam

Peneliti melakukan teknik ini untuk mencari informasi lebih mendalam tentang permasalahan yang akan dibahas. Peneliti akan melakukan wawancara mendalam dengan informan dan aktor terkait yang dirasa mampu memberikan informasi mengenai masalah dan topik penelitian. Diharapkan informan bisa memberikan informasi dengan bebas dan tidak terbatas sehingga akan muncul pandangan dan opini dari informan sesuai dengan kondisi lapang yang ada.

c. Observasi

Peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap obyek penelitian yang diamati yakni pesanggem perempuan yang melakukan kegiatan PHBM kemudian mencatat informasi yang diperoleh selama melakukan pengamatan di lapang. Observasi lain yaitu mengamati keseharian pesanggem dengan cara menginap di rumah pesanggem untuk mengetahui keseharian pesanggem dalam melaksanakan aktifitas keseharian dirumah. Pengamatan tidak hanya dilakukan didalam rumah peneliti juga mengamati aktifitas perempuan pesanggem di lahan perhutani dalam melakukan aktifitas ekonomi berupa usaha tani kopi dan cengkeh.

Pengamatan selanjutnya berupa pengamatan interaksi antar pesanggem dan pada LKDPH. Pengamatan ini berupa pengamatan interaksi yang terjalin antara pesanggem dengan pesanggem hingga antara pesanggem dengan pihak LKDPH dan perhutani dalam menjalankan sistem PHBM dan penjagaan hutan . Pengamatan interaksi lain berupa pengamatan masyarakat dalam kegiatan-kegiatan sosial yang ada di Desa Tambakasri. Yang terakhir observasi dilakukan untuk mengetahui jenis lahan perhutani dan sarana-sarana penunjang bagi pertanian kopi dan cengkeh di Desa Tambakasri.

d. Dokumentasi

Pengambilan data sekunder dilakukan dengan teknik dokumentasi. Data yang diambil berupa informasi pendukung. Informasi pendukung berupa laporan, data monografi desa, dan data aktivitas pelaksanaan PHBM di Desa Tambakasri

4.5 Validitas dan Realibilitas data

Untuk mendapatkan skala pengukuran atau instrument yang baik, harus memiliki validitas dan reliabilitas instrument yang akan digunakan dalam penelitian tersebut. Validitas adalah sejauh mana instrument penelitian mengukur dengan tepat konstruk variabel yang diteliti. Valid berarti instrument tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur (Sugiyono, 2009).

Untuk menguji validitas instrument yang digunakan penelitian, peneliti harus menggunakan nilai practical significance. Untuk menguji apakah instrumen yang digunakan valid atau tidak yaitu dengan korelasi produk momen pearson. Cara analisisnya adalah mengkorelasikan antara masing- masing nilai pada nomor pertanyaan dengan nilai total dari nomor pertanyaan tersebut. Selanjutnya koefisien korelasi yang diperoleh R masih harus diuji signifikansinya dengan membandingkannya dengan tabel R. Butir pertanyaan dikatakan valid jika nilai R hitung > R tabel atau nilai $p < 0,05$.

Untuk mendapatkan skala pengukuran instrument yang baik, harus dilakukan pengujian reliabilitas yang akan digunakan dalam penelitian. Untuk menentukan nilai reliabilitas yaitu membandingkan nilai Alpha Cronbach dengan nilai R tabel produk momen pearson. Apabila nilai Alpha Cronbach lebih besar daripada nilai R tabel produk momen pearson maka instrument tersebut reliabel. Untuk mengukur reliabilitas digunakan program SPSS 16

1.5 Teknik Analisis Data

1.5.1 Analisis Gender

Model analisis gender yang digunakan adalah Analisi Model Harvard atau kerangka Harvard. Model Harvard digunakan untuk melihat ada atau tidaknya perlakuan kesetaraan dan kemitraan antara laki-laki dan perempuan. Dalam penelitian ini Model Harvard digunakan untuk memetakan peranan perempuan

tani di kawasan hutan dalam pengelolaan lingkungan dan keterlibatan dalam PHBM. Analisis gender ini meliputi empat komponen antara lain, yaitu: (1) profil aktifitas; (2) profil akses; (3) profil kontrol; (4) dampak kegiatan dan faktor yang mempengaruhinya (Handayani dan Sugiarti, 2008).

4.5.2 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif merupakan statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sudjana, 2000). Analisis statistik deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode skoring dengan skala *likert* untuk menentukan tingkat partisipasi petani dan tingkat modal sosial. Pengukuran tingkat partisipasi perempuan dalam program PHBM beberapa tahap sesuai dengan rumus dari Sudjana (2000).

1. Menentukan jumlah kelas

Jumlah kelas dalam penelitian ini dibedakan menjadi tiga yaitu kategori tinggi, kategori sedang, dan kategori rendah

2. Menentukan kisaran

Kisaran merupakan selisih nilai pengamatan tertinggi dengan nilai pengamatan terendah.

$$R = X_t - X_r$$

Dimana

R = kisaran

X_t = Nilai pengamatan tertinggi

X_r = Nilai pengamatan terendah

Maka nilai kisaran yang diperoleh yaitu:

$$R = 42 - 14$$

$$R = 28$$

3. Menentukan Interval Kelas

$$I = \frac{R}{K}$$

Dimana

I = Interval Kelas

R = Kisaran

K = Kelas

Maka selang kelas variabel tingkat partisipasi adalah

$I = 28/3$

$I = 9,33$

Berdasarkan keterangan tersebut, didapatkan kisaran dari masing-masing kategori kelas. Kategori tingkat partisipasi rendah yaitu skor minimal tingkat partisipasi (1) hingga nilai minimal partisipasi ditambah nilai interval kelas ($14+9,33 = 23,33$). Kategori kelas sedang apabila mendapatkan skor diatas batas tertinggi kategori kelas rendah ($>18,33$) hingga batas atas nilai kategori rendah ditambah interval kelas ($23,33+9,33=32,66$). Kategori tinggi apabila skor yang didapatkan lebih tinggi dari batas atas kategori rendah ($>32,66$) hingga batas maksimal skor (42). Pengukuran tingkat partisipasi dapat dilihat pada Tabel 4 di bawah ini.

Tabel 1. Kategori tingkat partisipasi pada program PHBM

| No. | Kategori | Skor | Presentase (%) |
|-----|----------|----------------------|----------------------|
| 1. | Tinggi | $\geq 32,67 - 42,00$ | $> 77,76 - 100,0$ |
| 2. | Sedang | $\geq 23,34 - 32,66$ | $> 55,55 - 77,76$ |
| 3. | Rendah | $\geq 14,00 - 23,33$ | $\geq 33,33 - 55,55$ |

Pengukuran tingkat modal sosial dapat dilihat pada tabel 5. Pengukuran tingkat partisipasi dan modal sosial per indikator dapat diketahui dari tabel 6. Sehingga skor rata-rata pada pembahasan bisa dikategorikan dengan acuan tabel di bawah ini :

Tabel 2. Kategori tingkat modal sosial pada program PHBM

| No. | Kategori | Skor | Presentase (%) |
|-----|----------|----------------------|----------------------|
| 1. | Tinggi | $\geq 39,67 - 51,00$ | $> 77,76 - 100,0$ |
| 2. | Sedang | $\geq 28,34 - 39,66$ | $> 55,55 - 77,76$ |
| 3. | Rendah | $\geq 17,00 - 28,33$ | $\geq 33,33 - 55,55$ |

Tabel 3. Kategori tingkat partisipasi dan modal sosial per indikator

| No. | Kategori | Skor | Presentase (%) |
|-----|----------|------------------|----------------------|
| 1. | Tinggi | $\geq 2,4 - 3,0$ | $> 77,76 - 100,0$ |
| 2. | Sedang | $\geq 1,7 - 2,3$ | $> 55,55 - 77,76$ |
| 3. | Rendah | $\geq 1,0 - 1,6$ | $\geq 33,33 - 55,55$ |

4.5.4 Analisis Korelasi *Rank Spearman*

Analisis hubungan antara Tingkat modal sosial terhadap tingkat partisipasi perempuan pada program PHBM menggunakan metode korelasi *rank spearman*. Metode korelasi *rankspearman* digunakan untuk mengetahui korelasi antara Tingkat modal sosial masyarakat dan tingkat partisipasi perempuan terhadap dampak program PHBM. Persamaan yang digunakan untuk menghitung nilai korelasi *rank spearman* menurut Sugiyono (2003).

$$r_s = 1 - \frac{6 \sum_{i=1}^N d_i^2}{N^3 - N}$$

Keterangan:

- r_s = Koefisien korelasi *rank spearman*
 d_i^2 = Disparitas (simpangan atau selisih ranking)
 N = Jumlah sampel

$$\sum_{i=1}^n bi^2 = \text{penjumlahan } (X - Y)^2$$

Keterangan

- n = jumlah responden
 6 = harga konstan

Untuk menentukan tingkat signifikansi, maka digunakan rumus:

$$t = \rho \sqrt{\frac{n-2}{1-\rho^2}}$$

Keterangan:

- t = tingkat signifikansi

Tabel 4. Kriteria korelasi

| Interval Koefisien Korelasi | Kriteria Korelasi |
|-----------------------------|-------------------|
| 0,80 – 1,00 | Sangat tinggi |
| 0,60 – 0,79 | Tinggi |
| 0,40 – 0,59 | Moderat |
| 0,20 – 0,39 | Rendah |
| >0,01 – 0,19 | Sangat rendah |

(Sumber: Darmawan, 2014)

4.6 Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan untuk mengetahui tingkat signifikansi dan hubungan antara modal sosial dan partisipasi perempuan pesanggem pada PHBM dilakukan dengan uji *rank spearman*. Diterima atau tidaknya hipotesis yang dibuat ditentukan dengan taraf signifikansi. Pengujian hipotesis yang dapat dilakukan ialah:

Hipotesis Pertama

H_0 : $\text{sig} > 0,05$, tidak terdapat hubungan antara modal sosial terhadap partisipasi perempuan dalam PHBM

H_1 : $\text{sig} < 0,05$,terdapat hubungan antara modal sosial terhadap partisipasi perempuan dalam PHBM



V. HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Gambaran Umum

5.1.1 Kondisi Geografis

Secara administratif Desa Tambakasri terletak di wilayah Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Desa Tambakasri berada di ujung tenggara Kecamatan Sumbermanjing Wetan. Desa ini terbagi menjadi 5 Dusun, 3 wilayah RW dan 52 wilayah RT. Desa Tambakasri merupakan desa yang menghasilkan produk perkebunan dengan kondisi tersebut dapat dilihat dari tataguna lahan yang merupakan lahan perkebunan, hal ini ditunjang dari lahan yang subur dan pengairan yang tercukupi. Pusat pemerintahan desa dan pendidikan Desa Tambakasri terletak di Dusun Sidomulyo, selain pusat pemerintahan dan juga pendidikan di Dusun Sidomulyo juga menjadi pusat perekonomian masyarakat dengan didirikannya pasar rakyat di wilayah tersebut.



Gambar 1. Peta Desa Tambakasri, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang

Batas-batas wilayah Desa Tambakasri dibatasi oleh wilayah berikut :

1. Sebelah Utara : Desa Tegalrejo
2. Sebelah Timur : Desa Sukodono
3. Sebelah Selatan : Desa Sidoasri / Samudra Hindia
4. Sebelah Barat : Desa Kedungbanteng

Luas keseluruhan Desa Tambakasri 2.163,41 Ha yang terdiri areal sawah 11,00 Ha, tegal atau ladang 772,00 Ha, Pemukiman 71,50 Ha, fasilitas umum 8,72 Ha, dan sisanya merupakan areal hutan 1,300,16 Ha. Wilayah hutan dibagi menjadi 3 bagian yaitu areal hutan lindung seluas 975,04 Ha dan sisanya merupakan hutan produksi yaitu seluas 325,12 Ha. Desa Tambakasri memiliki curah hujan 1.900 mm/tahun, kemiringan tanah 15 derajat, jenis tanah lempungan dan terletak pada wilayah dataran sedang dengan ketinggian 410 meter di atas permukaan laut. Dengan kondisi iklim, tanah dan topografi tersebut, menjadikan tanaman kopi, cengkeh, durian dan manggis menjadi komoditas utama di Desa Tambakasri. Komoditas kopi dan cengkeh menjadi komoditas andalan Desa Tambakasri. Potensi lahan hutan dan keadaan geografis yang dimiliki Desa Tambakasri, menjadi pertimbangan perhutani sebagai desa yang penting untuk dijaga kelestarian hutannya melalui program PHBM.

5.1.2 Jumlah Penduduk

Tabel 1. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

| No | Jenis Kelamin | Jumlah (orang) | Persentase(%) |
|--------------|---------------|----------------|---------------|
| 1 | Laki-laki | 4904 | 49,16 % |
| 2 | Perempuan | 5072 | 50,84 % |
| Total | | 9976 | 100% |

Sumber: Data Monografi Desa Tambakasri, 2017

Seperti terlihat dalam tabel di atas, tercatat jumlah total penduduk Desa Tambakasri 9.976 jiwa terdiri dari laki-laki 4.904 jiwa atau 49,16% dari total jumlah penduduk, sedangkan perempuan 5.072 jiwa atau 50,84% dari total jumlah penduduk. Jumlah penduduk di wilayah Desa Tambakasri cukup berimbang jika dilihat dari persentase jumlah laki-laki dan perempuan. Persentase perempuan sebesar 50,84% lebih banyak daripada jumlah laki-laki, sehingga pada program

PHBM perempuan juga berpotensi untuk ikut terlibat dalam partisipasi PHBM di wilayah Desa Tambakasri.

Dari data sekunder dapat diketahui proporsi jumlah penduduk yang berdiam di wilayah tingkat kampung maupun dusun sebagai berikut :

1. Dusun Sidomulyo, proporsi jumlah penduduk yang berdiam di wilayah tersebut sebanyak 2.554 jiwa atau 26,11% dari total populasi penduduk desa.
2. Dusun Dusun Sidorejo, proporsi jumlah penduduk yang berdiam di wilayah tersebut sebanyak 1.948 jiwa atau 19,90% dari total populasi penduduk desa.
3. Dusun Sidomakmur, proporsi jumlah penduduk yang berdiam di wilayah tersebut sebanyak 1.394 jiwa atau 14,25% dari total populasi penduduk desa.
4. Dusun Sumberkembang, proporsi jumlah penduduk yang berdiam di wilayah tersebut sebanyak 1.533 jiwa atau 15,67% dari total populasi penduduk desa.
5. Dusun Sumbersekar, proporsi jumlah penduduk yang berdiam di wilayah tersebut sebanyak 2.352 jiwa atau 24,07% dari total populasi penduduk desa.

Tabel 2. Sebaran usia penduduk menurut kelompok usia

| No. | Kelompok Usia | Lak-laki (orang) | Perempuan (orang) | Jumlah (orang) | Persentase(%) |
|--------------|---------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------|
| 1 | 0-4 | 488 | 466 | 954 | 9.56 |
| 2 | 5-9 | 482 | 477 | 959 | 9.61 |
| 3 | 10-14 | 467 | 466 | 933 | 9.35 |
| 4 | 15-19 | 425 | 434 | 859 | 8.61 |
| 5 | 20-24 | 401 | 424 | 825 | 8.27 |
| 6 | 25-29 | 302 | 541 | 843 | 8.45 |
| 7 | 30-34 | 501 | 418 | 919 | 9.21 |
| 8 | 35-39 | 386 | 387 | 773 | 7.75 |
| 9 | 40-44 | 360 | 348 | 708 | 7.10 |
| 10 | 45-49 | 310 | 296 | 606 | 6.07 |
| 11 | 50-54 | 210 | 241 | 451 | 4.52 |
| 12 | 55-59 | 210 | 170 | 380 | 3.81 |
| 13 | >60 tahun | 362 | 406 | 768 | 7.70 |
| Total | | 4904 | 5074 | 9978 | 100% |

Sumber: Data Monografi Desa Tambakasri, 2017

Dari total penduduk Desa Tambakasri, dapat dikategorikan kelompok rentan dari sisi kesehatan berdasarkan usia seseorang. Usia yang dapat dikategorikan sebagai usia rentan adalah usia diatas 60 tahun. Jumlah penduduk usia rentan sebanyak 768 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 362 jiwa dan perempuan sebanyak 406 jiwa. Jumlah tersebut terhitung 7,7% dari total jumlah

penduduk. Penduduk usia produktif pada usia antara 15-65 tahun (BPS,2018). Di Desa Tambakasri jumlahnya cukup signifikan, yaitu 4674 jiwa atau 46,84% dari total jumlah penduduk.

Diketahui usia produktif perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Dengan demikian, perempuan usia produktif di Desa Tambakasri sebenarnya dapat menjadi tenaga produktif yang cukup signifikan untuk mengembangkan usaha-usaha produktif perempuan itu sendiri maupun membantu usaha produktif laki-laki. Banyaknya penduduk perempuan pada usia produktif, membuat perempuan juga terlibat pada aktifitas produktif laki-laki lahan hutan. Aktifitas di lahan tersebut sebagai bentuk ikut serta masyarakat dalam program PHBM.

Program PHBM diharapkan semakin menguatkan masyarakat secara ekonomi dan solidaritas. Terutama perempuan yang semakin aktif dan giat dalam mengikuti PHBM sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat untuk lebih mandiri dalam mengelola hutan sebagai usaha produktif masyarakat Desa Tambakasri. Pemberdayaan usaha produktif perempuan diharapkan semakin memperkuat ekonomi masyarakat, karena sementara ini masih bertumpu kepada usaha produktif dari pihak laki-laki. Usaha produktif perempuan yang sudah berjalan yaitu usaha kripik pisang asli Tambakasri yang merupakan binaan dari karang taruna Desa Tambakasri. Dengan adanya usaha kripik pisang menjadi sumber pendapatan tambahan perempuan. Usaha produktif yang sudah berjalan tersebut semakin menunjukkan bahwa pemberdayaan untuk perempuan sebenarnya juga penting untuk dilakukan karena perempuan merupakan SDM potensial untuk menunjang perekonomian keluarga. Tetapi pada kenyataannya belum banyak pemberdayaan yang dilakukan untuk perempuan.

5.1.3. Mata pencaharian

Dari data monografi desa dapat diketahui bahwa mayoritas mata pencaharian penduduk di dominasi dari sektor pertanian. Sektor pertanian menyumbang sebanyak 43,12% dari total seluruh mata pencaharian penduduk. Petani mengolah lahan sendiri berupa lahan tegal atau ladang dan juga lahan milik negara yaitu hutan melalui program PHBM. Potensi hutan berupa lahan untuk usaha tani di Desa Tambakasri cukup luas maka banyak dari penduduk yang menjadi petani maupun menjadi penggarap lahan hutan perhutani yang biasa disebut sebagai "*pesanggem*".

Tabel 3. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

| No | Jenis mata pencaharian | Jumlah (orang) | Persentase(%) |
|--------------|----------------------------|----------------|---------------|
| 1 | Petani | 1230 | 33.62 |
| 2 | Buruh tani | 351 | 9.60 |
| 3 | Pekebun | 82 | 2.24 |
| 4 | Industri kecil | 298 | 8.15 |
| 5 | Karyawan Swasta | 156 | 4.26 |
| 6 | Pedagang | 330 | 9.02 |
| 7 | Pemilik usaha transportasi | 104 | 2.84 |
| 8 | Buruh jasa transportasi | 105 | 2.87 |
| 9 | Warung, rumah makan, resto | 105 | 2.87 |
| 10 | PNS | 25 | 0.68 |
| 11 | Polri | 1 | 0.03 |
| 12 | TNI | 1 | 0.03 |
| 13 | Guru | 77 | 2.10 |
| 14 | Sopir | 120 | 3.28 |
| 15 | Buruh migran | 218 | 5.96 |
| 16 | Wiraswasta | 386 | 10.55 |
| 18 | Penyewaan alat pesta | 10 | 0.27 |
| 19 | Lain-lain | 59 | 1.61 |
| Total | | 3658 | 100 |

Sumber: Data Monografi Desa Tambakasri, 2017

Selain mayoritas sebagai petani, mata pencaharian masyarakat lain di dominasi sebagai pedagang hasil bumi. Banyaknya pedagang di Desa Tambakasri mencapai 330 jiwa atau 9,02% dari total jumlah penduduk. Hal ini dikarenakan karena hasil bumi yang melimpah atas luas lahan tanam yang dimiliki oleh penduduk desa maupun lahan perhutani yang dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan ekonomi. Hasil bumi yang banyak di jadikan barang dagang oleh masyarakat adalah “*krambil*” atau kelapa, kopi, cengkeh dan minyak daun cengkeh, juga pisang dan tanaman dibawah tegakan lain. Selanjutnya pekebun mencapai 2,2%, industri kecil sebanyak 8,15% dan lainnya seperti tabel di atas.

5.1.4 Pendidikan

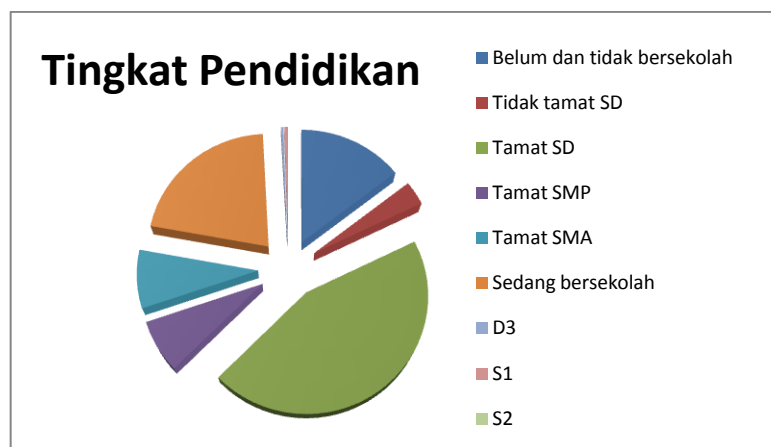
Komposisi penduduk menurut tingkat pendidikan menggambarkan tingkat kemajuan wilayah dalam pembangunan terutama terkait dengan kualitas sumberdaya manusia. Dari data monografi Desa Tambakasri dengan jumlah 9971 jiwa. Tercatat 14,53% belum bersekolah dan tidak bersekolah, 3,31% penduduk tidak tamat Sekolah Dasar, 44,70% hanya tamatan Sekolah Dasar, 7,25% tamatan Sekolah Menengah Pertama, 8,07% tamatan SMA, dan hanya 1% yang mengenyam pendidikan di Perguruan Tinggi. Kondisi pendidikan yang relatif rendah tersebut mengakibatkan rendahnya kualitas sumberdaya manusia di Desa Tambakasri

Tabel 4. Tingkat Pendidikan

| No | Tingkat Pendidikan | Jumlah(orang) | Persentase(%) |
|---------------|--------------------------------|---------------|---------------|
| 1 | belum dan tidak bersekolah | 1449 | 14.53 |
| 2 | Tidak tamat SD | 330 | 3.31 |
| 3 | Tamat SD | 4457 | 44.70 |
| 4 | Tamat SMP | 723 | 7.25 |
| 5 | Tamat SMA | 805 | 8.07 |
| 6 | Usia 7-18 th sedang bersekolah | 2122 | 21.28 |
| 7 | D3 | 35 | 0.35 |
| 8 | S1 | 49 | 0.49 |
| 9 | S2 | 1 | 0.01 |
| Jumlah | | 9971 | 100 |

Sumber: Data Monografi Desa Tambakasri, 2017

Tingkat pendidikan yang relatif rendah yaitu sampai tamatan Sekolah Dasar mengakibatkan sebagian besar penduduk memilih bekerja sebagai petani. Akses yang kurang memadai dan kurangnya kemampuan untuk melakukan usaha lain menjadikan sektor pertanian jadi sektor mata pencaharian terbesar atau utama penduduk Desa Tambakasri. Terlebih lagi sektor pertaniannya ditunjang dengan lahan hutan yang luas yang dapat dimanfaatkan secara langsung oleh masyarakat Desa Tambakasri.



Gambar 2. Tingkat Pendidikan

5.1.5 Sarana Prasarana

Sarana dan prasarana yang terdapat di Desa Tambakasri dibedakan berdasarkan transportasi, komunikasi dan informasi, air bersih, sanitasi, irigasi, pemerintahan, lembaga kemasyarakatan Desa, olahraga, peribadatan, pendidikan, energi penerangan, hiburan wisata dan kebersihan. Sarana transportasi di Desa Tambakasri berupa jalan aspal desa sepanjang 11,9 Km dalam keadaan baik dan 2 Km dalam kondisi yang rusak. Adanya jalan aspal tersebut semakin mempermudah akses masyarakat dalam melaksanakan aktifitas produktif bertani. Bagi masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada hutan khususnya petani jalan aspal akan mempermudah menuju lahan tetelan. Penduduk Desa Tambakasri mayoritas sudah memiliki transportasi pribadi berupa sepeda motor maupun mobil untuk aktivitas transportasi pribadi.

Sarana prasarana air bersih terdapat sumur gali sebanyak 184 unit, tangki air bersih 2 unit, dan sumber mata air sebanyak 34 unit. Banyaknya sumber mata air membuat akses penduduk terhadap air bersih tercukupi, dengan penyaluran air bersih melalui pipa-pipa air yang menghubungkan antar rumah-rumah membuat distribusi air bersih dapat merata. Sarana sanitasi terdapat saluran pembuangan air limbah 1 unit, pemilik jamban 2269 KK. Keadaan desa yang tercukupi kebutuhan air, membuat kebutuhan air untuk rumah-rumah dan kebutuhan air untuk lahan bisa tercukupi dan membantu aktifitas pertanian bagi lahan yang perlu air.

Sarana dan prasarana pemerintahan terdapat Kantor Kepala Desa, Kantor Perlindungan Masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang menyatu dengan Kantor Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dalam satu

lokasi yang sama. Sarana dan prasarana peribadatan terdapat masjid 9 unit, mushola atau langgar sebanyak 63 unit dan gereja protestan sebanyak 1 unit. Banyaknya sarana peribadatan memudahkan akses penduduk desa dalam melakukan aktivitas peribadatan, kegiatan agama dan pendidikan agama seperti pondokan islam yang terdapat di Desa Tambakasri.

Sarana dan prasarana olahraga terdapat lapangan sepak sebanyak 2 unit dan lapangan voli sebanyak 11 unit. Prasarana kesehatan terdapat puskesmas 2 unit dan posyandu sebanyak 6 unit, sedangkan untuk sarana kesehatan terdapat 3 orang bidan dan 1 orang dukun pengobatan alternatif. Sarana dan prasarana pendidikan berupa bangunan sekolah formal sederajat maupun lembaga pendidikan agama. Terdapat Gedung SMA sebanyak 1 unit, gedung SMP 3 unit, gedung SD 8 unit, gedung TK 6 unit dan jumlah Lembaga Pendidikan Agama sebanyak 2 unit. Prasarana energi dan penerangan Desa Tambaksri sebanyak 2338 unit, dan lampu minyak/jarak/kelapa sebanyak 3 keluarga. Ini artinya hampir semua rumah tangga di Desa Tambakasri sudah dialiri listrik dari Perusahaan Listrik Nasional dan hanya 4 keluarga yang masih menggunakan lampu minyak. Desa Tambakasri tidak memiliki Tempat Pembuangan Sampah (TPS) maupun Tempat pembuangan Akhir (TPA) sehingga kebanyakan warga masyarakat terbiasa membakar sampah.

5.2 Karakteristik Responden

Berdasarkan data primer yang telah dikumpulkan pada penelitian di Desa Tambakasri, maka didapatkan data karakteristik responden yang ditampilkan pada tabel-tabel di bawah ini. Karakteristik responden penelitian dilihat berdasarkan usia responden, tingkat pendidikan responden, luas penguasaan lahan *tetelan*, dan jenis pekerjaan responden. Berikut jumlah dan persentase karakteristik responden berdasarkan usia, pendidikan, penguasaan lahan dan jenis mata pencaharian.

5.2.1 Usia Responden

Berdasarkan penelitian ini, usia responden di kelompokkan kedalam lima kategori yaitu: 1) Usia antara 20 sampai dengan 30 tahun, 2) Usia 31 sampai dengan 40 tahun, 3) Usia 41 tahun sampai dengan 50 tahun, 4) Usia 51 tahun sampai dengan 60 tahun, 5) Usia diatas 61 tahun. Berikut ini dijelaskan pada Tabel 12 mengenai distribusi usia responden.

Tabel 5. Usia responden berdasarkan tingkatan di Desa Tambakasri tahun 2018

| Usia | Jumlah (orang) | Persentase(%) |
|--------------|----------------|---------------|
| 20-30 | 2 | 6.06 |
| 31-40 | 9 | 27.27 |
| 41-50 | 13 | 39.39 |
| 51-60 | 8 | 24.24 |
| >61 | 1 | 3.03 |
| Total | 33 | 100.0 |

Sumber: Data Primer Diolah, 2018

Tabel 12 menunjukkan responden berada pada usia 20-30 tahun dengan persentase 6,06 persen, pada usia 31-40 tahun sebesar 27,27 persen, pada usia 41-50 tahun menjadi usia responden terbanyak yaitu dengan persentase 39,39 persen, usia 51-60 tahun sebesar 24,24 persen dan pada usia kategori terakhir usia 61 tahun keatas menjadi distribusi usia responden terkecil yaitu sebesar 3,03 persen.

5.2.2 Pendidikan Responden

Tingkat pendidikan responden merupakan tingkatan jenjang pendidikan formal yang pernah ditempuh oleh setiap responden. Tingkat pendidikan responden pada penelitian ini dibagi kedalam lima kategori jenjang pendidikan. Lima kategori pendidikan tersebut antara lain: 1) Tidak bersekolah, 2) Tidak tamat Sekolah Dasar (SD), 3) Tamat Sekolah Dasar (SD), 4) Tamat Sekolah Menengah Pertama (SMP), 5) Tamat Sekolah Menengah Atas (SMA). Berikut pada Tabel 9 merupakan penyajian tingkat pendidikan responden.

Tabel 6. Tingkat Pendidikan Responden

| Pendidikan | Jumlah (orang) | Persentase(%) |
|--------------------------------|----------------|---------------|
| Tidak Bersekolah | 3 | 9.1 |
| Tidak Tamat Sekolah Dasar | 8 | 24.2 |
| Tamat Sekolah Dasar | 12 | 36.4 |
| Tamat Sekolah Menengah Pertama | 9 | 27.3 |
| Tamat Sekolah Menengah Akhir | 1 | 3.0 |
| Jumlah | 33 | 100.0 |

Sumber: Analisis data primer, 2018

Berdasarkan Tabel 13 dapat diketahui bahwa dari jumlah 33 orang responden tingkat pendidikan dari responden yang tidak bersekolah sebesar 9,1 persen, tingkat pendidikan responden yang tidak tamat di jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD) sebesar 24,2 persen, responden yang tamat jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD) sebesar 36,4 persen, responden yang tamat

jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama sebesar 27,3 persen dan responden yang tamat di jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas sebesar 3,0 persen. Dari tabel diatas juga dapat diketahui bahwa pendidikan responden terbanyak adalah tamatan sekolah dasar, karena pada penelitian ini banyak responden yang berusia diatas 30 tahun. Bagi responden yang berusia diatas 30 tahun, dahulu akses pendidikan tidak semudah saat ini, keterbatasan sarana dan prasarana sekolah maupun belum adanya wajib belajar sehingga mereka hanya menenmpuh pendidikan sampai tingkat Sekolah Dasar atau yang dulu mereka kenal sebagai Sekolah Rakyat (SR) yang jenjang nya sama dengan Sekolah Dasar.

5.2.3 Jenis pekerjaan respoden

Desa Tambakasri menurut kondisi topografi berupa daerah hutan dan juga daerah perkebunan sehingga sebgaimana besar responden merupakan petani hutan atau *pesanggem* dan buruh tani. Berdasarkan Tabel 14 menunjukkan jumlah responden berdasarkan mata pencaharian terbanyak yaitu sebagai petani dengan lahan sendiri dengan persentase sebesar 57,6 persen dan sebesar 30,3 persen sebagai buruh tani. Sedangkan untuk mata pencaharian lain sebagai pedagang atau *bakul* komoditas pertanian. Pedagang di Desa Tamabakasri banyak didominasi sebagai pedagang komoditas pertanian seperti kopi, kelapa atau *krambil* , cengkeh, daun cengkeh, hingga durian. Mayoritas mata penaharian utama responden sebagai petani pengelola hutan yang banyak ditanamai kopi dan cengkeh karena di lokasi penelitian merupakan lokasi pertanian dengan komoditas kopi dan cengkeh.

Tabel 7. Jenis pekerjaan responden

| Jenis Pekerjaan | Jumlah (orang) | Persentase(%) |
|-----------------------------|----------------|---------------|
| Petani dengan lahan sendiri | 19 | 57.6 |
| Buruh Tani | 10 | 30.3 |
| Pedangan | 3 | 9.1 |
| Lainya | 1 | 3.0 |
| Total | 33 | 100.0 |

Sumber: Data Primer Diolah, 2018

5.2.3 Luas Kepemilikan Lahan Tetelan

Luas lahan yang dimiliki oleh responden berbeda-beda luasannya. Hal ini dikarenakan adanya perubahan dalam penguasaan lahan yang terjadi, perubahan

penguasaan lahan terjadi karena adanya alih nama pemilik, sewa, ataupun mendapat hibah dari lahan tetelan milik orangtua. Selain itu pada waktu pembagian pada saat itu tidak dibagi secara merata karena sebelum adanya program PHBM masyarakat desa ada yang telah mempunyai lahan berupa hutan yang dibuka sendiri yang dibuka sendiri. Sehingga perhutani memilih melakukan pembagian menurut lahan yang telah dipunyai agar tidak terjadi konflik.

Tabel 8. Luas penguasaan lahan tetelan milik responden

| Luas penguasaan lahan | Jumlah (orang) | Persentase (%) |
|-----------------------|----------------|----------------|
| <1 Ha | 14 | 42.4 |
| 1 Ha - 2,0 Ha | 16 | 48.5 |
| 2,1 Ha - 3,0 Ha | 1 | 3.0 |
| >3 Ha | 2 | 6.1 |
| Jumlah | 33 | 100.0 |

Sumber: Data Primer Diolah, 2018

Berdasarkan Tabel 15 dapat diketahui bahwa luas kepemilikan lahan yang diolah oleh rumah tangga pesanggem yang dijadikan responden didominasi kepemilikan lahan dibawah 1 ha dan luas lahan antara 1 sampai dengan 2 ha. Luas lahan yang dimiliki berkisar antara 1 – 2 ha sebanyak 16 orang dan dibawah 1 ha sebanyak 14 orang. Sehingga dengan luasan lahan yang dimiliki. Sedangkan yang memiliki lahan diatas 2 ha sebanyak 3 orang.

5.3 Analisis Gender Harvard pada PHBM

Gender menggambarkan peran laki-laki dan perempuan sebagai hasil konstruksi sosial budaya yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Perbedaan ini terjadi bukan disebabkan karena perbedaan biologis, melainkan nilai, norma, hukum dan ideologi dari masyarakat yang ada. Sehingga pada suatu kelompok masyarakat ada posisi perempuan yang ditinggikan, direndahkan bahkan sejajar pada bidang tertentu daripada posisi laki-laki. Posisi perempuan inilah yang menyebabkan perbedaan peran dan pembagian kerja yang terjadi dalam masyarakat.

Pembagian kerja pada masyarakat pedesaan lebih sederhana dibandingkan pembagian kerja masyarakat perkotaan. Pembagian kerja masyarakat pedesaan didasarkan atas perbedaan jenis kelamin dan usia. Pembagian kerja masyarakat pedesaan dapat diketahui dari pembagian kerja dalam rumah tangga untuk memudahkan dalam mengetahui perbedaan kerja dalam aktifitas tertentu.

Keluarga atau rumah tangga merupakan satuan terkecil dari masyarakat dimana segala macam hubungan antara laki-laki dan perempuan dapat tercermin, mulai dari perbedaan peran, pembagian kerja, penguasaan dan akses atas sumber-sumber baik fisik, maupun ideologis, hak dan posisi (Simatauw *et al.* 2001 dalam Fadilah, 2016)

Pembagian kerja, aktifitas, atau kegiatan pada rumah tangga biasanya didasarkan pada kegiatan yang menghasilkan uang, mengurus rumah tangga seperti merawat anak, memasak dan lain-lain. Selain itu juga kegiatan dalam bergaul atau bermasyarakat, pesta, ritual hingga proses pengambilan keputusan dalam rumah tangga hingga luar rumah tangga. Pembagian kerja tersebut secara garis besar dibedakan menjadi tiga kegiatan yaitu : 1) Aktifitas produktif merupakan kegiatan menyumbang pendapatan keluarga dalam bentuk uang atau barang untuk memenuhi kebutuhan keluarga. 2) Aktifitas Reproduksi merupakan kegiatan yang sifatnya merawat keluarga seperti membersihkan rumah, memasak, mengasuh anak dan 3) Aktifitas sosial masyarakat adalah aktifitas masyarakat yang sifatnya merekatkan hubungan dengan masyarakat, solidaritas, dan keutuhan masyarakat seperti : rapat desa, pengajian, PKK, karnaval hingga kegiatan adat yang lain.

5.3.1 Profil Aktifitas Perempuan Pesanggem

Peran perempuan dalam keseharian terbagi atas beberapa peran. Peran tersebut dibedakan berdasarkan pembagian kerja berdasarkan gender. Pembagian menurut gender seringkali didasarkan atas perbedaan jenis kelamin sehingga membedakan peran yang dilakukan perempuan dan laki-laki. Perbedaan peran perempuan yang didasarkan gender terbagi atas tiga peran (*triple role*) yang akan dijelaskan sebagai berikut :

1. Aktifitas produktif

Masyarakat desa yang hidup dekat dengan hutan memiliki ketergantungan akan keberadaan hutan. Ketergantungan terhadap hutan tersebut menciptakan keterikatan yang tinggi dengan alam dan lingkungan. Karena hutan merupakan alam yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya. Desa Tambakasri merupakan desa yang dekat dengan hutan sehingga sebagian masyarakat desa menggantungkan hidup dari alam dengan

melakukan kegiatan bertani sebagai mata pencaharian utama. Selain bertani juga berusaha ternak yaitu kambing dan sapi sebagai tambahan penghasilan.

Kegiatan produktif keluarga petani tidak hanya melibatkan pihak laki-laki saja, bahkan pihak perempuan juga ikut terlibat dalam kegiatan tersebut. Berdasar hasil penelitian Paolisso (1999) di Yuscaran-Honduras menunjukkan bahwa pada awalnya bidang pertanian merupakan pekerjaan laki-laki namun seiring terjadinya degradasi lahan telah meningkatkan peran perempuan pada kegiatan pertanian. Secara sosial budaya masyarakat pedesaan tidak mempermasalahkan ketimpangan gender dan keterlibatan perempuan yang bekerja dalam sektor pertanian. Sesuai dengan pernyataan Ibu SM berikut ini :

“ lanang wedok ndek kene podo ae pemgaweane mas lek ndek tetalan, malah wedok ndek kene akeh sg buruh menek cengkeh kadang-kadang lanang malah ora wani menek cengkeh” “Laki-laki dan perempuan di daerah sini sama saja pekerjaannya kalau di lahan tetelah, malah perempuan di daerah sini banyak sebagai buruh memanjat (panen) cengkeh, terkadang laki-laki ada juga yang tidak bisa memanjat pohong cengkeh”

Ketimpangan gender bagi perempuan menurut masyarakat sudah dianggap lazim, masyarakat tidak mempermasalahkan perempuan bekerja pada pekerjaan kasar di sektor pertanian. khususnya bekerja dalam pekerjaan-pekerjaan kasar seperti mencangkul, *jombret* atau penyiangan lahan kopi, bahkan yang dilakukan beberapa perempuan desa Tambakasri seperti sampai memanjat pohon kelapa hingga buruh memanen cengkeh menggunakan tangga bertingkat. Tingginya intensitas aktifitas yang dilakukan perempuan desa tersebut menunjukkan bahwa kontribusi perempuan juga patut diperhitungkan dalam kegiatan produktif.



Gambar 3. Memanen cengkeh oleh pesanggem perempuan

Aktifitas di sektor pertanian bagi masyarakat sekitar dibedakan menurut berat ringannya pekerjaan dan usia. Beberapa pekerjaan pertanian selain dikerjakan dominan laki-laki atau perempuan juga dikerjakan bersama-sama. Berdasarkan peran aktifitas pada rumah tangga petani pada Tabel 16 diperoleh persentase peran dalam rumah tangga dalam melakukan kegiatan bertani kopi dan cengkeh sebagai berikut.

Tabel 9. Persentase pembagian kerja produktif

| No | Produktif | L (%) | P (%) | L&P (%) |
|----|----------------------------------|-------|-------|---------|
| 1 | Pengolahan lahan | 93.9 | 0.0 | 6.1 |
| 2 | Pemilihan bibit | 81.8 | 9.1 | 9.1 |
| 3 | Persiapan media dan lubang tanam | 81.8 | 12.1 | 6.1 |
| 4 | Penanaman | 9.1 | 78.8 | 12.1 |
| 5 | Pembersihan dan penyiangan | 12.1 | 51.5 | 36.4 |
| 6 | Pemupukan | 54.5 | 9.1 | 36.4 |
| 7 | Perawatan (wiwil) | 15.2 | 57.6 | 27.3 |
| 8 | Pemanenan | 30.3 | 24.2 | 45.5 |
| 9 | Pascapanen (jemur, jipil) | 0.0 | 90.9 | 9.1 |
| 10 | Pengolahan hasil | 24.2 | 18.2 | 57.6 |
| | Total | 403.0 | 351.5 | 245.5 |
| | Rata-rata | 40.3 | 35.2 | 24.5 |

Sumber: Data Primer Diolah, 2018

Keterangan :

L : laki-laki,

P : Perempuan,

L&P : Laki-laki dan perempuan(bersama)

Diketahui keterlibatan perempuan secara keseluruhan dalam kegiatan berusaha tani cukup tinggi. Kegiatan produktif dalam rumah tangga pesanggem, menunjukkan distribusi pekerjaan usaha tani yang dilakukan dominan perempuan sebesar 35,2 persen, pekerjaan dominan laki-laki sebesar 40,3 persen, sedangkan untuk pekerjaan yang dilakukan bersama-sama laki-laki dan perempuan di rumah tangga pesanggem Desa Tambakasri sebesar 24,5 persen.

Kegiatan pengolahan lahan didominasi oleh kaum laki-laki sebanyak 93,9%, hal ini bukan berarti perempuan tidak ikut sama sekali dalam pengolahan lahan karena pada rumah tangga yang melakukan pengolahan lahan bersama sama laki-laki dan perempuan sebanyak 6,1%. Dengan kata lain

sebagian kecil dari rumah tangga memberi peran kepada perempuan dalam pekerjaan mengolah lahan.

Kegiatan produktif lain yang dilakukan lebih banyak (dominan) laki-laki adalah pemilihan bibit, persiapan media dan lubang tanam dan pemupukan dengan persentase diatas 50% dominan laki laki. Kegiatan yang dilakukan lebih banyak (dominan) perempuan adalah penanaman, pembersihan dan penyiangan, perawatan, dan pasca panen seperti jipil, selep, dan jemu. Persentase masing masing kegiatan adalah 78%, 51%, dan 92% kegiatan tersebut dominan dilakukan oleh perempuan.

Kegiatan produktif yang setara atau dilakukan bersama antara suami dan istri adalah kegiatan panen dan pengolahan hasil. Masing masing persentase pada kegiatan tersebut adalah 45% dan 57% . Dapat disimpulkan bahwa pada kegiatan tersebut berimbang peran yang dilakukan antara suami dan istri karena dilakukan secara bersama-sama dan saling membantu. Untuk lebih mempermudah dalam melihat peran antara perempuan dan laki-laki dalam aktifitas produktif maka akan dijelaskan melalui Tabel 17 di bawah ini.

Tabel 10. Pembagian peran kerja produktif

| No. | Produktif | L | P | L&P |
|-----|----------------------------------|---|---|-----|
| 1 | Pengolahan lahan | ✓ | | |
| 2 | Pemilihan bibit | ✓ | | |
| 3 | Persiapan media dan lubang tanam | ✓ | | |
| 4 | Penanaman | | ✓ | |
| 5 | Pembersihan dan penyiangan | | ✓ | |
| 6 | Pemupukan | ✓ | | |
| 7 | Perawatan (wiwil, sambung) | | ✓ | |
| 8 | Pemanenan | | | ✓ |
| 9 | Pascapanen (jemur,selep, jipil) | | ✓ | |
| 10 | Pengolahan hasil | | | ✓ |

Sumber: Data Primer Diolah, 2018

Secara keseluruhan aktifitas produktif dalam rumah tangga pesanggem dijelaskan pada Tabel 17. Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa kegiatan pengolahan lahan persiapan media dan lubang tanam lebih dominan dilakukan oleh laki-laki, karena pekerjaan ini dianggap sebagai pekerjaan berat sehingga jarang bagi perempuan terlibat dalam kegiatan pengolahan lahan. Sedangkan untuk pemilihan bibit juga dominan dilakukan laki-laki karena

biasanya dalam pemilihan bibit beserta pengangkutan menggunakan sepeda motor, sehingga sedikit sekali perempuan yang terlibat. Selain itu karena terbatasnya sepeda motor yang dimiliki dan hanya sebagian perempuan yang bisa menggunakan sepeda motor secara baik dalam lahan pertanian (masyarakat setempat menyebut dengan : tetelan atau tegal perhutani).

Kegiatan penanaman perempuan lebih dominan karena perempuan lebih berhati-hati dalam peletakan bibit dan tidak memerlukan banyak tenaga. Pembersihan dan penyiangan menjadi pekerjaan sehari-hari perempuan. Pembagian pekerjaan menurut berat ringannya pekerjaan tersebut sesuai dengan pendapat Suwartapradja (2008) bahwa pekerjaan kaum laki-laki pada jenis pekerjaan yang lebih banyak - kekuatan fisik, seperti mencangkul dan memikul, sedangkan pekerjaan perempuan lebih banyak bidang pekerjaan yang relatif tidak memerlukan kekuatan fisik, seperti menanam dan menyang

Bentuk pekerjaan yang dibedakan menurut berat atau ringannya suatu pekerjaan tersebut terlihat pada saat perempuan selalu membawa sapu tiap kali ke lahan tetelan, pekerjaan yang dilakukan adalah mengumpulkan daun cengkeh yang sudah rontok untuk disuling, sedangkan laki-laki memanjat pohon cengkeh. Dari sinilah kebutuhan sehari-hari dapat tercukupi dari hasil penyulingan minyak yang tergolong mahal. Pengumpulan daun cengkeh memakan waktu kurang lebih satu minggu untuk mencapai berat 100 kg sebagai berat minimal daun yang bisa di suling.

Pemupukan pada cengkeh dan kopi lebih banyak dilakukan oleh laki. Kegiatan pemupukan biasanya lebih dulu memesan pupuk pada kelompok tani hutan untuk mendapatkan pupuk bersubsidi, beberapa hari kemudian pengangkutan ke lahan dan proses pemupukan. Kegiatan pengangkutan pupuk di dominasi laki-laki karena membutuhkan tenaga ekstra dan melewati jalan tetelan yang sulit, adapun perempuan biasanya hanya membantu pemberian pupuk. Itu pun tidak semuanya dilakukan perempuan karena biasanya dibantu oleh tenaga borongan laki-laki bagi yang lahannya luas untuk mempercepat pemupukan.

Pada pengolahan kopi dan cengkeh biasanya hanya dijemur dan dijual kering. Tetapi untuk bagian daun, masyarakat Desa Tambakasri lebih memilih untuk disuling terlebih dahulu untuk menambah nilai jual daripada dijual

kering kepada pengepul. Terbatasnya jumlah penyulingan minyak cengkeh di Desa Tambakasri menyebabkan para penyuling terlebih dahulu memesan jam suling kepada pemilik alat suling, setelah itu berkoordinasi dengan penyuling sebelum dan sesudah jam suling yang di tentukan. Penyulingan 100 kg daun kering memerlukan waktu 4 jam untuk mendapat minyak maksimal. Pada kegiatan ini laki-laki dan perempuan bekerja bersama untuk menyuling daun cengkeh, saling bergantian memasukkan kayu dan bahan bakar daun cengkeh usai suling untuk tetap menjaga bara api tetap ada sampai selesai suling.

Pada kegiatan pascapanen dilakukan bersama-sama tetapi terdapat kegiatan yang dilakukan oleh perempuan saja sehingga tabel 23 menunjukkan bahwa pada kegiatan pascapanen dilakukan bersama-sama tetapi lebih dominan perempuan dalam kegiatan tertentu. Hal ini disebutkan oleh Ibu MSN pada pernyataan sebagai berikut:

“ Lek panen nggih bareng-bareng, ngendah kopi , kalih ngusung e kula nggih tumut, Tapi jipil mepi kale pritol cengkeh nggih katah tiang estri timbang sing jaler” “kalau kegiatan panen dilakukan bersama-sama, memanen kopi dan mengangkutnya saya juga ikut. Tapi jipil (mengambil daun cengkeh di bawah pohon), menjemur, pritol (memisahkan bunga dengan tangkai) cengkeh ya lebih banyak dilakukan oleh perempuan daripada laki-laki”

2. Kegiatan Reproduksi

Kegiatan produktif merupakan kegiatan yang sifatnya merawat keluarga seperti membersihkan rumah, memasak, mengasuh anak. Peran reproduktif tersebut sebagian besar atau bahkan hampir semua kegiatannya dikerjakan oleh perempuan, sehingga sering memunculkan stereotip bagi perempuan, menurut Handayani dan Sugiarti (2002) peran perempuan kini menjadi tradisi yang melekat dari zaman dahulu sehingga membudaya bahwa ranah perempuan adalah sumur, dapur, kasur. Yang artinya bahwa perempuan mengurus semua kegiatan rumah tanpa terlibat kegiatan produktif. Pernyataan yang bertolak belakang dengan keadaan perempuan Desa Tambakasri yang juga sibuk beraktifitas di tegal atau lahan tetelan.

Hampir semua kegiatan reproduktif dikerjakan mulai dari memasak, memandikan anak, membersihkan rumah dan aktifitas rumah lain dikerjakan oleh perempuan. Dengan kata lain perempuan bertanggung atas pekerjaan yang

sifatnya reproduktif dalam keluarga. Berikut dalam Tabel 18 menjelaskan lebih jelas peran perempuan pada aktifitas reproduktif.

Tabel 11. Persentase Pembagian kerja reproduktif

| No. | Reproduktif | L (%) | P (%) | L&P (%) |
|------------------|----------------------|------------|-------------|-------------|
| 1 | Asuh anak | 0.0 | 87.9 | 12.1 |
| 2 | Memasak | 3.0 | 93.9 | 3.0 |
| 3 | Bersih rumah | 0.0 | 90.9 | 9.1 |
| 4 | Kayu bakar | 45.5 | 12.1 | 42.4 |
| 5 | Anak belajar | 24.2 | 72.7 | 3.0 |
| 6 | Belanja di pasar | 0.0 | 93.9 | 6.1 |
| 7 | Kesehatan keluarga | 0.0 | 87.9 | 12.1 |
| 8 | Sekolah anak | 3.0 | 84.8 | 12.1 |
| 9 | Pengelolaan keuangan | 12.1 | 78.8 | 9.1 |
| Total | | 87.9 | 703.0 | 109.1 |
| Rata-rata | | 9.8 | 78.1 | 12.1 |

Sumber: Data Primer Diolah, 2018

Dari Tabel 18 secara keseluruhan keterlibatan laki dalam mengerjakan seluruh urusan reproduktif sangatlah rendah yaitu sebesar 9,8% secara keseluruhan kegiatan reproduktif yang benar- benar dilakukan oleh laki saja, sedangkan perempuan berkontribusi sangat besar pada kegiatan produktif yaitu sebesar 78,1 secara keseluruhan kegiatan reproduktif yang dilakukan oleh perempuan saja dan sisanya dilakukan bersama-sama.

Kegiatan produktif lain seperti yang disajikan dalam Tabel 18 semakin menguatkan besarnya peran perempuan dalam kegiatan reproduktif. Sehingga menguatkan stereotip gender perempuan menurut Yuliati (2005) bahwa ranah kerja perempuan adalah sumur, kasur dan dapur. Dalam kegiatan mengasuh anak sebesar 87,9 persen dari rumah tangga kegiatan mengasuh anak dilakukan oleh perempuan saja dan sisanya 12,1 persen dilakukan bersama-sama. Kegiatan memasak juga terlihat bahwa perempuan lebih dominan. Sebesar 3,0 persen atau 1 rumah tangga yang melakukan kegiatan memasak dikerjakan oleh laki-laki, 93,9 persen dilakukan perempuan, dan 3,1 persen dilakukan bersama-sama.

Kegiatan membersihkan rumah dapat diketahui bahwa perempuan mempunyai kontribusi besar. Sebesar 90,9 dari rumah tangga pekerjaan membersihkan rumah dikerjakan oleh perempuan saja dan sisanya sebesar 9,1 persen dilakukan bersama-sama. Kegiatan mencari atau mengambil kayu dapat

diketahui bahwa kegiatan ini lebih dominan dilakukan oleh laki-laki. Sebesar 45,5 persen rumah tangga kegiatan ini dilakukan oleh laki-laki saja, sedangkan yang dilakukan oleh perempuan saja sebesar 12,1 persen dan sisanya dilakukan bersama-sama.

Kegiatan mengawasi anak belajar berdasarkan tabel dapat diketahui perempuan lebih dominan dalam kegiatan ini. Sebanyak 72,7 persen rumah tangga menyerahkan pekerjaan ini kepada perempuan, sedangkan sisanya sebanyak 3,0 dilakukan bersama-sama. Kegiatan belanja dipasar berdasar tabel dapat diketahui bahwa kegiatan ini dilakukan dominan perempuan. Sebanyak 93,9 persen rumah tangga menyerahkan pekerjaan ini terhadap perempuan dan sisanya sebanyak 6,1 persen dikerjakan bersama-sama.

Kegiatan mengurus kesehatan keluarga berdasar tabel masih dominan dikerjakan oleh perempuan. Sebanyak 87,9 rumah tangga menyerahkan kegiatan ini kepada perempuan, sedangkan sisanya 12,1 persen rumah tangga mengurus kesehatan secara bersama. Kegiatan Mengurus sekolah anak masih didominasi peran perempuan. Sebanyak 3,0 persen rumah tangga menyerahkan kegiatan ini kepada laki-laki, 84,8 persen rumah tangga menyerahkan tugas ini kepada perempuan dan sisanya 12,1 dikerjakan secara bersama. Kegiatan mengelola keuangan keluarga juga masih dominan dikerjakan oleh perempuan. Sebanyak 12,1 persen rumah tangga menyerahkan kegiatan ini kepada laki-laki, sebanyak 78,8 persen rumah tangga menyerahkan pekerjaan ini kepada perempuan dan sisanya sebanyak 9,1 persen rumah tangga secara kolektif melakukan secara bersama-sama.

Tabel 12. Pembagian Kerja Reproduksi

| No. | Reproduktif | L | P | L&P |
|-----|------------------------|---|---|-----|
| 1 | Mengasuh anak | | ✓ | |
| 2 | Memasak | | ✓ | |
| 3 | Bersih rumah | | ✓ | |
| 4 | Kayu bakar | ✓ | | |
| 5 | Mengawasi anak belajar | | ✓ | |
| 6 | Belanja di pasar | | ✓ | |
| 7 | Kesehatan keluarga | | ✓ | |
| 8 | Sekolah anak | | ✓ | |
| 9 | Pengelolaan keuangan | | ✓ | |

Sumber: Data Primer Diolah, 2018

Dari Tabel 19 dapat diketahui pembagian kerja reproduktif yang dilakukan perempuan Desa Tambakasri. *Momong* merupakan kegiatan mengasuh anak yang masih kecil untuk bermain yang dilakukan para ibu di Desa Tambakasri. Kegiatan ini sangat erat kaitannya dengan stereotipi bahwa seorang ibu tugasnya adalah merawat. Sambil *momong* mereka bersosialisasi dengan tetangga mengenai permasalahan kehidupan sehari-hari, kesehatan, hingga pendidikan anak. Sedangkan kegiatan mengantar anak ke sekolah lebih banyak dilakukan oleh laki-laki menggunakan motor khas warga Desa Tambakasri sebagai kendaraan untuk beraktifitas di ladang. Tidak jarang bagi anak-anak kecil sedang diantar lebih suka duduk di *obrok* (keranjang tambahan sepeda motor untuk memudahkan membawa peralatan).



Gambar 4. Kegiatan reproduktif mengasuh anak (*momong*)

Kegiatan menyiapkan makanan mulai dari mencari bahan makanan diladang atau beli di pasar sampai memasak adalah pekerjaan perempuan. Tradisi yang ada disana adalah kegiatan masak memasak yang harus dilakukan pagi hari setelah waktu subuh bahkan sebelum waktu subuh, karena banyak pekerjaan lain bagi ibu rumah tangga petani selain menyiapkan keperluan anak yang akan berangkat sekolah mencuci piring, menyiapkan makanan untuk sarapan keluarga hingga menyiapkan bekal untuk dimakan di ladang mengingat jauhnya lahan tetelan yang dimiliki. Tidak hanya itu membersihkan rumah seperti menyapu, mencuci piring dilakukan sebelum berangkat ke lahan oleh perempuan. Bahkan dalam kegiatan mencari kayu bakar pun perempuan turut serta dalam pencarian walaupun tidak sebanyak peran laki-laki dalam mencari kayu bakar. Pekerjaan mencari kayu bakar di Desa Tambakasri

memang didominasi laki-laki karena dalam hal pengangkutan lebih efisien dilakukan oleh laki-laki menggunakan motor.



Gambar 5. Aktifitas reproduktif mengantar anak sekolah

Demikian pula waktu malam hari merupakan waktu bersantai melepas lelah setelah seharian mengolah lahan dilanjut untuk aktifitas menyetrika sampai kegiatan menemani belajar anak, tidak banyak juga peran laki-laki yang membantu menemani anak belajar tetapi di sebagian rumah tangga, laki-laki lah yang menemani anak belajar meskipun tidak sebanyak jumlah perempuan dalam hal menemani belajar. Hanya terkadang laki-laki atau bapak turut serta dalam mengatasi kesulitan anak mengerjakan tugas.

Kegiatan reproduktif memang erat kaitannya dengan perempuan, tapi bukan berarti dilakukan perempuan terus menerus karena laki-laki terkadang juga membantu dalam kegiatan produktif meskipun tidak *intens*. (Tamyis 2006) dalam (Rahmawati, 2013) secara umum laki-laki pada rumahtangga masih terlibat dalam kegiatan reproduktif meskipun curahan waktu yang sedikit dibanding perempuan. Meskipun sifatnya membantu tetapi bagi perempuan sudah cukup merasa terbantu akan kesadaran laki-laki melihat pekerjaan perempuan yang begitu banyaknya.

Pekerjaan perempuan apabila dilihat dari Tabel 17 dan Tabel 19 menyatakan bahwa perempuan menyandang 2 pekerjaan sekaligus, yaitu pekerjaan perempuan sebagai pencari nafkah bersama suami dan pekerjaan yang sifatnya reproduktif seperti mengurus rumah dan anak. Kegiatan perempuan dalam sektor publik dan dalam sektor domestik ini menimbulkan isu gender yaitu beban ganda (*double burden*) yang terjadi pada perempuan. Intan (2014) mendefinisikan peran ganda sebagai suatu kondisi dimana

perempuan melaksana-kan tugas-tugas domestik sekaligus peran publik. Beban perempuan dijelaskan lagi menurut (Intan, 2014) peran ganda adalah sebuah cerminan ketidakseimbangan relasi jender dalam rumah tangga. Beratnya beban perempuan dalam hal ini dapat diraba. Bisa dibayangkan kelelahan seorang perempuan yang seharian bekerja mencari nafkah, lalu harus berhadapan dengan tugas lain, seperti menyusui anak, menyediakan hidangan di meja makan, mencuci piring, dan melayani suami ketika ia kembali ke rumah

3. Kegiatan Sosial Kemasyarakatan.

Tabel 20 menunjukkan distribusi keterlibatan rumah tangga dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa keterlibatan perempuan sangatlah rendah dalam kegiatan masyarakat formal yang berhubungan dengan pertanian. Dalam kegiatan kelompok tani persentase keseluruhan keterlibatan masih di dominasi laki-laki bahkan pada kelompok tani hutan sebanyak 78,8 persen dan 64,7 persen. Sedangkan keterlibatan perempuan dari jumlah rumah tangga yang diteliti sangat lah rendah yaitu dibawah 10 persen.

Tabel 13. Aktifitas Sosial Kemasyarakatan

| No. | Sosial kemasyarakatan | L (%) | P (%) | L&P (%) |
|------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 | PKK | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
| 2 | Kelompok tani | 78.8 | 9.1 | 12.1 |
| 3 | Kelompok tani hutan | 64.7 | 8.8 | 26.5 |
| 4 | Pengajian | 0.0 | 16.1 | 83.9 |
| 5 | Gotong-royong | 0.0 | 9.1 | 90.9 |
| 6 | Total | 143.5 | 143.1 | 213.4 |
| Rata-rata | | 28.7 | 28.6 | 42.7 |

Sumber: Data Primer Diolah, 2018

Sedangkan dalam kegiatan sosial PKK semua rumah tangga yang diteliti menunjukkan bahwa semua istri dalam rumah tangga mengikuti kegiatan PKK. Kegiatan sosial kemasyarakatan informal seperti sambatan, khitanan , hajat pernikahan dan tahlilan hampir dilakukan oleh semua laki-laki dan perempuan. Kegiatan informal lain yang sering diikuti masyarakat desa Tamabakasri adalah kelompok kegiatan keagamaan pengajian dan majlis sholawat. Sebanyak 16,1 persen dari rumah tangga yang mengikuti pengajian hanya

perempuan, sedangkan 83,9 persen dari rumah tangga yang mengikuti pengajian adalah laki-laki bersama perempuan.

Tabel 14. Pembagian peran pada kegiatan sosial kemasyarakatan

| No. | Sosial kemasyarakatan | L | P | L&P |
|-----|-----------------------|---|---|-----|
| 1 | PKK | | ✓ | |
| 2 | Kelompok tani | ✓ | | |
| 3 | Kelompok tani hutan | ✓ | | |
| 4 | Pengajian | | | ✓ |
| 5 | Gotong-royong | | | ✓ |

Sumber: Data Primer Diolah, 2018

Tabel 21 di atas memperlihatkan bahwa, perempuan juga memiliki peran yang cukup besar dalam kegiatan kemasyarakatan. Pada kegiatan masyarakat yang sifatnya formal keikutsertaannya lebih didominasi oleh laki-laki. Kebudayaan dan adat-istiadat yang memberikan posisi laki-laki sebagai pihak superior mengakibatkan tingginya dominasi laki-laki dalam kehidupan masyarakat (Situmorang, 2013). Adanya anggapan bahwa kegiatan formal seperti kelompok tani lebih baik diikuti oleh kepala keluarga atau laki-laki, apalagi kegiatan dilakukan pada malam hari sehingga banyak perempuan melakukan kegiatan reproduktif sebagai ibu yang menjaga anak dirumah. Keikutsertaan perempuan dalam kegiatan formal terkadang hanya mewakili laki-laki yang berhalangan hadir, meskipun ada dari beberapa perempuan yang aktif dalam kegiatan formal tetapi jumlahnya sedikit. Kegiatan formal tersebut adalah kelompok tani kopi dan kelompok tani hutan yang hanya sedikit melibatkan perempuan.

Salah satu kegiatan dan organisasi kemasyarakatan yang melibatkan perempuan adalah PKK. Seluruh rumah tangga yang diteliti, perempuan mengikuti organisasi ini. Disamping menjadi organisasi perekat hubungan antar ibu-ibu, PKK juga menjadi alat penyampai informasi dari pemerintah desa, penyuluh kesehatan maupun dari perhutani dalam pengelolaan hutan. Kegiatan kemasyarakatan yang sifatnya informal di desa Tambakasri antara lain pengajian dan gotong royong. Kegiatan pengajian yang diikuti antara lain diban, tahlilan khusus laki-laki dan tahlilan khusus perempuan, pengajian jum`at legi, majlis ta`lim dan majlis sholawat. Semua kegiatan pengajian hampir semua diikuti bersama-sama laki-laki dan perempuan, terlebih lagi acara majlis sholawat yang biasanya dilakukan tiap minggu, karena tempat

pelaksanaan yang berpindah-pindah biasanya laki-laki dan perempuan memiliki grup rombongan untuk berangkat bersama dalam menghadiri acara sholawatan ini.



Gambar 6. Kegiatan sosial kemasyarakatan pengajian jumat legi perempuan

Kegiatan informal lain adalah gotong-royong. Sudah menjadi tradisi masyarakat untuk saling membantu apabila tetangga atau warga lain sedang melakukan hajat seperti khitan, nikahan, maupun sedang terjadi kesusahan (kematian dan sakit) perempuan dan laki-laki aktif terlibat. Tetapi dalam gotong royong yang sifatnya membutuhkan tenaga yang berat seperti sambatan dan pembersihan jalan untuk pengecoran perempuan dilibatkan dalam penyediaan konsumsi (makanan dan minuman).

5.3.3 Akses dan Kontrol Perempuan terhadap Sumberdaya

Akses merupakan peluang dari laki-laki dan perempuan terhadap sumberdaya yang ada. Sedangkan kontrol adalah kemampuan untuk menguasai dan menentukan atau mengambil keputusan pada sumberdaya yang ada (Yuliati, 2005). Dalam penelitian ini dibatasi peluang dan kontrol yang diteliti terhadap sumberdaya: lahan, organisasi, informasi inovasi teknologi, finansial dan pendidikan.

Di dalam rumah tangga setiap hal yang menyangkut kepentingan keluarga bahkan pribadi anggota memiliki cara tertentu untuk mengambil keputusan. Ada keluarga yang pengambilan keputusan tertinggi adalah laki-laki, ada yang bersama-sama, ada pula yang perempuan saja. Kadangkala pengambilan

keputusan memiliki jenjang berdasarkan umur dan jenis kelamin (Simatauw *et al.* 2001).

Pembagian peran yang berjalan dalam suatu masyarakat tertentu seringkali meletakkan perempuan pada posisi yang kurang menguntungkan, misalnya dibatasi akses dan kontrolnya terhadap pengambilan keputusan, bahkan keputusan-keputusan yang menyangkut dirinya dan kehidupannya. Hal ini dikarenakan posisi perempuan bukan sebagai kepala keluarga. Yang mana anggapan kepala keluarga adalah pemegang penuh keputusan dalam rumah tangga. Dalam banyak hal menyebabkan perempuan diharuskan tunduk pada keputusan yang diambil laki-laki (Tobing *et al.* 2005). Berikut ini memperlihatkan akses dan kontrol pada sumberdaya berdasarkan jenis kelamin di desa penelitian.

Tabel 15. Akses dan Kontrol Sumberdaya Berdasarkan Jenis Kelamin

| No | Sumberdaya | Akses | | | Kontrol | | |
|----|---|-------|---|----|---------|---|----|
| | | L | P | LP | L | P | LP |
| 1 | SDA lahan | | | ✓ | ✓ | | |
| 2 | Organisasi Kelompok tani hutan | ✓ | | | ✓ | | |
| 3 | Informasi, inovasi, teknologi pasar pertanian kesehatan | ✓ | ✓ | | ✓ | | |
| 4 | Finansial Modal | | | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 5 | Pendidikan | | | ✓ | | | ✓ |

Sumber: Data Primer Diolah, 2018

Dalam mengakses sumberdaya berupa lahan laki-laki dan perempuan mempunyai akses yang sama, kendati seluruh perempuan memiliki akses terhadap kegiatan pengelolaan hutan mulai dari pengolahan lahan hingga pemanenan. Namun tidak semuanya memiliki kontrol atas pengelolaan hutan yang berarti ikut serta mengambil keputusan dalam penentuan waktu, cara pengolahan lahan, penanaman, perawatan, pemanenan dan pasca panen. Selama ini peran perempuan dalam sektor pertanian di pedesaan sangat tinggi namun seringkali tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan

pengembangan sektor pertanian (Ruswita *et al.* 2005). Hal ini didukung oleh pernyataan Ibu S :

“ lek nang lahan yo melok mas masio tetelan e adoh, tapi lek liyane iku yo opo jare wong lanang ae sing wedok iku melok opo jarene wong lanang ” “kalau ke lahan ya ikut mas meskipun lahannya jauh, tapi kalau urusannya selain dilahan ya perempuan ikut apa kata laki-laki “

Tetapi ada beberapa rumah tangga yang memberikan akses kepada perempuan yang ikut dalam pengambilan keputusan dikarenakan perempuan dianggap mampu untuk mengambil keputusan karena menguasai ilmu pertanian, dan sisanya perempuan sendiri mengambil keputusan sendiri dikarenakan perempuan tersebut berstatus janda.

Dalam berorganisasi, laki-laki lebih dominan sedangkan perempuan jarang sekali terlibat dalam organisasi. Sebenarnya pada kelompok tani hutan LKDPH sudah memberikan peluang bagi laki-laki dan perempuan untuk mengikuti kegiatan seperti rapat tetapi masih sedikit yang hadir. Pekerjaan reproduktif dan stereotipe bahwa perempuan yang sudah menjadi istri kehidupannya berdasar apa kata suami sehingga secara tidak langsung menutup peluang diri sendiri dan lebih membuka peluang laki-laki dalam berorganisasi. Tamyis (2006) dalam (Rahmawati, 2013) Akses dan kontrol yang dimiliki laki-laki lebih besar daripada perempuan terhadap kegiatan pengelolaan lahan hutan terutama pada kegiatan pengelolaan lahan, pemasaran hasil panen, menjadi pengurus dalam anggota LMDH, dan mengikuti kegiatan yang diselenggarakan LMDH

Akses dan kontrol pada sumber finansial berupa modal menunjukkan bahwa akses perempuan dan laki-laki terhadap keuangan berupa modal sudah setara, dalam artian perempuan dan laki-laki sama memiliki peluang memakai modal untuk keperluan usaha. Tetapi dalam hal kontrol atau memutuskan sesuatu laki-laki lebih dominan dalam penentuan keputusan. Akses pendidikan formal untuk perempuan dan laki-laki di Desa tambakasri pada saat ini sudah mulai meningkat daripada masa lalu. Sesuai dengan pernyataan pak BCR :

“Mbiyen ndek kene yo ganok sing sekolah, sekolah e adoh, gak duwe biaya, lek sekolah ae mulih e ngarit pakan e sapi. Saiki enggak, kabeh kudu sekolah gak lanang gak wedok ” “Dulu disini tidak ada yang bersekolah karena sekolahnya jauh, tidak punya biaya, walaupun ada yang bersekolah kalau pulang sambil mencari pakan sapi. Sekarang tidak karena laki-laki dan perempuan harus sekolah”

Pendidikan masa lalu laki-laki dan perempuan sama-sama susah dalam mengakses pendidikan, hal ini dikarenakan jumlah sekolah yang sedikit dan sangat jauh dari rumah sehingga memperkecil peluang untuk sekolah. Tetapi pada tahu sekarang hampir seluruh laki-laki dan perempuan mempunyai akses dan kontrol yang sama dalam pendidikan, apalagi dengan mulai dicanangkannya program wajib belajar bagi anak. Sehingga semakin memperbesar kesempatan bagi perempuan dan laki-laki dalam mengenyam pendidikan.

Secara keseluruhan bahwa kontrol dan akses perempuan dalam sumberdaya masih lemah. Meskipun ada beberapa sumberdaya yang lebih dikuasai perempuan seperti kesehatan, tetapi untuk sumberdaya lain pemegang kekuasaan seperti pengambil keputusan posisi perempuan masih di bawah laki-laki. (Lesmana, 2005) berpijak pada stereotipe bahwa pria tani (suami) merupakan pemilik dan penanggung jawab usaha tani keluarga, sehingga merekalah yang berwenang dan lebih tepat untuk memutuskan.

5.3.4 Manfaat

Manfaat merupakan hasil yang bisa dirasakan atau digunakan dari pekerjaan yang dilakukan. Manfaat berdasar Tabel 23, laki-laki dan perempuan mendapat manfaat yang sama dari pekerjaan yang dilakukan. Manfaat dari pendapatan tidak hanya dirasakan oleh laki-laki saja tetapi perempuan juga ikut merasakan pendapatan dari berusaha tani misalnya. Manfaat dalam hal kesehatan juga perempuan mendapat manfaat yang sama tidak ada ketimpangan gender dalam perolehan manfaat ini.

Tabel 16. Manfaat Jaringan bagi Penduduk Laki-laki dan Perempuan

| Manfaat | L | P | L&P |
|----------------|----------|----------|----------------|
| Pendapatan | | | ✓ |
| Kesehatan | | | ✓ |
| Jaringan | ✓ | | |
| Pendidikan | | | ✓ |

Sumber: Data Primer Diolah, 2018

Selanjutnya yang membedakan adalah manfaat dari jaringan. Jaringan yang dimaksud adalah organisasi formal atau informal yang diikuti. Laki-laki lebih mendapat manfaat dari jaringan karena akses dan kontrol akan organisasi

lebih besar laki-laki. Tingginya kontrol dan akses ini karena keterlibatan laki-laki lebih dominan dalam berorganisasi sehingga informasi, ilmu, pengetahuan lebih menguntungkan bagi laki-laki karena lebih banyak atau terlibat dalam organisasi. Manfaat pendidikan yang diperoleh juga tidak membedakan perempuan dan laki-laki semua mendapat manfaat dari pendidikan. Karena pada zaman ini tidak membatasi akses perempuan dalam ikut serta mendapat pendidikan hingga jenjang SMA.

5.4 Modal sosial pada program PHBM

Menurut Lin (2001) modal sosial didefinisikan sebagai investasi dalam hubungan sosial dengan hasil yang diharapkan. Adapun yang dimaksudkan dalam investasi sosial disini adalah sumberdaya sosial seperti jaringan, kepercayaan dan norma dan nilai sosial. Unsur mosial modal sosial tersebut merupakan sumberdaya sosial yang dapat dijadikan investasi untuk mendapatkan sumberdaya baru lain didalam masyarakat. Dalam penelitian ini modal sosial diukur melalui hasil interaksi antara anggota LKDPH, terpeliharanya kepercayaan antar anggota ataupun bukan anggota sehingga terjalin hubungan yang harmonis. Modal sosial dilihat pula dalam program PHBM. Melalui program tersebut diharapkan terbentuknya kepercayaan, norma, dan jaringan antara mitra Perhutani dengan anggota LKDPH.

5.4.1 Kepercayaan (Trust)

Merujuk Ridell dalam Suharto (2006), kepercayaan adalah harapan yang tumbuh di dalam sebuah masyarakat yang ditunjukkan oleh adanya perilaku jujur, teratur, dan bekerjasama berdasarkan norma-norma yang dianut bersama. Kepercayaan yang dimiliki masyarakat akan menimbulkan solidaritas dan memungkinkan pencapaian tujuan bersama. Pada penelitian ini kepercayaan yang dilihat merupakan kepercayaan yang terbentuk antara sesama anggota, non anggota, dan juga dengan pihak Perhutani. Tingkat kepercayaan diukur dari rasa percaya yang terbangun antara sesama anggota, non anggota dan dengan pihak Perhutani di LKDPH Wono Mulyo

Tabel 17. Skor Rata-Rata Indikator Kepercayaan

| Indikator kepercayaan | Rata-rata skor | Kategori |
|------------------------------|-----------------------|-----------------|
| Antar pesanggem | 2.60 | Tinggi |
| Pengurus LKDPH | 2.10 | Sedang |
| Masyarakat bukan pesanggem | 2.70 | Tinggi |
| Tingkat kerjasama produktif | 2.30 | Sedang |
| Tingkat kerjasama sosial | 2.80 | Tinggi |
| Total | 12.5 | Tinggi |

Sumber: Data Primer Diolah, 2018

Berdasarkan Tabel 24 diperoleh hasil bahwa modal sosial yang dimiliki perempuan dari tiap indikator tersebar dalam kategori sedang dan tinggi. Indikator yang termasuk dalam kategori tinggi adalah kepercayaan antar pesanggem, kepercayaan pesanggem dengan masyarakat bukan pesanggem, dan kerjasama dalam kegiatan sosial. Skor rata-rata masing-masing indikator adalah 2,6, 2,7 dan 2,8. Kepercayaan antara pesanggem dengan LKDPH dan kerjasama kegiatan produktif masuk dalam kategori sedang dengan skor rata-rata 2,1 dan 2,3.

Tingginya kepercayaan yang dimiliki perempuan terhadap pesanggem atau anggota dan non pesanggem karena mereka saling menjaga dan saling melindungi satu sama lain sehingga memudahkan dalam melakukan pekerjaan mereka. Kesadaran akan pentingnya saling percaya, terbuka, jujur dan kebersamaan yang terjalin antara pesanggem sangat baik dan kuat. Modal sosial yang dibangun berdasar hubungan kepercayaan yang kuat didalamnya ditopang oleh sikap keadilan, toleransi, dan keramahan sesama. Kepercayaan yang dibangun antar sesama pesanggem di Desa Tambakasri terbangun bukan hanya unsur pertemanan saja tetapi dari ikatan kekeluargaan. Sebab kepercayaan yang terbangun diantara mereka akan semakin merekatkan hubungan antar masyarakat. (Putra, 2016) menjelaskan bahwa kepercayaan yang kuat timbul akibat sikap percaya, adil, toleransi dan keramah tamahan timbul karena faktor keluarga, kerabat, teman yang berasal dari satu etnis yang sama yang telah lama tumbuh ditengah tengah mereka .

Sikap saling percaya yang tinggi tersebut mendasari perilaku yang mendorong terjadinya transfer informasi, penyampaian pendapat, dan sikap saling memotivasi yang sering dilakukan. Transfer informasi yang paling mudah diamati adalah dari interaksi perempuan dengan pesanggem lain. Para perempuan di lahan sering menanyakan cara bertani dari penanaman, perawatan, hingga

pemanenan kepada pesanggem lain saat berada di lahan tetelan yang berdekatan, begitu juga sebaliknya. Transfer informasi tidak hanya tentang pertanian saja tetapi kesehatan, sosial, dan politik yang kerap dilakukan saat istirahat menjelang dhuhur bersama pesanggem lain. Bentuk kepercayaan dari pesanggem tersebut mengandung makna bahwa hubungan mereka dengan pesanggem lain dalam berbagi informasi maupun saling memotivasi adalah sebuah keuntungan. Bentuk kepercayaan tersebut didukung pendapat Lawang (2004) dalam Damsar (2009) salah satu inti dari kepercayaan adalah harapan yang terkandung dalam hubungan itu, yang kalau direalisasikan tidak akan merugikan salah satu atau kedua belah pihak.

Transfer informasi antara LKDPH dengan pesanggem perempuan nampaknya belum menunjukkan nilai yang tinggi, pembagian tugas berupa intruksi dari LKDPH masih jarang tersampaikan secara langsung kepada perempuan. Sehingga akses informasi kepada perempuan masih jarang, adapun perempuan menerima informasi dari LKDPH melalui suami sebagai penerima informasi langsung dari pihak LKDPH. Akses perempuan atas informasi dan pembagian tugas biasanya melalui tetangga sekitar ataupun melalui grup ibu-ibu PKK di setiap dusun yang dikoordinasikan dengan perhutani maupun LKDPH. Namun intensitasnya masih jarang.

Tabel 18. Jumlah dan persentase responden berdasarkan tingkat kepercayaan

| Tingkat Kepercayaan | Jumlah (orang) | Persentase (%) |
|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Rendah | 0 | 0 |
| Sedang | 10 | 30.3 |
| Tinggi | 23 | 69.7 |
| Total | 33 | 100.0 |

Sumber: Data Primer Diolah, 2018

Berdasarkan data yang diperoleh melalui penelitian, secara umum bahwa tingkat kepercayaan yang dimiliki perempuan berada pada kategori sedang sebanyak 10 orang dengan persentase 30,3. Dan berada pada kategori tinggi sebanyak 23 orang dengan persentase 69,7. Kepercayaan yang kuat diartikan bahwa perempuan percaya terhadap sesama pesanggem maupun bukan pesanggem, pengurus dan perhutani.

5.4.2 Nilai dan norma

Norma merupakan komponen yang berisi peraturan-peraturan yang terdapat dalam suatu hubungan relasional tertentu. Norma tumbuh dan berkembang di masyarakat dan berfungsi sebagai pedoman untuk menjaga keseimbangan dalam masyarakat. Ridell dalam Suharto (2006) menyatakan, norma-norma terdiri dari pemahaman pemahaman, nilai-nilai, harapan-harapan, dan tujuan yang diyakini dan dijalankan bersama oleh sekelompok orang. Norma di masyarakat memiliki sanksi yang berbeda-beda, norma tersebut biasanya berupa tertulis maupun tidak tertulis tetapi dipahami dan dipatuhi oleh masyarakat.

Pada penelitian ini nilai dan norma yang diteliti antara lain: nilai norma dalam PHBM, nilai dan norma dari masyarakat yang berlaku, dan nilai dan norma gender. Norma dan nilai pada program PHBM dilihat dari pengetahuan dan pelaksanaan peraturan PHBM oleh pesanggem. Nilai dan norma yang berlaku di masyarakat dilihat dari norma yang berlaku di masyarakat dan juga norma adat atau kebiasaan. Norma sosial atau nilai-nilai dalam penelitian ini yang dimaksud adalah nilai-nilai tradisional yang mengandung kualitas moral, misalnya: nilai-nilai kejujuran, saling menghormati, saling menghargai, saling menjaga, kebersamaan, kesetiaan, dan pemenuhan kewajiban. Norma dan nilai dalam gender dilihat dari pandangan mengenai kesempatan dan peluang gender khususnya perempuan dalam kehidupan bermasyarakat.

Tabel 19. Skor Indikator Norma dan Nilai

| Indikator norma | Rata-rata skor | Kategori |
|--|-----------------------|-----------------|
| Peraturan kelompok | 2.6 | Tinggi |
| Persepsi peraturan | 2.7 | Tinggi |
| Pelaksanaan sanksi | 2.6 | Tinggi |
| Norma masyarakat | 2.7 | Tinggi |
| Persepsi perempuan bekerja sektor publik | 2.6 | Tinggi |
| Persepsi perempuan memperoleh pengetahuan | 2.6 | Tinggi |
| Persepsi perempuan menduduki jabatan penting | 2.4 | Tinggi |
| Persepsi perempuan bersekolah | 2.8 | Tinggi |
| Total | 21.1 | Tinggi |

Sumber: Data Primer Diolah, 2018

Berdasar Tabel 26, norma dan nilai pada program PHBM secara umum tergolong kategori tinggi. Tingginya norma dan nilai ini dilihat dari skor rata-rata

pengetahuan dan pelaksanaan peraturan PHBM. Pengetahuan perempuan terhadap peraturan PHBM mendapat rata-rata skor 2,6 (tinggi). Persepsi perempuan terhadap peraturan mendapat skor rata-rata 2,7 (tinggi). Pelaksanaan peraturan dan pemberian sanksi bagi pelanggar peraturan mendapat skor 2,6 (tinggi).

Pengetahuan dan norma dan nilai pada PHBM yang tinggi disebabkan oleh adanya norma-norma dan aturan yang jelas bagi pesanggem sebagai anggota LKDPH. Norma yang dijalankan antara lain dari dijalkannya peraturan dari pelaksanaan program PHBM yaitu, dilarang merusak tanaman pokok milik perhutani dan juga harus melakukan *profit sharing* dengan perhutani. Sanksi yang diberikan berupa teguran apabila yang dilanggar masih bisa ditoleransikan, akan tetapi apabila yang dilanggar adalah perusakan tanaman pokok maka sanksi berupa denda uang. Bagi perempuan sebagai pesanggem, peraturan menjadi keharusan yang harus ditaati. Karena perempuan merasa takut apabila melakukan pelanggaran sampai mendapat sanksi denda berupa uang, apalagi kegiatan perusakan berupa penebangan kayu yang bertolak belakang dengan stereotip perempuan yang lemah penakut. Dengan stereotip yang melekat pada perempuan menjadikan peluang perempuan untuk melanggar peraturan adalah sangat kecil apalagi sampai menebang hingga berurusan dengan pihak berwajib.

Norma dan nilai yang berlaku dimasyarakat mempunyai skor rata-rata 2,7 (tinggi). Norma sosial dalam setiap tindakan yang dibangun dengan memegang prinsip dalam berhubungan selalu menghargai atau menghormati sesama masyarakat adalah sikap kejujuran dan saling menjaga yang dibangun atas dasar pekerjaan, keluarga dan teman dekat untuk mencapai harapan dan tujuan bersama. Setiap perilaku pesanggem desa Tambakasri dalam berinteraksi dengan anggota lain tanpa sengaja bersumber dari nilai-nilai yang diajarkan oleh para orang tua mereka, seperti memberikan nasehat ataupun teguran untuk bertingkah laku di tempat orang serta ikatan keluarga menjadi peran penting untuk saling memberikan perlindungan atau penjagaan antara sesama anggota pengelola hutan. Aturan-aturan seperti ini yang dipakai dalam melakukan interaksi sosial dengan anggota lain, sehingga norma sosial ini dapat tercermin dari setiap pesanggem yang dimaksudkan untuk mencapai harapan dan tujuan bersama.

Norma dan nilai gender terdistribusi dalam kategori tinggi dan sedang. Berdasarkan data pada tabel menunjukkan norma dan nilai gender dalam kategori

tinggi pada persepsi atau anggapan baik perempuan bekerja pada sektor publik dengan skor rata-rata 2,6 (tinggi). Persepsi atau anggapan baik perempuan dalam memperoleh pendidikan (pelatihan) rata-rata 2,6 (tinggi). Persepsi atau anggapan baik perempuan mendapat pendidikan formal hingga jenjang yang tinggi dengan skor rata-rata 2,8 (tinggi). Tingginya norma pada geder ini dikarenakan karena perempuan pada era sekarang sudah mulai bersaing sehingga perlu sekolah dan mempunyai ketrampilan untuk masa depannya, hal ini sesuai dengan pendapat bu MRL.

“Sing setri mboten ten pawon mawon, nggih butuh sekolah cek sami kalih lintune, gadah pendamelan ingkang sae. Jaler setri tujuane sekolah sami, urip e penak “”Yang perempuan tidak di dapur saja, ya butuh sekolah biar sama seperti teman lainnya, punya pekerjaan ya baik. Karena tujuan laki-laki maupun perempuan bersekolah biar hidupnya sejahtera”

Sedangkan norma dan nilai gender dalam kategori sedang adalah persepsi atau anggapan baik perempuan menduduki jabatan penting dengan skor rata-rata 2,4 (sedang). Kategori sedang berarti perempuan masih diragukan dalam menduduki jabatan tinggi seperti Kepala Desa, Gubernur, Walikota, hingga Menteri. Hal ini dikarenakan bahwa masyarakat masih menganggap laki-laki sebagai kepala keluarga dan pemimpin istri lebih pantas menduduki jabatan yang tinggi dibanding perempuan.

Tabel 20. Jumlah dan persentase responden menurut tingkat norma

| Tingkat Norma | Jumlah (orang) | Persentase (%) |
|---------------|----------------|----------------|
| Rendah | 0 | 0 |
| Sedang | 5 | 15.2 |
| Tinggi | 28 | 84.8 |
| Jumlah | 33 | 100.0 |

Sumber: Data Primer Diolah, 2018

Berdasarkan tabel 27 dapat diketahui sebaran kategori tingkat kepatuhan norma dan nilai berada pada kategori sedang dan tinggi dimana 15,2 persen dari responden memiliki tingkat kepatuhan norma dan nilai yang sedang. Dan 84,8 persen responden memiliki tingkat kepatuhan norma dan nilai yang tinggi. Dari keseluruhan hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan kekuatan norma dan nilai berada pada kategori tinggi. Hal ini dapat diketahui dari data total rata-rata skor keseluruhan komponen norma dan nilai . Skor rata-rata keseluruhan

komponen norma dan nilai sebesar 21,06 yang berarti kepatuhan akan norma dan nilai oleh perempuan berada pada kategori tinggi.

5.4.3 Jaringan (*Network*)

Unsur modal sosial yang juga diteliti selain kepercayaan dan norma adalah Jaringan (*network*). Merujuk pada Damsar (2009) bahwa jaringan adalah hubungan antara satu dengan yang lain dan bagaimana ikatan afiliasi melayani baik sebagai pelicin dalam memperoleh sesuatu yang dikerjakan sebagai jembatan dan perekat hubungan satu sama lain. Jaringan tersebut memfasilitasi terjadinya komunikasi dan interaksi, memungkinkan tumbuhnya kepercayaan dan memperkuat kerjasama. Pada penelitian ini jaringan yang dilihat merupakan jaringan yang terbentuk di dalam LKDPH dan dengan Perhutani. Tingkat jaringan diukur dengan saling mengenalnya anggota LKDPH dan juga LKDPH dengan Perhutani. Selain itu jaringan yang diteliti pada jaringan pendukung program PHBM yaitu jaringan antara pesanggem dengan lembaga desa dan pemerintah desa. Pengukuran dilakukan dengan melihat bentuk dukungan dari lembaga dan pemerintah desa dalam terhadap pesanggem pada program PHBM.

Tabel 21. Skor pada Setiap Indikator Jaringan

| Indikator jaringan | Rata-rata skor | Kategori |
|--------------------------|----------------|---------------|
| Mengetahui perhutani | 2.0 | Sedang |
| Mengetahui LKDPH | 2.6 | Tinggi |
| Dukungan lembaga desa | 2.3 | Sedang |
| Dukungan pemerintah desa | 2.5 | Tinggi |
| Total | 9.4 | Tinggi |

Sumber: Data Primer Diolah, 2018

Dari tabel 28 dapat diketahui bahwa tingkat jaringan antara perempuan dengan pihak perhutani memiliki tingkat jaringan sedang ditunjukkan perolehan skor rata-rata sebesar 2,0. Hal ini dikarenakan pesanggem perempuan tidak mengenal pihak perhutani secara menyeluruh. Pernyataan ini ditanggapi oleh Ibu ISL :

“*lek ambek perhutani yo akeh sg kenal mas lek mandor ambek PL e , tapi lek mantri opo wong nduwuran yo gak kenal soale ganti-ganti. Sing kenal ambek ngono iku yo mek pengurus e tok. Lek wong koyok ngene ae yo kenal ambek mandor ambek PL e singg roto-roto wong asli Tambakasri dewe mas*” “kalau sama pihak perhutani ya banyak yang kenal seperti sama mandor dan Petugas Lapangan nya, tapi kalau mantri atau pejabat perhutani ya tidak banyak karena sering berganti. Yang kenal sama pejabat perhutani ya pengurusnya saja, kalau

pesanggem seperti ya Cuma sama mandor dan petugas lapang yang asli desa ini saja”

Tingkat jaringan dengan pihak pengurus LKDPH memiliki tingkat jaringan yang tergolong tinggi artinya saling mengenal antara perempuan dengan pengurus LKDPH . Hal ini dapat dilihat dari perolehan rata-rata skor sebesar 2,6. Yang artinya saling mengenalnya pihak yang terlibat dalam PHBM yaitu pengurus dan anggota. Perempuan sebagai sebagai pesanggem juga termasuk sebagai masyarakat desa hutan di Desa Tambakasri terbiasa menjalin hubungan baik, hal ini berdampak pada interaksi yang terjalin antara masyarakat dengan masyarakat dan juga perhutani. Hal tersebut diperkuat oleh pernyataan ibu WGR :

“.....urip ten ndeso ngeten niki sg penting podo percados e, urip rukun ayem mboten geheran kalih tanggi“(...hidup di desa seperti ini yang terpenting adalah saling percaya, hidup rukun, sejahtera tidak bermusuhan dengan tetangga)

Tingkat jaringan dengan lembaga desa termasuk dalam kategori sedang hal tersebut dapat diketahui dari perolehan skor rata-rata sebesar 2,3. Tingkat jaringan dengan lembaga desa masih belum terjalin maksimal karena kerjasama yang dirasakan oleh responden masih kurang maksimal apabila mengenai kelompok pesanggem PHBM. Tingkat jaringan dengan pemerintah desa termasuk dalam kategori tinggi dengan perolehan rata-rata skor sebesar 2,5 . Tingginya tingkat jaringan dengan pemerintah desa berkaitan bahwasanya pemerintah desa sebagai fasilitator fisik ataupun nonfisik bagi keperluan pesanggem. Antara lain pembangunan jalan menuju lahan tetelan yang sudah hampir merata semua desa, lalu keperluan responden dalam mengurus administrasi, sehingga pemerintah desa, LKDPH dan masyarakat bersinergi untuk bahu membahu mencapai kesejahteraan bersama.

Tabel 22. Jumlah dan persentase responden menurut tingkat jaringan

| Tingkat Jaringan | Jumlah (orang) | Persentase (%) |
|------------------|----------------|----------------|
| Rendah | 1 | 3.0 |
| Sedang | 16 | 48.5 |
| Tinggi | 16 | 48.5 |
| Jumlah | 33 | 100.0 |

Sumber: Data Primer Diolah, 2018

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, pada tabel 29 dapat diketahui bahwa tingkat jaringan yang dimiliki secara keseluruhan berada pada

kategori tinggi dengan perolehan rata-rata dari total skor semua komponen yaitu 9,42. Karena setiap pesanggem memiliki jiwa sosial yang tinggi. Jiwa sosial yang tinggi akan mendorong kerjasama dan saling mendukung untuk meningkatkan kemampuan pesanggem dalam berusahatani. Hasil penelitian menunjukkan bahwa refleksi dari partisipasi dalam jaringan sosial merupakan terjadinya interaksi interaksi sesama anggota hingga interaksi dengan pihak luar. Interaksi-interaksi tersebut dapat menjadi dorongan bagi perempuan untuk dapat mengembangkan kemampuan dalam berusahatani menjadi lebih baik lagi.

Sebaran kategori tingkat jaringan yang dimiliki dominan pada kategori sedang dan tinggi sedangkan hanya 1 orang responden memiliki tingkat jaringan yang rendah. Kategori tingkat jaringan yang tinggi dan sedang jumlahnya sama, yaitu sebanyak 16 orang dengan persentase sebesar 48,5 persen. Tingkat jaringan pada kategori rendah sebanyak 1 orang dengan persentase sebesar 3,0 persen. Rendahnya tingkat jaringan tersebut dikarenakan letak tempat tinggal yang jauh dari pusat desa dan merupakan warga yang terhitung masih baru, sehingga masih terbatas akses pada jaringan.

5.4.4 Tingkat modal sosial

Modal sosial merupakan komponen penting dalam kehidupan bermasyarakat. Modal sosial dalam penelitian membahas kepercayaan, norma nilai dan jaringan. Pengukuran modal sosial dilihat dari kepercayaan yang terbentuk antara anggota, pengurus LKDPH dan dengan pihak Perhutani, norma yang di dalamnya terdapat peraturan yang harus ditaati, dan jaringan yang terbentuk dari LKDPH Wono Mulyo beserta Perhutani. Berdasarkan hasil penelitian secara umum modal sosial berada pada kategori tinggi. Data modal sosial keseluruhan dapat dilihat dalam Tabel 30.

Tabel 23. Skor pada Setiap Indikator Modal Sosial

| Indikator modal sosial | Rata-rata skor | Kategori |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------|
| Kepercayaan | 12.5 | Tinggi |
| Norma dan Nilai | 21.1 | Tinggi |
| Jaringan | 9.4 | Tinggi |
| Total | 43 | Tinggi |

Sumber: Analisis data primer, 2018

Tabel 30 menunjukkan bahwa semua indikator modal sosial yaitu kepercayaan, nilai norma, dan jaringan menunjukkan berkategori tinggi. Kepercayaan, nilai norma, dan jaringan semua termasuk tinggi. Tingginya skor pada tingkat kepercayaan, ketaatan nilai norma, dan eratnya jaringan antar pesanggem menyebabkan tingkat modal sosial yang dimiliki termasuk dalam kategori tinggi.

Tabel 24. Jumlah dan persentase responden menurut tingkat modal sosial

| Tingkat Modal Sosial | Jumlah (orang) | Persentase (%) |
|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Rendah | 0 | 0.0 |
| Sedang | 5 | 15.2 |
| Tinggi | 28 | 84.8 |
| Jumlah | 33 | 100.0 |

Sumber: Data Primer Diolah, 2018

Tabel 31 menunjukkan bahwa mayoritas memiliki modal sosial yang tergolong tinggi dengan persentase sebesar 84,8 persen. Sedangkan modal sosial dalam kategori sedang sebesar 15,2 persen. Tingginya tingkat modal sosial yang dimiliki perempuan dikarenakan interaksi yang terjalin sehingga menimbulkan rasa percaya dengan anggota dan pihak perhutani. Pengetahuan dan ketaatan pada norma nilai pada program PHBM, norma nilai adat dan norma gender yang ditanggapi secara positif oleh perempuan desa Tambakasri. Hal ini dikarenakan terdapat norma dan aturan pasti yang telah disepakati bersama oleh anggota dengan pihak perhutani. Norma dan aturan yang berlaku pada PHBM dan masyarakat dirasa tidak memberatkan dan dijalankan secara sukarela oleh masing-masing pihak. Selain itu norma pada gender yang baik dalam artian sikap dan kesadaran masyarakat bahwa laki-laki dan perempuan bisa disejajarkan dalam akses kontrol terhadap informasi, pendidikan dan sumberdaya lainnya.

5.5 Tingkat Partisipasi Perempuan Pesanggem dalam Program PHBM

Partisipasi dalam program PHBM memiliki rangkaian kegiatan yang didalamnya melibatkan masyarakat pengolah lahan (*pesanggem*) dalam pengelolaan hutan. Pada pelaksanaannya, program PHBM dimulai dari kegiatan perencanaan, setelah itu kegiatan pelaksanaan, pemanfaatan dan monev (monitoring dan evaluasi). Rangkaian kegiatan ini dilaksanakan oleh semua pesanggem pemilik lahan tetelan, tidak terkecuali laki-laki dan perempuan sebagai pengelola masing-masing lahan. Tetapi partisipasi perempuan dalam beberapa

rangkaian program masih rendah karena keterlibatannya dalam program dianggap rendah dan tidak disertakan sepenuhnya oleh LKDPH maupun Perhutani, padahal pada dasarnya kegiatan perempuan pada kegiatan produktif yaitu pengelolaan lahan hutan sama besarnya dengan laki-laki. Oleh karena itu untuk mengetahui besarnya partisipasi perempuan pada tiap rangkaian program, maka akan disajikan dalam bahasan berikut ini.

5.5.1 Perencanaan Program PHBM

Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) dimulai dengan tahap perencanaan. Tahap ini terdiri dari pelaksanaan sosialisasi program, pembentukan KTH (Kelompok Tani Hutan) dan LKDPH (Lembaga Kemitraan Desa Pengelola Hutan), kegiatan negosiasi dan penandatanganan kontrak. Tahap sosialisasi merupakan tahap pengenalan dan pemahaman program PHBM kepada masyarakat. Kegiatan sosialisasi di Desa Tambakasri telah dilaksanakan sebanyak 3 kali. Pelaksanaan sosialisasi dimulai pada tahun 2005, 2006, dan tahun 2007. Pada tahun itu juga pembentukan KTH dan LKDPH "Wono Mulyo" dibentuk. Pembentukan ini bertujuan untuk komunikasi antara pihak perhutani dan pesanggem maupun sebaliknya. Tujuan lain dari pembentukan tersebut adalah untuk kemudahan proses negosiasi antara perhutani dan pesanggem. Negosiasi waktu itu dilakukan untuk menentukan jenis tanaman yang boleh dibudidayakan pada lahan tetelan, pendaftaran areal lahan, dan penentuan pola tanam.

Kesepakatan dalam pemilihan tanaman saat itu adalah kopi karena beberapa pertimbangan yaitu hasil yang menjanjikan, tidak memerlukan pengolahan yang intensif, pemasaran yang jelas dan sesuai dengan potensi lahan di Desa Tambakasri. Berdasarkan negosiasi yang telah dilakukan terdapat beberapa perjanjian, yaitu waktu kontrak bagi pesanggem adalah 5 tahun dan bisa diperbarui tiap 5 tahunnya. Setelah itu untuk penandatanganan kontrak diwakili oleh Ketua KTH atau Pokmas dari masing-masing kelompok yang ditentukan. Pada kegiatan penandatanganan bukan berarti pesanggem tidak dilibatkan tetapi hanya melaporkan luas lahan yang dikuasai sebagai tanda persetujuan memperpanjang kontrak. Setelah itu perjanjian atas sistem bagi hasil atau *sharing* antara pesanggem dengan perhutani. Kesepakatan banyaknya *sharing* antara pesanggem

dan pihak perhutani sebesar 20% untuk pihak perhutani dan 80% untuk pesanggem.

Tabel 25. Skor rata-rata indikator perencanaan

| Indikator perencanaan | Rata-rata skor | Kategori |
|------------------------------|-----------------------|-----------------|
| Kehadiran rapat | 1.4 | Rendah |
| Pemberian saran | 1.2 | Rendah |
| Negosiasi | 1.2 | Rendah |
| Perjanjian | 1.7 | Sedang |
| Total | 5.5 | Rendah |

Sumber: Data Primer Diolah, 2018

Pada Tabel 32 menunjukkan bahwa partisipasi perempuan pada kegiatan perencanaan program sangatlah rendah. Rendahnya partisipasi perempuan pada tahap perencanaan mungkin disebabkan karena perempuan yang jarang dilibatkan secara penuh dalam program, dan juga undangan yang disebar tidak merata ditujukan untuk laki-laki dan perempuan yang menjadi pesanggem. Sehingga kegiatan perencanaan tidak banyak diikuti oleh perempuan. Hal lain penyebab rendahnya partisipasi perempuan dalam perencanaan adalah kegiatan perencanaan yang hampir seluruhnya adalah kegiatan rapat atau pertemuan. Pertemuan biasanya ditujukan langsung kepada kepala rumah tangga, sehingga banyak yang beranggapan bahwa pertemuan cukup diwakilkan oleh laki-laki saja sebagai kepala rumah tangga. CGIAR (2013) menyatakan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan yang melibatkan partisipasi gender, pemilihan waktu sangat mempengaruhi kehadiran peserta. Waktu yang dijadwalkan harus memungkinkan bagi laki-laki dan perempuan dapat menghadirinya. Kenyataan yang terjadi di Desa Tambakasri waktu pertemuan yang seringkali dilakukan di malam hari, maka perempuan merasa enggan untuk mengikuti kegiatan perencanaan dan lebih sibuk melakukan kegiatan produktif ataupun memilih untuk beristirahat.

Pada tahap perencanaan program, partisipasi perempuan terbesar dan mempunyai skor rata-rata keseluruhan tertinggi adalah proses perjanjian yaitu 1,7 termasuk dalam kategori sedang. Selanjutnya adalah kehadiran dalam rapat dengan skor rata-rata 1,4. Pada pemberian saran dan negosiasi perempuan saat rapat mendapat skor 1,2 termasuk dalam kategori rendah. Karena pada kegiatan ini akses dan kontrol perempuan dalam pengambilan keputusan tidak sebesar kekuasaan laki-laki sebagai kepala rumah tangga. Pada tingkat jaringan kelompok tani hutan, hanya sebagian kecil perempuan yang terlibat dalam kelompok tani

hutan sehingga menyebabkan tingkat partisipasi perempuan dalam tahap perencanaan tergolong rendah.

Faktor lain dari rendahnya partisipasi tahap perencanaan adalah tidak adanya perempuan yang memberikan saran ataupun pendapat. Hal ini menyebabkan lemahnya aspirasi perempuan dalam menyampaikan pendapat. (Tanjung et al. 2017) kurangnya keikutsertaan masyarakat anggota pengelola terutama pada level bawah (grass root) dalam berdiskusi dan menyampaikan aspirasi mengakibatkan lebih rendahnya tingkat partisipasi mereka dalam aktivitas pelaksanaan kegiatan.

Tabel 26. Jumlah dan persentase responden menurut tingkat perencanaan

| Tingkat perencanaan | Jumlah (orang) | Persentase(%) |
|----------------------------|-----------------------|----------------------|
| Rendah | 27 | 81.8 |
| Sedang | 4 | 12.1 |
| Tinggi | 2 | 6.1 |
| Jumlah | 33 | 100 |

Sumber: Data Primer Diolah, 2018

5.5.2 Pelaksanaan program PHBM

Tahap pelaksanaan program terdiri dari pelaksanaan program didalam kelompok dan pelaksanaan program dilapangan. Pelaksanaan program dalam kelompok berisi kegiatan pertemuan rutin antara anggota kelompok (pesanggem) dengan pengurus kelompok. Pertemuan ini bertujuan untuk saling berbagi informasi antar anggota, menyampaikan pendapat, atau menyampaikan kesulitan yang ditemui sehingga dapat saling membantu satu sama lain.

Pertemuan rutin kelompok tani hutan dijadwalkan setiap bulan sekali, namun pada kenyataannya kegiatan pertemuan tersebut tidak dilakukan setiap bulan. Tidak dilakukannya pertemuan rutin tersebut biasanya terhalang musim-musim kegiatan tanam hingga panen kopi, cengkeh ataupun pisang, sehingga petani disibukkan mengurus kegiatan taninya dan tidak menghadiri pertemuan rapat. Maka dari itu pengurus LKDPH menyesuaikan waktu yang tepat untuk menghindari waktu dimana petani berhalangan hadir karena kegiatan tani tersebut. Alasan lain karena tidak selalu di setiap bulan ada informasi atau hal-hal yang perlu di rundingkan dengan kelompok. Tetapi jika pertemuan rapat sifatnya mendesak maka pertemuan rapat dengan anggota akan dilakukan secepatnya.

Jumlah pertemuan rapat rutin di tahun 2017 sampai saat penelitian terhitung sudah dilakukan sebanyak 4 kali. Yang mana pertemuan terakhir membahas tentang keberlanjutan program PHBM yang akan digantikan oleh program Perhutanan Sosial. Sehingga pada rapat tersebut banyak melibatkan seluruh anggota pesanggem baik laki-laki dan perempuan, tetapi tetap saja untuk jumlah kehadiran rapat, jumlah perempuan lebih sedikit dibanding dengan jumlah laki-laki yang hadir dalam rapat.

Pelaksanaan program di lapangan sama dengan pelaksanaan usaha tani yang dilakukan pesanggem dalam pengelolaan hutan. Pelaksanaan program di lapangan terdiri dari persiapan lahan, penanaman dan pemeliharaan, pemanenan dan pengamanan hutan. Pada Tabel 34 dapat dilihat bahwa partisipasi perempuan pada tahap pelaksanaan masih tergolong rendah. Namun partisipasi pada tahap pelaksanaan mengalami peningkatan dibanding dengan kegiatan pada saat tahap perencanaan.

Tabel 27. Skor pada Setiap Indikator Pelaksanaan

| Indikator pelaksanaan | Rata-rata skor | kategori |
|------------------------------|-----------------------|-----------------|
| Pertemuan rutin | 2.0 | Sedang |
| Persiapan lahan | 2.0 | Sedang |
| Perawatan tanaman | 2.5 | Tinggi |
| Pemanenan | 2.6 | Tinggi |
| Pengamanan hutan | 1.4 | Rendah |
| Total | 10.5 | Sedang |

Sumber : Data Primer Diolah, 2018

Partisipasi perempuan pada kegiatan pelaksanaan termasuk dalam kategori sedang dengan nilai skor rata-rata adalah 10,52. Peningkatan partisipasi perempuan pada tahap pelaksanaan karena partisipasi perempuan pada program di lapangan. Pada pelaksanaan persiapan lahan, perawatan dan pemanenan yang mempunyai skor masing-masing adalah 2,0 , 2,5 dan 2,6. Nilai tersebut termasuk dalam kategori tinggi sehingga terjadi peningkatan pada tahap pelaksanaan program.

Disisi lain penyebab penurunan partisipasi dalam pelaksanaan adalah dalam kegiatan penhamanan hutan dengan skor rata-rata 1,4 yang merupakan kategori skor rendah. Hal ini dikarenakan bahwa dalam pelaksanaan di lapang, perempuan tidak terlibat secara penuh dalam pengamanan hutan, sesuai dengan adat dan

stereotip bahwa perempuan cenderung pemalu, lemah lembut dan penakut. Hal ini sesuai menurut David & Brannon (1976) penafsiran bahwa perempuan dianggap lemah, emosional, tidak mampu memimpin, tidak rasional dan lain-lain dianggap sebagai bentuk cap-cap negatif (stereotype) gender. Sehingga untuk menjaga dan melakukan pengamanan hutan lebih banyak dilakukan oleh laki-laki.

Tabel 28. Jumlah dan persentase responden menurut tingkat pelaksanaan

| Tingkat Pelaksanaan | Jumlah (orang) | Persentase (%) |
|---------------------|----------------|----------------|
| Rendah | 3 | 9.1 |
| Sedang | 22 | 66.7 |
| Tinggi | 8 | 24.2 |
| Total | 33 | 100.0 |

Sumber: Analisa data primer, 2018

Dari tabel 35 dapat diketahui sebaran tingkat pelaksanaan responden pada program PHBM. Tingkat pelaksanaan pada program PHBM terbanyak pada kategori sedang yakni sebesar 66,7 persen. Tingkat pelaksanaan dengan tingkatan rendah yakni 9,1 persen. Sedangkan untuk kategori sedang yakni 24,2 persen.

5.5.3 Manfaat program PHBM

Partisipasi perempuan dalam kegiatan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) tentu menghasilkan timbal balik berupa manfaat bagi pelaksana. Perempuan menurut pembahasan di atas berpartisipasi cukup tinggi pada pelaksanaan, maka melalui partisipasi dalam pengelolaan hutan pastinya terdapat sebuah manfaat yang didapat. Pemanfaatan program PHBM dapat dikategorikan menjadi manfaat *cash* atau *non cash*. Manfaat *cash* berhubungan dengan penghasilan dan barang. Sedangkan manfaat *non cash* berupa manfaat ilmu dan pengetahuan yang didapat.

Batasan manfaat yang diteliti pada perempuan antara lain yaitu pemanfaatan sumber daya alam, manfaat informasi, pengetahuan, pelatihan dan manfaat pengembangan usaha dari hasil PHBM. Berdasar tabel 36 pemanfaatan perempuan terhadap sumber daya alam sangat tinggi dengan skor rata-rata 2,8. Hal ini dikarenakan dalam kehidupan petani hutan segala sesuatu untuk bertahan hidup berada di hutan, dengan kata lain kehidupannya sangat bergantung pada hutan. Hal ini didukung oleh pendapat Bu BSR :

“nggih lek kayu nggih mbendintene ngemanfaataken, damel urup-urup, damel masak. Lek damel sak bendinten nggih buncis nopo mawon sg wonten ten hutan. Lek bendinten tumbas nggeh mboten, soale ngeman duit e, tumbas bahan masakan nggih pendak lek badhe wonten slametan mawon” “ya kalau kayu setiap hari memanfaatkan untuk memasak. Kalau untuk keseharian ya tanaman buncis dan tanaman lainnya yang ada di hutan. Beli bahan makanan untuk tiap hari ya tidak, mengirit keuangan, beli bahan makanan ya tiap kalo ada acara slametan saja “

Tabel 29. Pemanfaatan Perempuan Terhadap Sumber Daya Alam

| Indikator pemanfaatan | Rata-rata skor | Kategori |
|------------------------------|-----------------------|-----------------|
| SDA hutan | 2.8 | Tinggi |
| Pengetahuan program | 1.4 | Rendah |
| Pengembangan usaha | 2.3 | Sedang |
| Total | 6.5 | Sedang |

Sumber: Data Primer Diolah, 2018

Pemanfaatan sumber daya alam berupa lahan untuk budidaya maupun berbagai tanaman yang tumbuh di hutan. Tanaman yang dimanfaatkan oleh masyarakat adalah tanaman yang dibudidaya dan juga tanaman yang tumbuh liar. Disamping itu juga memperoleh kayu bakar dan pakan ternak yang selalu tersedia di hutan. Dalam pemanfaatan ini perempuan dan laki-laki memiliki akses dan kontrol yang sama sehingga baik laki-laki dan perempuan mempunyai kesempatan sama untuk mengambil hasil hutan. Pemanfaatan hutan juga sebagai sumber pendapatan bagi warga sekitar yaitu memanfaatkan daun cengkeh untuk disuling, hasil suling merupakan pendapatan utama dan terbesar warga Desa Tambakasri. Sebab dari penyulingan masyarakat memperoleh pendapatan yang lumayan besar.

Pemanfaatan cengkeh merupakan alternatif sumber pendapatan yang diperoleh rumah tangga pesanggem selain menggantungkan dari pendapatan kopi. Pemanfaatan cengkeh berupa daun dapat menjadi sumber pendapatan sehari-hari dibanding dengan kopi yang hanya mendapat masukan pendapatan saat melakukan panen. Apalagi panen kopi merupakan tanaman yang dipanen hampir setahun, sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarga akan kesulitan apabila hanya mengandalkan komoditas kopi saja.

Potensi cengkeh yang ada di Desa Tambakasri membuat warga secara bersama atau swadaya membuat alat suling cengkeh berupa tungku masak yang kini jumlahnya mencapai 50 tungku yang dikelola masyarakat sendiri. Potensi

cengkeh ini membuka peluang baru bagi masyarakat sebagai buruh suling dan juga sebagai pengepul cengkeh yang membeli daun cengkeh sebelum olahan maupun daun cengkeh yang sudah menjadi minyak. Hasil cengkeh dari pengepul tersebut akan disetorkan kepada pedagang besar yang ada di daerah Dampit.



Gambar 7. Penyulingan daun cengkeh

Pemanfaatan selanjutnya adalah pemanfaatan pengetahuan berupa ilmu maupun ketrampilan dari adanya program. Untuk pemanfaatan ini perempuan masih terpinggirkan oleh akses dan kontrol laki-laki. Sebenarnya dengan adanya PHBM perempuan dapat mengetahui pengetahuan baru dalam pengelolaan hutan. Pelatihan berupa pembuatan kompos, penggemukan ternak, hingga pelatihan tentang koperasi. Bentuk pelatihan yang diselenggarakan perhutani merupakan upaya peningkatan sumberdaya manusia yang diperlukan dalam pembangunan hutan (Damayantanti, 2011). Manfaat tersebut dapat diperoleh melalui keikutsertaannya dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh LKDPH, LSM, Perhutani, dan *stakeholder* lainnya yang terlibat dalam PHBM .

Manfaat tersebut tidak dapat dirasakan perempuan karena keikutsertaan perempuan pada program pelatihan sangat rendah. Dapat diketahui dari skor rata-rata dalam pemanfaatan pengetahuan program yaitu 1,4 yang berarti rendah. Rendahnya akses dan kontrol dari perempuan dalam keanggotaan lah yang menyebabkan pemanfaatan pengetahuan bagi perempuan sangat rendah. Sebenarnya keanggotaan dan kepengurusan LKDPH terbuka bagi laki-laki maupun perempuan. Namun secara formal keanggotaan di LKDPH terdaftar atas nama

kepala keluarga atau suami. Jika ada perempuan yang terdaftar keanggotaannya itupun karena suaminya sudah meninggal (janda) ataupun suami yang jarang sekali terlibat dalam pengelolaan sehingga memilih mengikut sertakan istrinya saja dalam LKDPH.

Pemanfaatan pengembangan usaha yang diperoleh dari hasil PHBM menunjukkan rata-rata skor yang tinggi, rata-rata skor dalam pemanfaatan hasil untuk pengembangan usaha adalah 2,3. Pengembangan usaha tidak melihat dari sisi usaha perempuan atau laki-laki saja, tetapi pengembangan usaha yang sudah dirasakan oleh perempuan bisa dalam usaha perempuan itu sendiri maupun usaha dalam keluarga. Pengembangan usaha yang banyak dilakukan adalah untuk mengembangkan usaha tani dengan membeli saprodi berupa pupuk dan pestisida. Sedangkan untuk pengembangan usaha lain beberapa rumah tangga mengalokasikan untuk membeli ternak dan menyimpan modal digunakan untuk usaha menjadi pengepul komoditas pertanian besar salah satunya Bu Eni dan Bu wagirah sebagai pengepul krambil dan minyak cengkeh. Adapula yang mengalokasikan untuk usaha mandiri perempuan sebagai pengasil makanan olahan keripik pisang, talas atau *mbothe*. Secara keseluruhan tingkat partisipasi perempuan dalam pemanfaatan termasuk kategori sedang. Dengan nilai total 213 dan rata-rata total yaitu 6,25. Distribusi partisipasi pemanfaatan didominasi pada kategori sedang dan tinggi dengan persentase 39,4 persen dan 54,5 persen.

Tabel 30. Jumlah dan persentase tingkat pemanfaatan responden

| Tingkat pemanfaatan | Jumlah (orang) | Persentase (%) |
|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Rendah | 2 | 6.1 |
| Sedang | 13 | 39.4 |
| Tinggi | 18 | 54.5 |
| Total | 33 | 100.0 |

Sumber: Data Primer Diolah, 2018

5.5.4 Monitoring dan evaluasi program PHBM

Tahapan terakhir dari program PHBM adalah tahap Monitoring dan Evaluasi (Monev) . Kegiatan monev merupakan tahapan setelah dilakukannya perumusan indikator kelestarian sumberdaya hutan dalam sistem PHBM. Tujuan dilakukannya monev adalah untuk memeberikan penilaian secara obyektif dan lebih partisipatif dalam menjaga kelestarian hutan. Dengan demikian kegiatan

monev akan memberikan kesempatan dan dampak terhadap semua pihak dalam perbaikan dalam pengelolaan hutan.

Kaitanya dengan perbaikan pengelolaan hutan maka masyarakat sebagai pihak yang terlibat langsung dan memanfaatkan sumberdaya hutan akan mendapatkan kesempatan untuk memiliki *bargaining position* dengan pihak lain, mendapat pengetahuan dan informasi terkait dalam pengelolaan hutan di desa. Untuk perhutani sebagai pihak yang memiliki kewenangan untuk pengelolaan hutan, akan mendapatkan manfaat dalam melakukan pendekatan pada masyarakat dan pihak lain secara lebih intensif. Perhutani juga akan banyak mendapatkan masukan dan pembelajaran dari proses yang dilakukan. Selain itu untuk Pemerintah Desa dan juga pihak ke-3 yang ikut bekerjasama dalam pengelolaan hutan mendapatkan manfaat untuk melakukan proses pembelajaran, sehingga dapat menerapkan proses yang sama pada lembaga lain atau masyarakat lain.

Secara garis besar tujuan monev adalah meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mengetahui indikator pengelolaan hutan yang baik dan tetap lestari. Tetapi bagaimana tingkat partisipasi perempuan di Desa Tambakasri dalam kegiatan monev apakah sudah sesuai dengan tujuan partisipatif yang di rumuskan oleh perhutani. Mengingat perempuan selalu menjadi nomor dua daripada pihak laki-laki (*tersubordinasi*) dalam mengakases kegiatan yang berhubungan dengan kelompok.

Tabel 31. Skor tiap indikator monitoring dan evaluasi

| Indikator Monitoring dan evaluasi | Rata-rata skor | Kategori |
|-----------------------------------|----------------|---------------|
| Kehadiran rapat | 1.2 | Rendah |
| Pelaporan kegiatan | 2.2 | Sedang |
| Penyampaian kendala | 1.1 | Rendah |
| Total | 4.5 | Rendah |

Sumber: Data Primer Diolah, 2018

Dari Tabel 38 dapat diketahui bahwa partisipasi perempuan pada tahapan monev cenderung rendah. Hanya pada tahap pelaporan kegiatan tingkat partisipasinya sedang. Dari skor yang diperoleh pada mengikuti kegiatan rapat pertemuan monev skor rata-ratanya adalah 1.2 dan bernilai 1,1 pada penyampaian kendala. Angka ini termasuk dalam kategori rendah. Penyebabnya sama dengan partisipasi pada perencanaan dan pelaksanaan yaitu pelibatan perempuan dalam PHBM yang belum optimal. Keadaan tersebut membuat perempuan tidak kurang

berpartisipasi dalam program karena dampak dari pelibatan tersebut menurut Suprayitno (2008) bahwa pelibatan masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan dalam rangka pelestarian dan pengelolaan hutan merupakan merupakan hal mendasar untuk mengembangkan dan membangun kesadaran kritis masyarakat pengelola hutan.

Jika dilihat dari data yang dikumpulkan tidak semua perempuan tidak ikut serta dalam rapat karena beberapa dari rumah tangga yang mengikuti rapat adalah rumah tangga yang mengenal secara dekat atau memiliki hubungan kerabat dengan pengurus sehingga dalam kegiatan rapat sering hadir. Kegiatan penyampaian kendala juga termasuk dalam kategori rendah, hal tersebut di karenakan perempuan jarang sekali menyampaikan aspirasi ataupun pendapat dalam kegiatan-kegiatan rapat. Hal ini dikarenakan kegiatan monitoring dan evaluasi sering dilakukan hanya oleh pengurus. (Tanjung et al., 2017) Rendahnya partisipasi dalam kegiatan monitoring dan evaluasi disebabkan oleh beberapa hal, terutama jarang nya mengadakan kegiatan bersama. Kegiatan monitoring dan evaluasi pun hanya dilakukan bersama pengurus inti, seperti ketua, wakil ketua, bendahara, sekretaris bersama Wali Nagari

Tabel 32. Jumlah dan persentase tingkat monitoring dan evaluasi responden

| Tingkat monitoring dan evaluasi | Jumlah | Persentase |
|---------------------------------|-----------|--------------|
| Rendah | 21 | 63.6 |
| Sedang | 11 | 33.3 |
| Tinggi | 1 | 3.0 |
| Total | 33 | 100.0 |

Sumber: Data Primer Diolah, 2018

Sebaran partisipasi perempuan dalam tahap monev dalam tabel 39 didapatkan hasil bahwa partisipasi dalam monev cenderung rendah dan sedang, persentase kategori perempuan yang berpartisipasi rendah adalah 63,6 persen dan yang berpartisipasi sedang adalah 33,3 persen. Sedangkan yang berpartisipasi tinggi sebesar 3,0 persen. Secara keseluruhan tingkat partisipasi dalam monev berdasarkan skor rata-rata semua kegiatan adalah 4,52. Skor ini masih tergolong dalam kategori rendah.

5.5.5 Tingkat Partisipasi Perempuan dalam program PHBM

Tingkat partisipasi keseluruhan merupakan gabungan antara partisipasi dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan Monitoring dan evaluasi. Pada tingkat perencanaan partisipasi perempuan adalah rendah, pada tahap pelaksanaan dan pemanfaatan adalah sedang, dan pada tahap monev adalah rendah. Berikut skor tiap tahapan partisipasi pada tabel 40.

Tabel 33. Skor tiap indikator tingkat partisipasi responden

| Indikator tingkat partisipasi | Rata-rata skor | Kategori |
|-------------------------------|----------------|---------------|
| Perencanaan | 5.5 | Rendah |
| Pelaksanaan | 10.5 | Sedang |
| Manfaat | 6.5 | Tinggi |
| Monitoring evaluasi | 4.5 | Sedang |
| Rata-rata | 26.9 | Sedang |

Sumber: Data Primer Diolah, 2018

Sedangkan sebaran tingkat partisipasi dapat dilihat pada tabel 40. Dari tabel tersebut diketahui sebaran tingkat partisipasi perempuan dalam PHBM. Sebanyak 30,3 persen dalam kategori rendah, 48,5 persen responden dalam kategori sedang, dan 21,2 persen responden dalam kategori tinggi. Secara keseluruhan tingkat partisipasi memperoleh skor rata-rata sebesar 26,9. Skor tersebut menunjukkan bahwa partisipasi perempuan dalam program PHBM tergolong sedang.

Tabel 34. Jumlah dan persentase tingkat partisipasi responden

| Kategori | Frekuensi | Persentase |
|----------|-----------|------------|
| Rendah | 10 | 30.3 |
| Sedang | 16 | 48.5 |
| Tinggi | 7 | 21.2 |
| | 33 | 100.0 |

Sumber: Data Primer Diolah, 2018

Tabel 41 menjelaskan sebaran partisipasi perempuan dalam kegiatan PHBM lebih banyak dalam kategori rendah dan sedang. Partisipasi dalam program tidak maksimal karena beberapa tahap dari program PHBM tergolong sangat rendah. Tanjung et al. (2017) menyatakan esensi dari program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) adalah partisipasi atau keterlibatan masyarakat dalam pemanfaatan sumberdaya hutan dan ikut serta dalam pengamanan dan penjagaan pelestarian hutan. Tetapi masih ditemukan implementasi program yang belum optimal karena kurangnya partisipasi

masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan diakibatkan seluruh kegiatan sudah ditentukan lebih dulu oleh Perhutani.

Kurang optimalnya partisipasi pada program PHBM memandakan belum adanya kesetaraan dalam program PHBM terhadap perempuan, padahal perempuan berperan cukup tinggi dalam pengelolaan sumberdaya hutan. Peran Perempuan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup menurut UU No. 32 Tahun 2009 peran perempuan dalam pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana menjadi agenda tahun 2006-2011 temu nasional perempuan, maka diharapkan ada keikutsertaan perempuan dalam pengambilan kebijakan terkait masalah pengelolaan lingkungan hidup.

Sebagaimana UU No. 32 Tahun 2009 bahwa peran perempuan dalam pengelolaan sumber daya alam penting dimasukkan karena perempuan berpotensi besar dalam menyukseskan pengelolaan maupun pelestarian sumber daya alam. Bila potensi perempuan ini dimanfaatkan maka akan membantu pelaksanaan program dan kegiatan pengelolaan sumberdaya alam di Indonesia. Selain itu prespektif keadilan gender penting untuk dimasukkan dalam kegiatan pengelolaan sumberdaya alam karena selama ini perempuan menjadi pihak yang dimarginalisasi. Hal ini sebagai akibat sistem patriarkis yang dianut oleh sebagian besar masyarakat Indonesia sehingga perempuan kurang mendapat kesempatan berperan serta dalam pengelolaan sumber daya alam.

5.6. Hubungan modal sosial dan tingkat partisipasi

Pada pembahasan menjelaskan mengenai modal sosial yang dimiliki perempuan pesanggem pada program PHBM. Modal sosial ini dilihat dari tingkat kepercayaan, pengetahuan dan ketaatan norma dan tingkat jaringan. Selanjutnya pada pembahasan ini menguraikan tingkat partisipasi yang di ukur melalui indikator partisipasi pada tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap pemanfaatan dan tahap monitoring dan evaluasi. Analisis yang dilakukan adalah analisis hubungan antara tingkat modal sosial dan tingkat partisipasi perempuan pesanggem. Uji yang dilakukan dengan menggunakan uji *Rank Spearman* dan tabulasi silang. Uji ini bertujuan untuk melihat ada atau tidaknya hubungan diantara variabel yang diuji. Uji Rank Spearman akan memunculkan 2 nilai yang digunakan untuk mengartikan hasil analisis. Nilai tersebut adalah signifikansi dan

nilai korelasi. Signifikansi pada Rank Spearman diketahui dari nilai *sig(2-tailed)* kurang dari alpha. Nilai korelasi yang menunjukkan kuatnya hubungan antara variabel diketahui dari nilai *Correlation Coefficient*. Merujuk pada Darmawan (2004), kekuatan hubungan diketahui dari nilai *Correlation Coefficient* dengan kriteria sebagai berikut :

1. 0,00 - 0,19 : Sangat lemah
2. 0,20 - 0,39 : Lemah
3. 0,40 – 0,59 : Sedang
4. 0,60 – 0,79 : Tinggi
5. 0,80 – 1 : Sangat tinggi

(Darmawan,2004)

5.6.1 Hubungan Tingkat Modal Sosial dengan tingkat partisipasi perempuan pesanggem

Tabel 42 menunjukkan jumlah dan persentase hubungan tingkat modal sosial dengan tingkat partisipasi. Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa tidak ada responden dengan tingkat modal sosial rendah pada tingkat partisipasi rendah, sedang dan tinggi. Pada tingkat modal sosial sedang dan tingkat partisipasi rendah memiliki persentase sebanyak 3,0 persen dengan jumlah sebanyak 1 orang. Pada tingkat modal sosial sedang dan tingkat partisipasi sedang memiliki persentase sebanyak 12,1 persen dengan jumlah responden sebanyak 4 orang. Dan tidak ada responden dengan modal sosial sedang dan partisipasi sedang artinya persentase sebanyak 0,0 persen.

Pada tingkat modal sosial tinggi dan partisipasi tinggi memiliki persentase sebanyak 27,3 persen dengan jumlah responden sebanyak 9 orang. Pada tingkat modal sosial tinggi dan partisipasi sedang memiliki persentase sebanyak 33,3 persen dengan jumlah responden sebanyak 11 orang. Sedangkan untuk tingkat modal sosial tinggi dan partisipasi tinggi memiliki persentase sebanyak 24,2 persen dengan jumlah sebanyak 8 orang.

Tabel 35. Jumlah dan Persentase Hubungan Tingkat modal Sosial Dengan Tingkat Partispasi

| No | Tingkat Partispasi | Tingkat modal Sosial | | | | | |
|-------|--------------------|----------------------|---|----------|------|----------|------|
| | | Rendah | | Sedang | | Tinggi | |
| | | Σ | % | Σ | % | Σ | % |
| 1 | Rendah | 0 | 0 | 1 | 3.0 | 9 | 27.3 |
| 2 | Sedang | 0 | 0 | 4 | 12.1 | 11 | 33.3 |
| 3 | Tinggi | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 8 | 24.2 |
| Total | | 0 | 0 | 5 | 15.2 | 28 | 84.8 |

Sumber: Data Primer Diolah, 2018

Tabel 42 menunjukkan bahwa tingkat modal sosial pada kategori sedang dan tinggi persentase terbesar pada kategori sedang yaitu 12,1 persen pada kategori tingkat modal sosial sedang dan 33,3 persen pada kategori tingkat modal sosial tinggi. Pada tingkat modal sosial tinggi dan tingkat partisipasi juga menunjukkan data sebagai berikut. Bahwa pada kategori tingkat modal sosial tinggi dan partisipasi memiliki persentase 27,3 persen dengan jumlah responden 9 orang, pada tingkat partisipasi sedang memiliki persentase 33,3 persen dengan jumlah responden sebanyak 11 orang, pada kategori tingkat partisipasi tinggi memiliki persentase 24,2 persen dengan jumlah responden 24,2. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa saat modal sosial tinggi tidak mempengaruhi partisipasi secara signifikan karena persentase atau jumlah orang yang berpartisipasi rendah 27,2 persen lebih besar daripada persentase jumlah orang pada tingkat partisipasi tinggi. Menunjukkan tidak ada pola hubungan yang begitu signifikan.

Dilain sisi dilihat dari penambahan jumlah responden pada tiap kategori tingkat modal sosial yang dimiliki terjadi peningkatan yaitu pada saat tingkat modal sosial rendah jumlah 0 persen, pada tingkat modal sosial sedang mengalami peningkatan yaitu sebanyak 15,2 persen dan pada tingkat tingkat modal sosial tinggi sebanyak 84,8 persen. Dapat dikatakan bahwa terjadi hubungan antara tingkat modal sosial dan tingkat partisipasi tetapi kekuatan hubungannya lemah. Hal ini didukung dengan hasil analisis uji *Rank Spearmann*. Pada uji *Rank Spearmann* yang didapat tingkat signifikansi lebih kecil dengan taraf kepercayaan sehingga hasil dari analisis bisa dipercaya atau diterima kebenarannya. Hasil menunjukkan bahwa nilai probabilitas pada tingkat kepercayaan yaitu 0,026 koefisien korelasi menunjukkan angka 0,387 yang artinya terdapat hubungan antara variabel dengan kekuatan hubungan lemah.

Correlation

| | | | Modal Sosial | Partisipasi |
|----------------|--------------|-------------------------|-------------------|-------------------|
| Spearman`s rho | Modal Sosial | Correlation Coefficient | 1.000 | .387 [^] |
| | | Sig. (2-tailed) | | .026 |
| | | N | 33 | 33 |
| | Partisipasi | Correlation Coefficient | .387 [^] | 1.000 |
| | | Sig. (2-tailed) | .026 | |
| | | N | 33 | 33 |

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed)

Hal tersebut menunjukkan bahwa pada variabel tingkat modal sosial dan tingkat partisipasi terdapat hubungan nyata tetapi kekuatan hubungannya lemah. Semakin tingginya tingkat modal sosial akan meningkatkan tingkat partisipasi tetapi sangat sedikit sekali bagi perempuan. Peningkatan partisipasi yang lemah ini dikarenakan terdapat hal lain yaitu bias posisi sosial menyebabkan partisipasi perempuan dalam PHBM tidak menyeluruh, anggota atau posisi perempuan sebagai pesanggem merupakan posisi sosial yang rendah, sehingga perempuan sebagai pesanggem terdapat keterbatasan dalam ikut serta dalam program PHBM karena kurangnya kapasitas SDM pesanggem itu sendiri, hal lain karena perempuan terbatas dalam kegiatan yang dilakukan dalam hal produktif dan reproduktif, sementara akses dan kontrol yang dimiliki untuk mengikuti atau ikut serta dalam program sangat rendah dibanding dengan laki. Tetapi apabila perempuan dilibatkan maka perempuan hanya mengikuti pendapat dari orang yang mempunyai pengetahuan lebih, dan pengetahuan lebih dimiliki orang yang posisi sosialnya lebih tinggi. Seperti hal yang disampaikan salah satu responden berikut RBT:

“aku ngono mek wong cilik mas, lek mek rapat yo kadang di undang kadang enggak, tapi lek gak di undang yo dikandani hasil rapat e nang kabeh anggotane karo KTH ne. Opomane aku wong cilik mas mek lulusan SD yo manut ae ambek sing luwih ngerti” . “Saya ini cuma orang kecil mas, kalau rapat kadang ya di undang kadang ya tidak, tapi kalau tidak di undang ya diberitahu hasil rapat oleh KTH ke anggotanya semua. Apalagi saya cuma orang lulusan SD jadi ya nurut aja sama yang lebih mengerti “

5.6.2 Peranan Modal sosial dalam peningkatan partisipasi dan pengaruh ketidakadilan gender

Partisipasi pada program PHBM dibedakan menjadi 2 jenis partisipasi yaitu partisipasi di lapang atau pada lahan tetelan dan partisipasi pada kelompok. Partisipasi di lapang berupa kegiatan ekonomi bagi keluarga pesanggem untuk mengelola lahan hutan sebagai sumber ekonomi dengan berusaha tani kopi dan cengkeh. Partisipasi di kelompok berupa keikutsertaan pesanggem dalam pertemuan kelompok, mengakses informasi, mengakses ilmu pengetahuan lewat pelatihan dan partisipasi dalam kelompok sebagai bentuk keberdayaan pesanggem untuk mengelola hutan sesuai peraturan secara mandiri.

Partisipasi pesanggem dalam program PHBM salah satunya didasari adanya modal sosial yang terbangun pada program tersebut. Modal sosial mendorong partisipasi aktif dari pesanggem untuk terlibat dalam program secara menyeluruh. Keterlibatan ini dikaitkan karena program PHBM merupakan program untuk menjaga kelestarian hutan berbasis ekonomi, sehingga tujuan program PHBM berorientasi ekonomi.

Peran modal sosial pada peningkatan partisipasi pesanggem diperkuat oleh paham yang dikembangkan oleh World Bank dengan menggunakan modal sosial didasari pada asumsi berikut yaitu (World Bank, 1998): (a) Modal sosial berada dalam seluruh keterkaitan ekonomi, sosial, dan politik, serta hubungan sosial (social relationships) mempengaruhi bagaimana pasar dan negara bekerja, dan sebaliknya pasar dan negara juga akan membentuk bagaimana modal sosial di masyarakat bersangkutan; (b) Hubungan yang stabil antar aktor dapat mendorong keefektifan dan efisiensi baik perilaku kolektif maupun individual; (c) Modal sosial dalam satu masyarakat dapat diperkuat, namun membutuhkan dukungan sumber daya tertentu untuk memperkuatnya; dan (d) Agar tercipta hubungan sosial dan kelembagaan yang baik, maka anggota masyarakat mesti mendukungnya.

Peran modal sosial pada peningkatan partisipasi diperkuat oleh pendapat Hasbullah (2006) yang berpendapat bahwa modal sosial ditopang oleh tiga komponen utama yaitu kepercayaan, nilai, dan jaringan. Ketiga komponen ini diperkuat oleh unsur-unsur yang salah satunya adalah partisipasi pada suatu jaringan. Partisipasi tersebut ditunjukkan oleh perempuan-perempuan Desa

Tambakasri yang ikut terlibat pada program PHBM. Partisipasi perempuan pada program memang belum sepenuhnya menyeluruh, dikarenakan faktor utama perempuan adalah untuk mencari tambahan penghasilan lewat sumber ekonomi yang disediakan oleh pemerintah berupa penguasaan lahan perhutani.

Faktor utama tersebut menguatkan bahwa perempuan yang terlibat dalam aktifitas ekonomi yang secara tidak langsung melibatkan perempuan untuk berpartisipasi dalam program PHBM. Sejalan dengan pendapat Puspitasari (2012) bahwa kesediaan perempuan untuk melibatkan diri dalam berbagai aktivitas sosial dari komunitas atau organisasi sosial tersebut menjadi peluang yang awalnya tidak pernah dikalkulasi secara ekonomi. Dengan kata lain, implikasi ekonomi dari partisipasi aktif perempuan usaha mikro baru dirasakan dampaknya setelah relasi sosial yang semakin intensif ditambah dengan kegiatan produktif.

Bentuk relasi sosial perempuan dapat digambarkan melalui penjelasan tiap unsur modal sosial perempuan pesanggem pada program PHBM. Unsur modal sosial pertama yaitu kepercayaan, kepercayaan menjadi kunci utama perempuan bersedia berpartisipasi pada program PHBM. Kepercayaan dapat dikatakan sebagai kunci utama karena pihak LKDPH dan perhutani menjamin lahan yang diberikan kepada pesanggem diserahkan secara penuh kepada pesanggem untuk diolah sesuai dengan peraturan. Penyerahan lahan kepada pesanggem tidak lain mewujudkan tujuan dari program yaitu memperhatikan keadaan ekonomi masyarakat sekitaran hutan, sehingga pesanggem perempuan bersedia berpartisipasi karena meyakini bahwa program tersebut memberikan keuntungan bagi para pesanggem.

Nilai dan norma yang pada program PHBM juga mendorong perempuan ikut serta dalam kegiatan PHBM. Nilai dan norma tersebut berupa peraturan dan nilai-nilai yang disepakati dan dipatuhi oleh pesanggem. Kesepakatan peraturan PHBM yang dirasa tidak memberatkan bagi pesanggem yaitu menjaga tegakan dan penyeteran *sharing profit* kopi sehingga pesanggem mau untuk berpartisipasi dalam program.

Jaringan pada modal sosial juga mendorong pesanggem berpartisipasi pada program, terbentuknya LKDPH sebagai lembaga yang mengatur berjalannya program sehingga program tersebut bisa dijalankan dan diikuti oleh pesanggem. Jaringan sebagai wadah bagi para pesanggem untuk bisa ikut serta pada program.

Jaringan yang ada sebagai penyalur informasi bagi pesanggem untuk bisa mempermudah kordinasi antara peserta program dan penyelenggara program.

Penjelasan unsur-unsur modal sosial tersebut semakin memperkuat bahwa modal sosial meningkatkan partisipasi. Sejalan dengan pendapat Cox (1995) yang mendefinisikan modal sosial sebagai suatu rangkaian proses hubungan antar manusia yang ditopang oleh jaringan, norma-norma, dan kepercayaan sosial yang memungkinkan efisiensi dan efektifnya koordinasi dan kerjasama untuk keuntungan dan kebajikan bersama. Dan pendapat Solow (1999) yang mendefinisikan, modal sosial sebagai serangkaian nilai-nilai atau norma-norma yang diwujudkan dalam perilaku yang dapat mendorong kemampuan dan kapabilitas untuk bekerjasama dan berkoordinasi untuk menghasilkan kontribusi besar terhadap keberlanjutan produktivitas.

Perlu dikaji kembali bahwa partisipasi perempuan pada program PHBM tersebut masih belum menyeluruh seperti yang disebutkan sebelumnya. Partisipasi perempuan seperti penjelasan sebelumnya merupakan partisipasi perempuan hanya karena orientasi ekonomi, dengan kata lain perempuan berpartisipasi hanya pada kegiatan program di lapang dan rendah pada aktifitas kelompok. Rendahnya aktifitas pada kelompok merupakan kegiatan-kegiatan seperti rapat kelompok, akses informasi dan pengetahuan. Kegiatan-kegiatan tersebut menggambarkan rendahnya partisipasi perempuan pada tahapan perencanaan dan tahap monitoring dan evaluasi.

Rendahnya partisipasi perempuan pada tahapan tersebut dapat diketahui dari analisis gender Harvard yang menganalisis profil aktifitas, akses, kontrol dan manfaat perempuan pada program PHBM. Profil aktifitas perempuan terbagi atas tiga peran (*triple role*) yaitu produktif, reproduktif dan sosial kemasyarakatan. Peran perempuan pesanggem Desa Tambakasri menunjukkan bahwa pada aktifitas produktif perempuan bekerja hampir setara dengan laki-laki pada pembagian tugas di ladang. Pada kegiatan reproduktif hampir semua pekerjaan reproduktif dikerjakan oleh perempuan, sedangkan pada sosial kemasyarakatan perempuan intensitasnya hampir setara dengan laki-laki. Ketiga aktifitas tersebut menunjukkan bahwa telah terjadinya beban ganda (*double burden*) pada perempuan. Beban ganda yang terjadi pada perempuan telah membatasi hak-hak perempuan dalam mengakses informasi dan pengetahuan akibat berlebihannya

beban kerja yang ditanggung dan akibatnya membatasi partisipasi perempuan pada program PHBM pada kegiatan-kegiatan rapat dan pelatihan.

Kontrol dan akses perempuan juga menghambat partisipasi perempuan pada program PHBM. Kontrol dan akses perempuan pesanggem pada sumberdaya dan pengambilan keputusan masih dalam tingkatan rendah daripada kontrol dan akses laki-laki sebagai kepala keluarga. Keadaan tersebut secara tidak langsung memposisikan posisi perempuan lebih rendah dari laki-laki. Posisi yang demikian menyebabkan ketidakadilan gender yaitu sub-ordinasi atau menomorduakan perempuan dibawah laki-laki, sehingga perempuan sesuai dengan stereotipe bahwa perempuan adalah lemah, pendiam dan pemalu. Sikap yang demikian menghambat partisipasi perempuan dalam penyampaian pendapat, saran, negosiasi pada tahap partisipasi perencanaan dan monitoring dan evaluasi.

Manfaat program yang didapat perempuan dari program PHBM lebih mendorong perempuan untuk berpartisipasi pada program PHBM. Manfaat program berupa penghasilan dari lahan tetelan yang ditanami kopi dan cengkeh. Penghasilan dari panen kopi dan cengkeh lebih mendorong perempuan berpartisipasi di lapang pada program PHBM.

VI. PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian yang dilakukan di Desa Tambakasri tentang modal sosial dan partisipasi perempuan pesanggem dalam program PHBM adalah sebagai berikut :

1. Aktifitas perempuan pada kegiatan produktif sedikit lebih rendah daripada laki-laki, aktifitas reproduktif didominasi secara keseluruhan oleh perempuan sedangkan aktifitas sosial kemasyarakatan dilakukan oleh laki laki dan perempuan secara seimban kecuali pada kegiatan yang sifatnya formal seperti kelompok tani laki-laki lebih dominan. Akses dan kontrol pada sumberdaya oleh perempuan masih lemah dibanding laki-laki sehingga pengambilan keputusan dan akses pada sumberdaya tertentu lebih didominasi oleh laki-laki
2. Tingkat modal sosial perempuan pada program PHBM secara keseluruhan termasuk tinggi dilihat dari unsur modal sosial yang ada. Kepercayaan, norma dan jaringan yang tergolong tinggi.
3. Tingkat Partisipasi perempuan pada kegiatan PHBM terlihat dari keterlibatannya dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan evaluasi program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahap perencanaan dan evaluasi program tergolong pada kategori rendah. Pada tahap pelaksanaan dan pemanfaatan program tergolong dalam kategori sedang.
4. Pada hubungan antara modal sosial dan partisipasi menunjukkan bahwa adanya hubungan nyata antara 2 variabel tersebut , keeratan hubungan anatar 2 variabel menunjukkan lemah. Hal ini menunjukkan bahwa meningkatnya modal sosial yang dimiliki masyarakat akan sedikit meningkatkan partisipasi perempuan

6.2 Saran

Berdasarkan hasil yang didapat dari penelitian mengenai modal sosial dan partisipasi perempuan pada PHBM di Desa Tambakasri terdapat beberapa hal yang bisa dijadikan saran dalam penelitian ini :

1. Harus ada upaya dari LKDPH agar dapat mengupayakan dan mencari cara lain agar dapat meningkatkan partisipasi perempuan dalam tahap perencanaan monitoring evaluasi
2. Bagi pemerintah dan Dinas Hutan dapat memberikan fasilitas berupa pelatihan kepada para anggota terkait pengelolaan hutan khususnya bagi perempuan sebagai objek utama dalam penelitian ini.
3. Menjaga modal sosial yang telah terbangun tetap baik dengan mempererat hubungan antara perhutani ,LKDPH dengan masyarakat sebagai pesanggem.



DAFTAR PUSTAKA

- Agusnawati. 2006. Peran Kaum Perempuan dalam Pengambilan Keputusan pada Masyarakat Pengelola Hutan Kemiri di Mario Pulana. *CIFOR. Governance Brief*, (28), 1–4.
- Anggita, T. 2013. Dukungan Modal Sosial Dalam Kolektivitas Usaha Tani Untuk Mendukung Kinerja Produksi Pertanian Studi Kasus : Kabupaten Karawang Dan Subang. *Jurnal Wilayah Dan Perencanaan Kota*, 24(3), 203–216.
- Arifandy, M. I., & Sihaloho, M. 2007. Effectiveness of Community Based Forest Managements Forest Resources Conflict Resolution. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, (3).
- Broidotti, Rossi, Ewa Charkiewicz, Sabine Hausler, Saskia Wieringa, 1995. *Women Environment and Sustainable Development: Toward a Theoretical Synthesis*. London: Zed Books.
- CGIAR. 2013. Gender in the CGIAR Research Program on Forests, Trees and Agroforestry: A strategy for research and action. Center for International Forestry Research (CIFOR), Bogor, Indonesia
- Cohen JM, Uphoff NT. 1997. Rural Development Participation: Concept and Measures For Project Design Implementation and Evaluation. New York: Rural Development Commite-Cornel University.
- Cox, Eva. 1995. *A Truly Civil Society*. Buku. Australian Broadcasting Corporation. Sydney. 84 hlm.
- Damayantanti, P. T. 2011. Upaya Pelestarian Hutan Melalui Pengelolaan Sumber-Daya Hutan Bersama Masyarakat. *Jurnal Komunitas*, Volume.3 No.1, Hal 70–82.
- Damsar dan Indrayani. 2009. Pengantar Sosiologi Ekonomi. Prenadamedia Group. Jakarta.
- Darmawan, D. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Fadilah, A. Z..2016. Hubungan Modal Sosial Dengan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (Phbm). Intitute Pertanian Bogor.
- Fakih, Mansour. 2008. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: INSISTPress.
- Fukuyama, F. 1992. *The End of History and The Last Man*. Buku. Free Press.
- Handayani, Trisakti,. Sugiarti. 2002. Konsep dan Teknik Penelitian Gender. UMM Malang. UMM Press
- Harsono, W. 2014. Jimpitan, Modal Sosial yang menjadi Solusi Permasalahan Masyarakat. *Jurnal Kebijakan & Administrasi Publik JKAP*, Volume 18

No.2, Hal 131–145.

- Hasbullah, J. 2006. *Sosial Capital (Menuju Keunggulan Budaya Manusia Indonesia)*. Buku. United Press. Jakarta. 169 hlm.
- Intan, S. 2014. Kedudukan Perempuan Jurnal Politik Profetik Tahun 2014. Jurnal Politik Profetik, Volume 3 Nomor 1.
- Kementrian Lingkungan Hidup.2003. *Gerakan Perempuan Peduli Lingkungan*.
Kupang : Yayasan PIKUL (Penguatan Institusi dan Kapasitas Lokal).
- Lesmana, D. 2005. Peranan Wanita dalam Pengambilan Keputusan Penerapan Teknologi Usaha Tani Salak Pondoh Nglumut. *EPP*, Volume 2 No.1, Hal 29–38.
- Lin, Nan. 2001. *Social Capital : A Theory of Social Structure and Action*. Cambridge. Cambridge University Press
- Nababan, E. J. K. 2016. Modal Sosial Pada Pengelolaan Dan Pelestarian Hutan Mangrove Di Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur. *Jurnal Sylvia Lestari*, 4(2), 89–100.
- Ngabdani M, Muryani C, Sudaryanto R. 2015. Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) di Desa Girimulyo Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi. *Jurnal GeoEco1* (1): 58–66
- Nugroho, Riant.D .2008. *Gender dan Strategi Pengarusutamaanannya di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nurhaeni, I. D. A., Utami, T., & Sudarwanto, S. 2009. Model Pengelolaan Lingkungan Hidup Berwawasan Gender untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik*, 13(2), 163–176.
- Paolisso M, Gammage S and L Casey. 1999. Gender and Household-Level Responses to Soil Degradation in Honduras. *Human Organization* Vol. 58, No. 3: 261-273. The Society for Applied Anthropology.
- Perhutani, 2018. Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat <http://bumn.go.id> diakses tanggal 12 Desember 2017
- Prastiti, C. 2012. Women ' S Participation in Mangrove Conservation At Pasar Banggi Village. *Perikanan*, 14(1), 32–45.
- Pratama, Y. P. 2016. Jurnal Dinamika 2016. *Ekonomi Pembangunan*, 8(29), 2016.
- Puspitasari, D. C. 2012. Modal Sosial Perempuan dalam Peran Penguatan Ekonomi Keluarga. *Jurnal Pemikiran Sosilogi*, Vol.1 No(2), 69–80.
- Putnam, R. D. 1993. *Making democracy work. Making Democracy Work : Civic Traditions in Modern Italy*. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Putra, B. F. 2016. Analisis hubungan modal sosial terhadap keberdayaan petani karet. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Pertanian*, 03(01), 1–11. <https://doi.org/10.1007/7081>
- Rahayu, W. K. 2016. Gender dalam Kebijakan Publik, *Jurnal Analisis Kebijakan*

dan Pelayanan Publik 2(1), 93–108.

- Rahmawati, F. 2013. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akses Dan Kontrol Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Pengelolaan Sumberdaya Hutan Rakyat (Studi : Desa Gunung Bunder II , Kecamatan Pamijahan , Kabupaten Bogor , Provinsi Jawa Barat). *Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 241–258.
- Ruswita T et al. 2005. Agroforestry/Pertanian Berkelanjutan dengan Input Luar Rendah. Proyek Kerjasama CIDA Canada–CARE International Indonesia
- Saleh, M. 2014. Partisipasi Perempuan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, 6. No. 2(Musawa), 236–259.
- Santoso, I. 2007. Perubahan Budaya Petani Tepian Hutan Dalam Pengembangan Pengelolaan Sumberdaya Hutan Berbasis Modal Sosial. *Jurnal Pembangunan Pedesaan*, 7(1), 10–18.
- Shiva, Vandana dan Maria Mies, 2005. *Ecofeminism, Perspektif Gerakan Perempuan dan Lingkungan*. (Terjemahan: Kelik Ismunanto dan Lilik). Yogyakarta: Ire Press
- Singarimbun, Masri dan Effendi, Sofyan. 1995. Metode Penelitian Survei, Edisi Revisi. PT. Pustaka LP3ES, Jakarta
- Situmorang, R. O. P. 2013. Isu-Isu Gender Dalam Pengelolaan Hutan Dan Lahan Studi Kasus: Peran Isu-Isu Gender Pada Masyarakat Batak di Sub DAS Arun Kabupaten Samosir, Inovasi, Vol (11) No. 3: 192-205.
- Sudjana. 2000. *Metode Statistik*. Penerbit Tarsito. Bandung. *Sumber Daya Alam Sebuah Panduan Analisis*. Wandita G, pengantar.
- Suharjito, D., Sundawati, L., Suyanto, & Utami, S. R. 2003. Aspek Sosial Ekonomi dan Budaya Agroforestri (Bahan Ajaran Agroforestry 5).CIFOR
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Suprayitno AR. 2008. Pelibatan Masyarakat Lokal: Upaya Memberdayakan Masyarakat Menuju Hutan Lestari. *Jurnal Penyuluhan* 4 (2) : 135 – 138
- Suwartapradja, O. S. 2008. Kolektivitas Tenaga Kerja Dalam Pertanian : Studi Tentang Implikasi Curahhan Tenaga Kerja Terhadap Pendapatan Petani di Kabupaten Sumedang. *Jurnal Kependudukan Padjajaran*, 10(1), 34–49.
- Solow, R. M. 1999. Notes Sosial Capital and Economic Performance. In Partha D., Ismail S.,
- Tanjung, N. S., Sadono, D., & Wibowo, C. T. 2017. Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Nagari di Sumatera Barat. *Jurnal Penyuluhan*, 13(1),
- Theresia. 2008. Efektivitas Pengelolaan Hutan Kolaboratif antara Masyarakat dengan Perum Perhutani (Skripsi). Bogor ID: Fakultas Kehutanan.
- Tobing M, Nursahaya, Armiyati S. 2005. *Materi Pendukung Modul Pelatihan Analisis Gender*. Mungguro DW, Kismadi B, Gaban F, Fransisika I, editor.

Proyek Kerjasama CIDA (Canadian International Development Agency) – CARE International Indonesia.

World Bank.1998. "The Initiative on Defining, monitoring and Measuring Social Capital: Text of Proposal Approved for Funding". Social Capital Initiative Working Paper No. 2. The World Bank, Social Development Family, Environmentally and Socially Sustainable Development Network. June 1998. (Dalam <http://www1.worldbank.org/prem/poverty/scapital/wkrppr/sciwp2.p> 2 Juli 2018)

Yani, D. E. 2012. Pola pengambilan keputusan wanita tani pada usahatani sayuran sentra sayuran dataran tinggi. *Jurnal Matematika, Sains, Dan Teknologi*, 13(2), 107–117.

Yuliati, Yayuk, 2014. *Model Pemberdayaan Perempuan Tani di Kawasan Hutan*. Malang: UB Press.



DOKUMENTASI



Kegiatan di Posyandu



Penyulingan daun cengkeh



Pemasakan daun cengkeh



Pengangkutan pakan kambing



Plakat LKDPH Wono Mulyo



Kegiatan prtil cengkeh



Mengantar anak sekolah



Mengangkut bibit pisang



Bersama keluarga responden
Ibu Istilah



Pengangkutan pakan ternak dari
lahan tetelan



Buruh tani perkebunan Glagaharum



Kegiatan di Posyandu





Pemerintah Desa Tambakasri



LAMPIRAN



Lampiran. 2 Karakteristik Responden

| No | Nama Responden | Umur | Pendidikan | Pekerjaan Utama | Pekerjaan Sampingan | Status | Penguasaan Lahan (Ha) |
|----|----------------|------|----------------|----------------------------|------------------------|---------|-----------------------|
| 1 | Busari | 61 | Tidak Tamat SD | petani | buruh tani | Menikah | 0.75 |
| 2 | Harti | 43 | SD | petani | buruh tani | Menikah | 2 |
| 3 | Misenim | 53 | Tidak Tamat SD | petani | buruh tani | Menikah | 0.5 |
| 4 | Siami | 38 | SD | petani | buruh tani | Menikah | 1 |
| 5 | Buini | 47 | SMP | Pedagang Peralatan Sekolah | petani | Menikah | 0.52 |
| 6 | Mariyah | 45 | Tidak Tamat SD | Petani | Peternak | Menikah | 2 |
| 7 | Sumariyah | 49 | Tidak Tamat SD | petani | Pedagang Kripik Pisang | Menikah | 1 |
| 8 | Painem | 53 | Tidak Tamat SD | petani | Ibu Rumah Tangga | Menikah | 1 |
| 9 | Wagirah | 50 | SD | petani | pedagang hasil bumi | Janda | 1 |
| 10 | Istilah | 44 | SMP | Petani | Buruh tani | Menikah | 0.75 |
| 11 | Sutiyem | 50 | SD | Buruh Tani | Ibu Rumah Tangga | Menikah | 0.5 |
| 12 | Mursilah | 43 | SD | petani | Ibu Rumah Tangga | Menikah | 0.5 |
| 13 | Endar | 42 | SMP | Petani | Pedagang Hasil Bumi | Menikah | 1 |
| 14 | Ribut | 60 | Tidak Tamat SD | Buruh Tani | Ibu Rumah Tangga | Menikah | 0.75 |
| 15 | Sutinem | 56 | Tidak Tamat SD | Buruh Tani | pedagang di pasar | Menikah | 0.25 |
| 16 | Eni | 33 | SMP | petani | pedagang krambil | Menikah | 0.25 |
| 17 | Bibit | 53 | Tidak Tamat SD | petani | Buruh tani | Menikah | 0.5 |
| 18 | Juilah | 30 | SMP | petani | Buruh tani/ternak | Menikah | 1 |
| 19 | Afika | 35 | SMP | petani | Peternak | Menikah | 2 |

| | | | | | | | |
|----|-------------|----|----------------|--------|----------------------------|---------|------|
| 20 | Lilik | 37 | SMP | petani | Penjual Keong, Penjual Kue | Janda | 0.5 |
| 21 | Ngatirah | 31 | SMP | petani | Ibu Rumah Tangga | Menikah | 1 |
| 22 | Poniyem | 24 | SMP | petani | Ibu Rumah Tangga | Menikah | 1 |
| 23 | Jeminem | 52 | Tidak Tamat SD | petani | Ibu Rumah Tangga | Menikah | 1.5 |
| 24 | Isa | 31 | SMP | Petani | ternak, pedagang krambil | Menikah | 0.25 |
| 25 | Syahrini | 57 | Tidak Tamat SD | petani | Pedagang Kain | Menikah | 4 |
| 26 | Siti Maryam | 37 | SMP | petani | Peternak | Menikah | 4 |
| 27 | Jemini | 49 | Tidak Tamat SD | petani | Ibu Rumah Tangga | Menikah | 0.75 |
| 28 | Prihatin | 44 | SD | petani | Ibu Rumah Tangga | Menikah | 0.5 |
| 29 | Mijem | 50 | Tidak Tamat SD | petani | Buruh Tani | Menikah | 0.5 |
| 30 | Khalimah | 45 | Tidak Tamat SD | petani | Buruh Tani | Menikah | 0.75 |
| 31 | Riamah | 44 | SD | petani | Buruh Tani | Menikah | 0.5 |
| 32 | Mujiati | 47 | SD | petani | Buruh Tani | Menikah | 0.25 |
| 33 | Sutin | 39 | Tidak Tamat SD | petani | Buruh Tani | Menikah | 1 |

Lampiran.3 Perolehan skor dan kategori modal sosial Trust

| No | Trust | | | | | total | Kategori |
|---------------|-------|----|-----|----|---|-------|----------|
| | I | II | III | IV | V | | |
| 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 14 | Tinggi |
| 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | Tinggi |
| 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 12 | Tinggi |
| 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14 | Tinggi |
| 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | Tinggi |
| 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 11 | Sedang |
| 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 10 | Sedang |
| 8 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 13 | Tinggi |
| 9 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 13 | Tinggi |
| 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | Tinggi |
| 11 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 12 | Tinggi |
| 12 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 13 | Tinggi |
| 13 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 12 | Tinggi |
| 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11 | Sedang |
| 15 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 13 | Tinggi |
| 16 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 14 | Tinggi |
| 17 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 14 | Tinggi |
| 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11 | Sedang |
| 19 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | Sedang |
| 20 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 14 | Tinggi |
| 21 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 14 | Tinggi |
| 22 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 14 | Tinggi |
| 23 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 11 | Sedang |
| 24 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 14 | Tinggi |
| 25 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 14 | Tinggi |
| 26 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 14 | Tinggi |
| 27 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 13 | Tinggi |
| 28 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 13 | Tinggi |
| 29 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 9 | Sedang |
| 30 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 9 | Sedang |
| 31 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 13 | Tinggi |
| 32 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 10 | Sedang |
| 33 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 9 | Sedang |
| Total | | | | | | 413 | Tinggi |
| Rata-rata | | | | | | 12.52 | |
| skor maksimal | | | | | | 15 | |
| skor minimal | | | | | | 5 | |

| No | Kategori | Skor |
|----|----------|------------|
| 1 | Rendah | 5 - 8,2 |
| 2 | Sedang | 8,3 - 11,6 |
| 3 | Tinggi | 11,7 - 15 |

Lampiran.4 Skor dan kategori modal sosial Norma dan Nilai

| No | Value and Norm | | | | | | | | total | Kategori |
|---------------|----------------|----|-----|----|---|----|-----|------|-------|----------|
| | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | | |
| 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 22 | Tinggi |
| 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 22 | Tinggi |
| 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 22 | Tinggi |
| 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 23 | Tinggi |
| 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 24 | Tinggi |
| 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 20 | Tinggi |
| 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 18 | Sedang |
| 8 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 21 | Tinggi |
| 9 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 21 | Tinggi |
| 10 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 23 | Tinggi |
| 11 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 23 | Tinggi |
| 12 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 22 | Tinggi |
| 13 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 22 | Tinggi |
| 14 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 19 | Tinggi |
| 15 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 22 | Tinggi |
| 16 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 23 | Tinggi |
| 17 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 22 | Tinggi |
| 18 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | Sedang |
| 19 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 21 | Tinggi |
| 20 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 22 | Tinggi |
| 21 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 23 | Tinggi |
| 22 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 22 | Tinggi |
| 23 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 20 | Tinggi |
| 24 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 23 | Tinggi |
| 25 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 22 | Tinggi |
| 26 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 22 | Tinggi |
| 27 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 21 | Tinggi |
| 28 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 20 | Tinggi |
| 29 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 16 | Sedang |
| 30 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | Sedang |
| 31 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 22 | Tinggi |
| 32 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 20 | Tinggi |
| 33 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 16 | Sedang |
| Total | | | | | | | | | 695 | Tinggi |
| Rata-rata | | | | | | | | | 21.06 | |
| skor maksimal | | | | | | | | | 24 | |
| skor minimal | | | | | | | | | 8 | |

| No | Kategori | Skor |
|----|----------|-------------|
| 1 | Rendah | 8 - 13,2 |
| 2 | Sedang | 13,3 - 18,6 |
| 3 | Tinggi | 18,7 - 25 |

Lampiran.5 Skor dan kategori Modal Sosial Jaringan

| No | Network | | | | total | Kategori |
|---------------|----------|----|-----------|----|-------|----------|
| | I | II | III | IV | | |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 | Sedang |
| 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 11 | Tinggi |
| 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 9 | Sedang |
| 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | Tinggi |
| 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 11 | Tinggi |
| 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | Sedang |
| 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | Sedang |
| 8 | 2 | 3 | 3 | 3 | 11 | Tinggi |
| 9 | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 | Sedang |
| 10 | 2 | 3 | 3 | 3 | 11 | Tinggi |
| 11 | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 | Sedang |
| 12 | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 | Tinggi |
| 13 | 2 | 3 | 3 | 3 | 11 | Tinggi |
| 14 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | Sedang |
| 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | Tinggi |
| 16 | 2 | 3 | 2 | 3 | 10 | Tinggi |
| 17 | 2 | 3 | 2 | 3 | 10 | Tinggi |
| 18 | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 | Sedang |
| 19 | 2 | 3 | 2 | 3 | 10 | Tinggi |
| 20 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | Sedang |
| 21 | 3 | 2 | 3 | 3 | 11 | Tinggi |
| 22 | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 | Sedang |
| 23 | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | Sedang |
| 24 | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | Sedang |
| 25 | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 | Sedang |
| 26 | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | Sedang |
| 27 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | Sedang |
| 28 | 2 | 3 | 2 | 3 | 10 | Tinggi |
| 29 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | Sedang |
| 30 | 1 | 3 | 1 | 3 | 8 | Sedang |
| 31 | 2 | 3 | 2 | 3 | 10 | Tinggi |
| 32 | 2 | 3 | 2 | 3 | 10 | Tinggi |
| 33 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | Rendah |
| Total | | | | | 311 | Tinggi |
| Rata-rata | | | | | 9.42 | |
| skor maksimal | | | | | 12 | |
| skor minimal | | | | | 4 | |
| No | Kategori | | Skor | | | |
| 1 | Rendah | | 4 - 6,5 | | | |
| 2 | Sedang | | 6,6 - 9,2 | | | |
| 3 | Tinggi | | 9,3 - 12 | | | |

Lampiran. 6 Skor dan kategori Tingkat Modal Sosial

| No | Modal sosial | | | Total | Kategori |
|---------------|--------------|-------------|---------|-------|----------|
| | Trust | Value& Norm | Network | | |
| 1 | 14 | 22 | 9 | 45 | Tinggi |
| 2 | 15 | 22 | 11 | 48 | Tinggi |
| 3 | 12 | 22 | 9 | 43 | Tinggi |
| 4 | 14 | 23 | 12 | 49 | Tinggi |
| 5 | 15 | 24 | 11 | 50 | Tinggi |
| 6 | 11 | 20 | 9 | 40 | Tinggi |
| 7 | 10 | 18 | 8 | 36 | Sedang |
| 8 | 13 | 21 | 11 | 45 | Tinggi |
| 9 | 13 | 21 | 9 | 43 | Tinggi |
| 10 | 15 | 23 | 11 | 49 | Tinggi |
| 11 | 12 | 23 | 9 | 44 | Tinggi |
| 12 | 13 | 22 | 11 | 46 | Tinggi |
| 13 | 12 | 22 | 11 | 45 | Tinggi |
| 14 | 11 | 19 | 8 | 38 | Sedang |
| 15 | 13 | 22 | 12 | 47 | Tinggi |
| 16 | 14 | 23 | 10 | 47 | Tinggi |
| 17 | 14 | 22 | 10 | 46 | Tinggi |
| 18 | 11 | 18 | 9 | 38 | Tinggi |
| 19 | 10 | 21 | 10 | 41 | Tinggi |
| 20 | 14 | 22 | 7 | 43 | Tinggi |
| 21 | 14 | 23 | 11 | 48 | Tinggi |
| 22 | 14 | 22 | 9 | 45 | Tinggi |
| 23 | 11 | 20 | 8 | 39 | Tinggi |
| 24 | 14 | 23 | 9 | 46 | Tinggi |
| 25 | 14 | 22 | 9 | 45 | Tinggi |
| 26 | 14 | 22 | 9 | 45 | Tinggi |
| 27 | 13 | 21 | 7 | 41 | Tinggi |
| 28 | 13 | 20 | 10 | 43 | Tinggi |
| 29 | 9 | 16 | 8 | 33 | Sedang |
| 30 | 9 | 18 | 8 | 35 | Sedang |
| 31 | 13 | 22 | 10 | 45 | Tinggi |
| 32 | 10 | 20 | 10 | 40 | Tinggi |
| 33 | 9 | 16 | 6 | 31 | Sedang |
| Total | | | | 1419 | Tinggi |
| Rata-rata | | | | 43.00 | |
| skor maksimal | | | | 51 | |
| skor minimal | | | | 17 | |

| No | Kategori | Skor |
|----|----------|-------------|
| 1 | Rendah | 17 - 28,2 |
| 2 | Sedang | 28,3 - 39,6 |
| 3 | Tinggi | 39,7 - 51 |

Lampiran.7 Skor dan kategori Partisipasi Tahap Perencanaan

| No | Planning | | | | Total | Kategori |
|---------------|-----------------|-----------------|-----------|------------|-------|----------|
| | Kehadiran Rapat | Pemberian Saran | Negosiasi | Perjanjian | | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | Rendah |
| 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | Tinggi |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | Rendah |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | Rendah |
| 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | Tinggi |
| 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | Rendah |
| 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | Rendah |
| 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | Sedang |
| 9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | Sedang |
| 10 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | Sedang |
| 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | Rendah |
| 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | Rendah |
| 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | Rendah |
| 14 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | Rendah |
| 15 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | Rendah |
| 16 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | Rendah |
| 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | Rendah |
| 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | Rendah |
| 19 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | Rendah |
| 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | Sedang |
| 21 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | Rendah |
| 22 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | Rendah |
| 23 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | Rendah |
| 24 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | Rendah |
| 25 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | Rendah |
| 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | Rendah |
| 27 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | Rendah |
| 28 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | Rendah |
| 29 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | Rendah |
| 30 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | Rendah |
| 31 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | Rendah |
| 32 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | Rendah |
| 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | Rendah |
| Total | | | | | 180 | Rendah |
| Rata-rata | | | | | 5.45 | |
| skor maksimal | | | | | 12 | |
| skor minimal | | | | | 4 | |
| No | Kategori | | Skor | | | |
| 1 | Rendah | | 4 - 6,5 | | | |
| 2 | Sedang | | 6,6 - 9,2 | | | |
| 3 | Tinggi | | 9,3 - 12 | | | |

Lampiran. 8 Skor dan kategori Partisipasi Tahap Pelaksanaan

| No | Pelaksanaan | | | | | total | Kategori |
|---------------|--------------------|--------------------|----------------------|-----------|---------------------|-------|----------|
| | Pertemuan rutin | Persiapan lahan | Perawatan Tanaman | Pemanenan | Pengamanan Hutan | | |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 10 | Sedang |
| 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 12 | Tinggi |
| 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 11 | Sedang |
| 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 10 | Sedang |
| 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 14 | Tinggi |
| 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 9 | Sedang |
| 7 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 9 | Sedang |
| 8 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 11 | Sedang |
| 9 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 11 | Sedang |
| 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 14 | Tinggi |
| 11 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 10 | Sedang |
| 12 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 9 | Sedang |
| 13 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 10 | Sedang |
| 14 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 10 | Sedang |
| 15 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 11 | Sedang |
| 16 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 9 | Sedang |
| 17 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 12 | Tinggi |
| 18 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 10 | Sedang |
| 19 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 10 | Sedang |
| 20 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 14 | Tinggi |
| 21 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 | Sedang |
| 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | Sedang |
| 23 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11 | Sedang |
| 24 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 12 | Tinggi |
| 25 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 10 | Sedang |
| 26 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 12 | Tinggi |
| 27 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 10 | Sedang |
| 28 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11 | Sedang |
| 29 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 10 | Sedang |
| 30 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | Rendah |
| 31 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | Rendah |
| 32 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | Rendah |
| 33 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 12 | Tinggi |
| Total | | | | | | 347 | Sedang |
| Rata-rata | | | | | | 10.52 | |
| skor maksimal | | | | | | 15 | |
| skor minimal | | | | | | 5 | |
| No | Kategori | | Skor | | | | |
| 1 | rendah | | 5 - 8,3 | | | | |
| 2 | sedang | | 8,4 - 11,6 | | | | |
| 3 | tinggi | | 11,7 - 15 | | | | |

Lampiran. 9 Skor dan kategori Partisipasi Tahap Pemanfaatan

| No | Pemanfaatan | | | Total | Kategori |
|---------------|-------------|---------------------|---------------------|-------|----------|
| | SDA Hutan | Pengetahuan Program | Pengembangan nusaha | | |
| 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | Sedang |
| 2 | 3 | 3 | 2 | 8 | Tinggi |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | Sedang |
| 4 | 3 | 3 | 1 | 7 | Tinggi |
| 5 | 3 | 1 | 3 | 7 | Tinggi |
| 6 | 3 | 1 | 1 | 5 | Sedang |
| 7 | 3 | 1 | 2 | 6 | Sedang |
| 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | Tinggi |
| 9 | 3 | 1 | 3 | 7 | Tinggi |
| 10 | 2 | 3 | 3 | 8 | Tinggi |
| 11 | 3 | 1 | 1 | 5 | Sedang |
| 12 | 2 | 1 | 3 | 6 | Sedang |
| 13 | 3 | 1 | 2 | 6 | Sedang |
| 14 | 3 | 1 | 3 | 7 | Tinggi |
| 15 | 3 | 1 | 3 | 7 | Tinggi |
| 16 | 3 | 1 | 3 | 7 | Tinggi |
| 17 | 3 | 1 | 3 | 7 | Tinggi |
| 18 | 3 | 1 | 2 | 6 | Sedang |
| 19 | 3 | 1 | 2 | 6 | Sedang |
| 20 | 3 | 1 | 3 | 7 | Tinggi |
| 21 | 3 | 1 | 3 | 7 | Tinggi |
| 22 | 2 | 1 | 2 | 5 | Sedang |
| 23 | 3 | 1 | 2 | 6 | Sedang |
| 24 | 3 | 2 | 1 | 6 | Sedang |
| 25 | 3 | 1 | 3 | 7 | Tinggi |
| 26 | 3 | 1 | 3 | 7 | Tinggi |
| 27 | 1 | 1 | 1 | 3 | Rendah |
| 28 | 3 | 1 | 3 | 7 | Tinggi |
| 29 | 3 | 3 | 2 | 8 | Tinggi |
| 30 | 2 | 1 | 1 | 4 | Rendah |
| 31 | 3 | 2 | 3 | 8 | Tinggi |
| 32 | 3 | 1 | 3 | 7 | Tinggi |
| 33 | 3 | 2 | 1 | 6 | Sedang |
| Total | | | | 213 | Sedang |
| Rata-rata | | | | 6.45 | |
| skor maksimal | | | | 9 | |
| skor minimal | | | | 3 | |
| No | Kategori | | Skor | | |
| 1 | Rendah | | 3 --4 | | |
| 2 | Sedang | | 5 --6 | | |
| 3 | Tinggi | | 7 --9 | | |

Lampiran. 10 Skor Partisipasi Tahap Monitoring dan Evaluasi

| No | Monev | | | Total | Kategori |
|---------------|-----------------|--------------------|----------------------|-------|----------|
| | Kehadiran Rapat | Pelaporan Kegiatan | Penyampai an Kendala | | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | Rendah |
| 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | Sedang |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | Rendah |
| 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | Sedang |
| 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | Sedang |
| 6 | 1 | 2 | 1 | 4 | Rendah |
| 7 | 1 | 3 | 1 | 5 | Sedang |
| 8 | 1 | 2 | 1 | 4 | Rendah |
| 9 | 2 | 3 | 1 | 6 | Sedang |
| 10 | 1 | 2 | 1 | 4 | Rendah |
| 11 | 1 | 2 | 1 | 4 | Rendah |
| 12 | 1 | 2 | 1 | 4 | Rendah |
| 13 | 1 | 2 | 1 | 4 | Rendah |
| 14 | 1 | 2 | 1 | 4 | Rendah |
| 15 | 1 | 2 | 1 | 4 | Rendah |
| 16 | 1 | 2 | 1 | 4 | Rendah |
| 17 | 1 | 3 | 1 | 5 | Sedang |
| 18 | 1 | 2 | 1 | 4 | Sedang |
| 19 | 1 | 2 | 1 | 4 | Rendah |
| 20 | 1 | 3 | 1 | 5 | Sedang |
| 21 | 1 | 3 | 1 | 5 | Sedang |
| 22 | 1 | 2 | 1 | 4 | Rendah |
| 23 | 2 | 2 | 1 | 5 | Sedang |
| 24 | 2 | 3 | 1 | 6 | Sedang |
| 25 | 1 | 2 | 1 | 4 | Rendah |
| 26 | 2 | 3 | 2 | 7 | Tinggi |
| 27 | 1 | 2 | 1 | 4 | Rendah |
| 28 | 1 | 2 | 1 | 4 | Rendah |
| 29 | 2 | 2 | 1 | 5 | Rendah |
| 30 | 2 | 1 | 1 | 4 | Rendah |
| 31 | 1 | 3 | 1 | 5 | Rendah |
| 32 | 2 | 2 | 1 | 5 | Rendah |
| 33 | 1 | 1 | 2 | 4 | Rendah |
| Total | | | | 149 | Rendah |
| Rata-rata | | | | 4.52 | |
| skor maksimal | | | | 9 | |
| skor minimal | | | | 3 | |

| No | Kategori | Skor |
|----|----------|-------|
| 1 | Rendah | 3 --4 |
| 2 | Sedang | 5 --6 |
| 3 | Tinggi | 7 --9 |

Lampiran. 11 Skor dan kategori Tingkat Partisipasi Program PHBM

| No | Partisipasi | | | | Total | Kategori |
|---------------|-------------|----|---------|-------|----------|----------|
| | Plan | Do | Manfaat | Monev | | |
| 1 | 4 | 10 | 6 | 3 | 23 | Rendah |
| 2 | 10 | 12 | 8 | 6 | 36 | Tinggi |
| 3 | 4 | 11 | 6 | 3 | 24 | Rendah |
| 4 | 4 | 10 | 7 | 5 | 26 | Sedang |
| 5 | 10 | 14 | 7 | 5 | 36 | Tinggi |
| 6 | 4 | 9 | 5 | 4 | 22 | Rendah |
| 7 | 5 | 9 | 6 | 5 | 25 | Sedang |
| 8 | 7 | 11 | 8 | 4 | 30 | Tinggi |
| 9 | 7 | 11 | 7 | 6 | 31 | Tinggi |
| 10 | 7 | 14 | 8 | 4 | 33 | Tinggi |
| 11 | 5 | 10 | 5 | 4 | 24 | Rendah |
| 12 | 5 | 9 | 6 | 4 | 24 | Rendah |
| 13 | 4 | 10 | 6 | 4 | 24 | Rendah |
| 14 | 5 | 10 | 7 | 4 | 26 | Sedang |
| 15 | 6 | 11 | 7 | 4 | 28 | Sedang |
| 16 | 5 | 9 | 7 | 4 | 25 | Sedang |
| 17 | 4 | 12 | 7 | 5 | 28 | Sedang |
| 18 | 4 | 10 | 6 | 4 | 24 | Rendah |
| 19 | 5 | 10 | 6 | 4 | 25 | Sedang |
| 20 | 8 | 14 | 7 | 5 | 34 | Tinggi |
| 21 | 5 | 9 | 7 | 5 | 26 | Sedang |
| 22 | 5 | 10 | 5 | 4 | 24 | Rendah |
| 23 | 5 | 11 | 6 | 5 | 27 | Sedang |
| 24 | 5 | 12 | 6 | 6 | 29 | Sedang |
| 25 | 6 | 10 | 7 | 4 | 27 | Sedang |
| 26 | 4 | 12 | 7 | 7 | 30 | Tinggi |
| 27 | 6 | 10 | 3 | 4 | 23 | Rendah |
| 28 | 5 | 11 | 7 | 4 | 27 | Sedang |
| 29 | 5 | 10 | 8 | 5 | 28 | Sedang |
| 30 | 5 | 8 | 4 | 4 | 21 | Rendah |
| 31 | 6 | 8 | 8 | 5 | 27 | Sedang |
| 32 | 6 | 8 | 7 | 5 | 26 | Sedang |
| 33 | 4 | 12 | 6 | 4 | 26 | Sedang |
| Total | | | | | 889 | Sedang |
| Rata-rata | | | | | 26.93939 | |
| skor maksimal | | | | | 45 | |
| skor minimal | | | | | 15 | |

| No | Kategori | Skor |
|----|----------|-------|
| 1 | Rendah | 15-24 |
| 2 | Sedang | 25-35 |
| 3 | Tinggi | 36-45 |

Lampiran 12. Analisis Rank Spearman SPSS antara Hubungan Modal Sosial dan Partisipasi pada PHBM

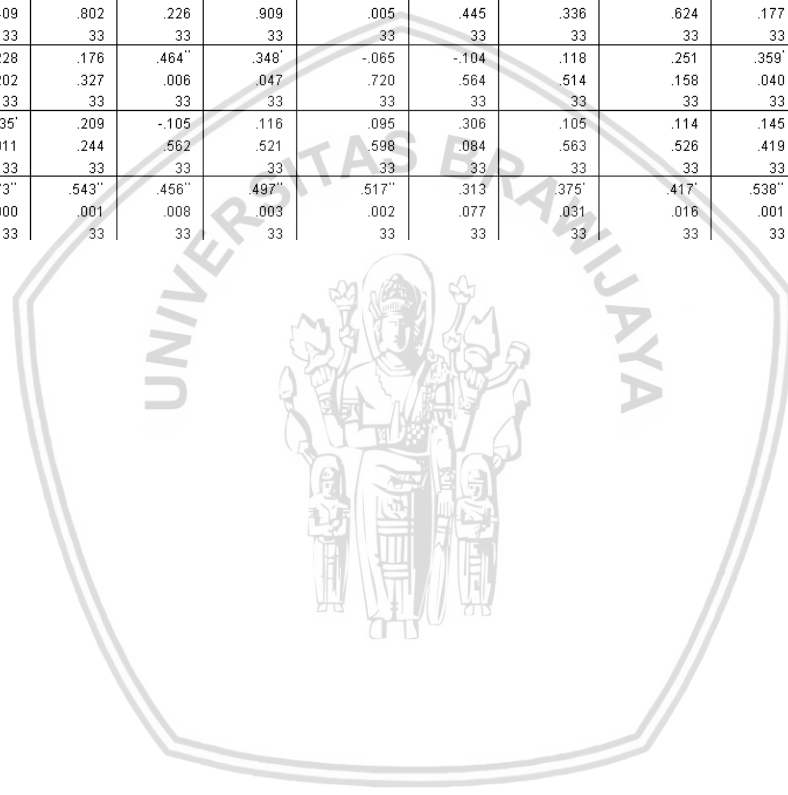
Correlations

| | | ModalSosial | Partisipasi |
|----------------|-------------------------|-------------|-------------|
| Spearman's rho | ModalSosial | 1.000 | .387* |
| | Correlation Coefficient | | |
| | Sig. (2-tailed) | | .026 |
| | N | 33 | 33 |
| | Partisipasi | .387* | 1.000 |
| | Correlation Coefficient | | |
| | Sig. (2-tailed) | .026 | |
| | N | 33 | 33 |

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).



| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|
| pengetahuan | Pearson Correlation | .195 | .283 | .157 | .093 | -.100 | .113 | .456** | -.081 | .348' | .259 | 1 | -.183 | .008 | .053 | .382' | .415' |
| | Sig. (2-tailed) | .276 | .110 | .384 | .605 | .578 | .531 | .008 | .654 | .047 | .145 | | .309 | .964 | .768 | .028 | .016 |
| | N | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| pengembanganusaha | Pearson Correlation | .306 | .221 | .196 | .326 | .550** | .000 | -.182 | .219 | .023 | .403' | -.183 | 1 | .219 | .419' | -.102 | .492** |
| | Sig. (2-tailed) | .084 | .216 | .273 | .064 | .001 | 1.000 | .312 | .221 | .899 | .020 | .309 | | .221 | .015 | .570 | .004 |
| | N | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| kehadiranmoney | Pearson Correlation | .113 | .149 | .045 | .217 | .021 | .473** | .138 | .173 | .088 | .241 | .008 | .219 | 1 | .254 | -.145 | .410' |
| | Sig. (2-tailed) | .533 | .409 | .802 | .226 | .909 | .005 | .445 | .336 | .624 | .177 | .964 | .221 | | .154 | .419 | .018 |
| | N | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| pelaporan | Pearson Correlation | .147 | .228 | .176 | .464** | .348' | -.065 | -.104 | .118 | .251 | .359' | .053 | .419' | .254 | 1 | .030 | .504** |
| | Sig. (2-tailed) | .415 | .202 | .327 | .006 | .047 | .720 | .564 | .514 | .158 | .040 | .768 | .015 | .154 | | .869 | .003 |
| | N | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| kendala | Pearson Correlation | .318 | .435' | .209 | -.105 | .116 | .095 | .306 | .105 | .114 | .145 | .382' | -.102 | -.145 | .030 | 1 | .364' |
| | Sig. (2-tailed) | .072 | .011 | .244 | .562 | .521 | .598 | .084 | .563 | .526 | .419 | .028 | .570 | .419 | .869 | | .037 |
| | N | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| total | Pearson Correlation | .727** | .673** | .543** | .456** | .497** | .517** | .313 | .375' | .417' | .538** | .415' | .492** | .410' | .504** | .364' | 1 |
| | Sig. (2-tailed) | .000 | .000 | .001 | .008 | .003 | .002 | .077 | .031 | .016 | .001 | .016 | .004 | .018 | .003 | .037 | |
| | N | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |



Variabel Modal Sosial

Correlations

| | | trustpesang gem | trustLKDPH | trustnonang gota | kerjasamapro duktif | kerjasamaso sial | peraturanke lompok | persepsiatur nanggota | sanksipelan garan | normasosial | wantakerjapu blik | wantameme perolehpeng etahuan | wantajabatan penting | wantabersek olah | tahuperhutani | tahuLKPDH | dukungandes a | dukunganlem bagadesa | total |
|----------------------------------|--|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| trustpesanggem | Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N | 1 .011 33 | .436 ^{**} 33 | .451 ^{**} .008 33 | .371 ^{**} .033 33 | .464 ^{**} .007 33 | .616 ^{**} .000 33 | .499 ^{**} .003 33 | .350 ^{**} .046 33 | .396 ^{**} .023 33 | .218 223 | .332 .059 33 | -.006 .976 33 | .407 ^{**} .019 33 | .421 ^{**} .015 33 | .167 .354 33 | .109 .547 33 | .199 .266 33 | .746 ^{**} .000 33 |
| trustLKDPH | Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N | .436 ^{**} .011 33 | 1 33 | .009 .228 33 | .228 .202 33 | .199 .202 33 | .480 ^{**} .005 33 | .467 ^{**} .006 33 | .335 .056 33 | .316 .073 33 | .048 .789 33 | .262 .141 33 | .111 .540 33 | .232 .194 33 | .473 ^{**} .005 33 | .165 .358 33 | .064 .722 33 | .248 .165 33 | .609 ^{**} .000 33 |
| trustnonanggota | Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N | .451 ^{**} .008 33 | .009 .960 33 | 1 .145 33 | .259 .145 33 | .011 .950 33 | .421 ^{**} .015 33 | .305 .085 33 | -.059 .743 33 | .488 ^{**} .004 33 | -.034 .852 33 | .214 .232 33 | .081 .656 33 | .450 ^{**} .009 33 | .366 ^{**} .036 33 | .299 .091 33 | -.121 .503 33 | .160 .374 33 | .489 ^{**} .004 33 |
| kerjasamaproduktif | Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N | .371 ^{**} .033 33 | .228 .202 33 | .259 .145 33 | 1 .016 33 | .417 ^{**} .016 33 | .390 ^{**} .025 33 | .605 ^{**} .000 33 | .260 .144 33 | .188 .294 33 | -.037 .840 33 | .265 .136 33 | .220 .218 33 | .369 ^{**} .035 33 | .445 ^{**} .009 33 | -.006 .974 33 | .383 ^{**} .028 33 | .067 .710 33 | .657 ^{**} .000 33 |
| kerjasamasosial | Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N | .464 ^{**} .007 33 | .199 .268 33 | .199 .950 33 | .417 ^{**} .016 33 | 1 .016 33 | .291 .100 33 | .289 .103 33 | .376 ^{**} .031 33 | -.015 .935 33 | .192 .284 33 | .324 .066 33 | -.003 .986 33 | .080 .277 33 | .195 .586 33 | -.098 .073 33 | .316 .586 33 | .420 .073 33 | .452 ^{**} .008 33 |
| peraturankeompok | Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N | .616 ^{**} .000 33 | .480 ^{**} .005 33 | .421 ^{**} .015 33 | .390 ^{**} .025 33 | .291 .100 33 | 1 .112 33 | .282 .064 33 | .326 .112 33 | .245 .169 33 | -.094 .604 33 | .422 ^{**} .014 33 | -.050 .783 33 | .492 ^{**} .004 33 | .381 ^{**} .029 33 | .365 ^{**} .037 33 | .093 .607 33 | .376 ^{**} .031 33 | .896 ^{**} .000 33 |
| persepsiaturananggota | Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N | .499 ^{**} .003 33 | .487 ^{**} .006 33 | .305 .085 33 | .605 ^{**} .000 33 | .289 .103 33 | .282 .112 33 | 1 .112 33 | .441 ^{**} .010 33 | .463 ^{**} .007 33 | -.107 .552 33 | .107 .552 33 | -.029 .875 33 | .211 .239 33 | .476 ^{**} .005 33 | .071 .696 33 | .357 ^{**} .041 33 | .141 .432 33 | .681 ^{**} .000 33 |
| sanksipelanggaran | Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N | .350 ^{**} .046 33 | .335 .056 33 | -.059 .743 33 | .260 .144 33 | .376 ^{**} .031 33 | .326 .064 33 | .441 ^{**} .010 33 | 1 .010 33 | .006 .972 33 | -.199 .267 33 | -.084 .643 33 | -.228 .203 33 | -.103 .570 33 | .340 .053 33 | -.014 .940 33 | .436 ^{**} .011 33 | -.028 .879 33 | .395 ^{**} .023 33 |
| normasosial | Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N | .396 ^{**} .023 33 | .316 .073 33 | .488 ^{**} .004 33 | .188 .294 33 | -.015 .935 33 | .245 .189 33 | .463 ^{**} .007 33 | .006 .972 33 | 1 .044 33 | .044 .808 33 | .644 .808 33 | -.073 .687 33 | .409 .018 33 | .446 ^{**} .009 33 | .245 .169 33 | .188 .294 33 | .014 .936 33 | .514 ^{**} .002 33 |
| wantakerjapublik | Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N | .218 .223 33 | .048 .789 33 | -.034 .852 33 | -.037 .840 33 | .192 .284 33 | -.094 .604 33 | -.107 .552 33 | -.199 .267 33 | .044 .808 33 | 1 .645 33 | .083 .529 33 | .114 .529 33 | -.084 .642 33 | .097 .592 33 | .035 .846 33 | -.338 .054 33 | -.085 .640 33 | .082 .652 33 |
| wantamemepereolehpeng etahuan | Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N | .332 .059 33 | .262 .141 33 | .214 .232 33 | .265 .136 33 | .324 .066 33 | .422 ^{**} .014 33 | .107 .552 33 | -.084 .643 33 | .044 .808 33 | .083 .645 33 | 1 .529 33 | .114 .529 33 | .532 ^{**} .001 33 | .193 .281 33 | .035 .846 33 | .164 .361 33 | .122 .498 33 | .462 ^{**} .007 33 |
| wantajabatanpenting | Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N | -.006 .976 33 | .111 .540 33 | .081 .656 33 | .220 .218 33 | -.003 .986 33 | -.050 .783 33 | -.029 .875 33 | -.228 .203 33 | -.073 .687 33 | .114 .529 33 | .114 .529 33 | 1 .037 33 | .364 ^{**} .037 33 | .154 .392 33 | .258 .147 33 | -.099 .582 33 | .065 .720 33 | .238 .182 33 |
| wantabersekolah | Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N | .407 ^{**} .019 33 | .232 .194 33 | .450 ^{**} .009 33 | .369 .035 33 | .080 .658 33 | .492 ^{**} .004 33 | .211 .239 33 | -.103 .570 33 | .409 .018 33 | -.084 .642 33 | .532 ^{**} .001 33 | .364 ^{**} .037 33 | 1 .037 33 | .455 ^{**} .008 33 | .492 ^{**} .004 33 | .133 .462 33 | .074 .683 33 | .624 ^{**} .000 33 |
| tahuperhutani | Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N | .421 ^{**} .015 33 | .473 ^{**} .005 33 | .366 ^{**} .036 33 | .445 ^{**} .009 33 | .195 .277 33 | .381 ^{**} .029 33 | .476 ^{**} .005 33 | .340 .053 33 | .446 ^{**} .009 33 | .097 .592 33 | .193 .281 33 | .154 .392 33 | .455 ^{**} .008 33 | 1 .029 33 | .381 ^{**} .213 33 | .223 .396 33 | .153 .396 33 | .743 ^{**} .000 33 |
| tahuLKPDH | Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N | .167 .354 33 | .165 .358 33 | .299 .091 33 | -.006 .974 33 | -.098 .586 33 | .365 ^{**} .037 33 | .071 .696 33 | -.014 .940 33 | .245 .169 33 | .035 .846 33 | .035 .846 33 | .258 .147 33 | .492 ^{**} .004 33 | .381 ^{**} .029 33 | 1 .33 33 | -.006 .974 33 | .173 .336 33 | .402 ^{**} .021 33 |
| dukungandes | Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N | .109 .547 33 | .064 .722 33 | -.121 .503 33 | .383 ^{**} .028 33 | .316 .607 33 | .093 .607 33 | .357 ^{**} .041 33 | .436 ^{**} .011 33 | .188 .294 33 | -.338 .054 33 | .164 .582 33 | -.099 .582 33 | .133 .462 33 | .223 .213 33 | -.006 .974 33 | 1 .33 33 | -.012 .947 33 | .365 ^{**} .037 33 |
| dukunganlembagadesa | Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N | .199 .266 33 | .248 .165 33 | .160 .374 33 | .067 .710 33 | -.145 .420 33 | .376 ^{**} .031 33 | .141 .432 33 | -.028 .879 33 | .014 .936 33 | -.085 .840 33 | .122 .498 33 | .065 .720 33 | .074 .683 33 | .153 .396 33 | .173 .336 33 | -.012 .947 33 | 1 .311 33 | .078 .078 33 |
| total | Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N | .746 ^{**} .000 33 | .609 ^{**} .000 33 | .489 ^{**} .004 33 | .657 ^{**} .000 33 | .452 ^{**} .008 33 | .696 ^{**} .000 33 | .681 ^{**} .000 33 | .395 ^{**} .023 33 | .514 ^{**} .002 33 | .082 .652 33 | .462 ^{**} .007 33 | .238 .182 33 | .624 ^{**} .000 33 | .743 ^{**} .000 33 | .402 ^{**} .021 33 | .365 ^{**} .037 33 | .311 .078 33 | 1 .078 33 |

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Lampiran 14. Hasil Realibilitas SPSS

Scale: ALL

Case Processing Summary

| | | N | % |
|-------|-----------------------|----|-------|
| Cases | Valid | 33 | 100.0 |
| | Excluded ^a | 0 | .0 |
| | Total | 33 | 100.0 |

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

| Cronbach's Alpha | N of Items |
|------------------|------------|
| .820 | 32 |

Item Total Statistics

| | Scale Mean if Item Deleted | Scale Variance if Item Deleted | Corrected Item-Total Correlation | Cronbach's Alpha if Item Deleted |
|----------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| VAR00001 | 67.3636 | 45.426 | .662 | .803 |
| VAR00002 | 67.8182 | 45.653 | .584 | .805 |
| VAR00003 | 67.2121 | 47.672 | .393 | .813 |
| VAR00004 | 67.6364 | 45.551 | .557 | .805 |
| VAR00005 | 67.1515 | 48.070 | .363 | .814 |
| VAR00006 | 67.3333 | 46.417 | .604 | .806 |
| VAR00007 | 67.2727 | 46.142 | .526 | .807 |
| VAR00008 | 67.3333 | 48.792 | .212 | .818 |
| VAR00009 | 67.2424 | 47.564 | .397 | .812 |
| VAR00010 | 67.3030 | 50.468 | .006 | .824 |
| VAR00011 | 67.3030 | 48.780 | .253 | .817 |
| VAR00012 | 67.5152 | 49.695 | .078 | .824 |
| VAR00013 | 67.1515 | 47.633 | .513 | .810 |
| VAR00014 | 67.9394 | 44.434 | .666 | .800 |
| VAR00015 | 67.3333 | 48.479 | .292 | .816 |
| VAR00016 | 67.6364 | 49.801 | .060 | .825 |
| VAR00017 | 67.4242 | 48.627 | .201 | .819 |
| VAR00018 | 68.5758 | 45.502 | .600 | .804 |
| VAR00019 | 68.7273 | 46.392 | .546 | .807 |
| VAR00020 | 68.7273 | 47.955 | .456 | .812 |
| VAR00021 | 68.2727 | 49.580 | .139 | .820 |
| VAR00022 | 67.9697 | 45.093 | .524 | .806 |
| VAR00023 | 67.9394 | 47.059 | .282 | .817 |
| VAR00024 | 67.4545 | 49.193 | .182 | .819 |
| VAR00025 | 67.3030 | 49.030 | .216 | .818 |
| VAR00026 | 68.5152 | 51.570 | -.136 | .831 |
| VAR00027 | 67.1212 | 50.047 | .073 | .822 |
| VAR00028 | 68.5758 | 48.502 | .180 | .821 |
| VAR00029 | 67.6667 | 45.667 | .410 | .811 |
| VAR00030 | 68.7273 | 51.955 | -.231 | .829 |
| VAR00031 | 67.7576 | 46.439 | .451 | .810 |
| VAR00032 | 68.8182 | 49.653 | .157 | .819 |



Nomor Responden :
 Hari, Tanggal Survei :
 Tanggal Entri Data :
 Desa :
 Tambak Asri :
 RT/RW :
 Pewawancara :

Kuisisioner Penelitian
Peran Modal Sosial dalam Partisipasi Perempuan pada PHBM (Pengelolaan
Hutan Bersama Masyarakat)
 (Desa Tambakasri, Kec.Sumbermanjing Wetan, Kab. Malang- Jatim)

I. IDENTITAS RESPONDEN

1. Nama :
 2. No. HP :
 3 Alamat : RT: RW: No:
 Desa Tambakasri Kecamatan Sumbermanjing Wetan
 Kab. Malang Prov. Jawa Timur
 4. Umur : tahun
 5. Jenis Kelamin : Laki- laki / Perempuan
 6. Pendidikan Akhir : 1. Tidak Tamat SD 2. Tamat SD 3. Tamat SMP
 : 4. Tamat SMA 5. Tamat Perguruan Tinggi
 7. Pekerjaan : Utama : Sampingan:
 8. Status Perkawinan : 1. Belum Menikah 2. Sudah Menikah 3. Janda/Duda
 9. Susunan Keluarga :

| no | Nama | status | umur(th) | pendidikan | pekerjaan |
|----|------|--------|----------|------------|-----------|
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |

10. Luas penguasaan :
 Lahan tetelan

11. Luas kepemilikan lahan dan jumlah ternak

| No | Jenis penggunaan lahan | luas (ha) | Kepemilikan ternak | |
|----|------------------------|-----------|--------------------|---------------|
| | | | Jenis ternak | Jumlah ternak |
| 1 | Tegal | | | |
| 2 | Sawah | | | |
| 3 | Pekarangan | | | |
| | | | | |

II. MODAL SOSIAL

TRUST

1. Interaksi dengan sesama pesanggem?
 - Adanya keterbukaan dalam penyampaian pendapat (jarang/tidak ada)
 - Adanya transfer informasi dengan sesama pesanggem (jarang/tidak ada)
 - Adanya pembagian tugas dalam kelompok (jarang/tidak ada)
 - Saling memotivasi (jarang/tidak ada)

Jawaban :

2. Interaksi dengan pengurus LKDPH
 - Adanya keterbukaan dalam penyampaian pendapat (jarang/tidak ada)
 - Adanya transfer informasi dengan pengurus LKDPH (jarang/tidak ada)
 - Pelaksanaan tugas sesuai dengan aturan (sesuai / tidak sesuai)

Jawab :

3. Interaksi masyarakat non anggota
 - Adanya keterbukaan dalam mengemukakan pendapat
 - Adanya transfer informasi
 - Dalam keadaan (baik/tidak baik)

Jawab:.....

4. Bagaimana tingkat kerjasama dengan sesama pesanggem dalam kegiatan usaha tani
 - a. Tinggi
 - b. Sedang

c. Rendah

5. Kerjasama tersebut dalam hal apa ? sebutkan ?

Jawab :

6. Adakah kerjasama dengan masyarakat dalam kegiatan sosial (hajatan, slametan desa dll) ? sebutkan

Jawab :

7. Bagaimana tingkat kerjasama dalam kegiatan sosial

a. Tinggi

b. Sedang

c. Rendah

Alasan :

NORMA DAN NILAI

1. Mengetahui peraturan yang ada pada LKDPH

a. Ya, mengetahui seluruhnya

b. Ya, mengetahui sedikit

c. Tidak

2. Seperti apa peraturan yang anda ketahui

.....

3. Pelaksanaan peraturan kelompok

a. Ada dan berjalan

b. Ada , tapi tidak berjalan

c. Tidak ada peraturan

4. Bagaimana pendapat Ibu tentang peraturan mengenai anggota

a. Menguntungkan

b. Sebagian menguntungkan

c. Tidak

Alasan.....

5. Adakah sanksi yang diberikan pada pelanggar peraturan ?

a. Ya b. Tidak

Jelaskan.....

6. Adakan norma atau nilai yang berlaku dalam masyarakat desa ?

Jawab:

7. Bagaimana pandangan ibu mengenai perempuan yang bekerja di sektor publik/diluar rumah
 - a. Baik
 - b. Ragu
 - c. tidak baik

Alasan :
8. Bagaimana pandangan ibu mengenai perempuan dalam memperoleh pengetahuan dan pendidikan
 - a. Penting
 - b.Ragu
 - c. Tidak penting

Alasan
9. Bagaimana pandangan ibu mengenai perempuan yang menduduki jabatan penting (misal lurah, DPR, dll)
 - a. Baik
 - b. Ragu
 - c. tidak baik

Alasan :
10. Bagaimana pandangan ibu mengenai perempuan yang bersekolah sampai jenjang yang tinggi (misal sarjana)
11. Baik
 - b. Ragu
 - c. tidak baik

Alasan :

JARINGAN

1. Apakah mengenal orang yang mempunyai kepentingan dalam PHBM itu penting?
 - a. Ya
 - b. Tidak

Alasan.....
2. Apakah mengetahui pihak perhutani yang berkepentingan di Desa Tambakasri ?
 - a. Hampir semua
 - b. Sebagian kecil
 - c. Tidak mengetahui
3. Apakah mengetahui pihak LKDPH yang berkepentingan di Desa Tambakasri ?
 - a. Hampir semua
 - b. Sebagian kecil
 - c. Tidak mengetahui

Alasan.....
4. Apakah dalam pelaksanaan kegiatan melakukan kerjasama dengan kembaga atau kelompok lain ? (PKK, Karangtaruna dll)

- a. Adanya kerjasama dengan kelompok dan lembaga lain
 - b. Kerjasama dengan kelompok dan lembaga lain sedang dirintis
 - c. Tidak ada kerjasama
5. Dukungan dari aparat desa
- a. Adanya dukungan dari aparat desa dan pemimpin informal dalam desa
 - b. Adanya dukungan dari aparat desa dan pemimpin informal dalam satu desa namun belum sepenuhnya
 - c. Tidak ada dukungan

IV. PARTISIPASI

PERENCANAAN

1. Apakah Anda pernah diundang untuk mengikuti rapat perencanaan?
 - a. Ya
 - b. Tidak, alasan :
Jika Ya, siapa yang mengundang Anda dalam rapat tersebut?
 - a. Perhutani
 - b. Ketua LKDPH
 - c. Anggota LKDPH
2. Apakah Ibu menghadiri kegiatan rapat perencanaan?
 - a. Hadir
 - b. Tidak

Jika Hadir berapa kali : 1 kali / 2 kali / 3 kali
3. Apakah ibu memahami kegiataan rapat yang dilaksanakan
 - A Ya
 - B. Tidak

Alasan :
4. Apakah dalam kegiatan rapat perencanaan Ibu diberikan kesempatan untuk berpendapat atau memberikan usulan ?
 - a. Ya
 - b. Tidak

Jika Ya seberapa sering :
5. Apakah Ibu mengikuti kegiatan negosiasi meliputi:
 - Penentuan jenis tanaman
 - Penentuan luasan dan lahan andil
 - Penentuan lokasi PHBM
 - Penentuan pola tanam

Jawab :
6. Apakah Ibu mengikuti kegiatan kegiatan perjanjian dengan perhutani atau LKDPH ?

- Penentuan jangka waktu kontrak
- Penandatanganan perjanjian kontrak

Jawab:

PELAKSANAAN

1. Mengikuti pelaksanaan pertemuan rutin dengan pihak yang terkait dengan PHBM
 - a. 1 kali
 - b. 2 kali
 - c. Tidak pernah

2. Kegiatan usaha tani apakah yang anda lakukan?

Jawab:

3. Kegiatan persiapan lahan yang anda lakukan :

- Pembuatan larikan
- Pembuatan lubang tanam
- Pemasangan ajir

Alasan melakukan kegiatan:.....

Alasan tidak melakukan kegiatan:.....

4. Kegiatan Penanaman dan pemeliharaan yang anda lakukan

- Penanaman
- Penyulaman
- Penyiangan
- pemeliharaan tanaman pokok

Alasan :.....

5. Kegiatan Pemanenan yang anda lakukan

- Pemanenan kopi
- Penyadapan getah pinus
- Pemanenan tanaman tumpangsari
- Kegiatan lain :

Alasan:.....

6. Kegiatan pengamanan hutan mana saja yang anda lakukan

- Pencegahan perencekan
- Pencegahan penyerobotan lahan

- Pencegahan kebakaran
- Pencegahan pencurian kayu

Alasan:.....

PEMANFAATAN

1. Apakah ada manfaat yang anda rasakan dari PHBM?
 - a. Ya
 - b. Tidak

Apabila Ya, apa manfaat yang anda peroleh ?

Jawab:
2. Apakah anda dapat mengambil hasil hutan seperti ketentuan PHBM ?
 - a. Ya
 - b. Tidak
3. Hasil hutan apa yang Ibu manfaatkan ?
 - Kayu :
 - Tanaman tupang sari :
 - Sumber lain :

Jawab :
4. Apakah perhutani memberikan pelatihan ?
 - a. Ya
 - b. Tidak

Jika Ya, pelatihan tersebut dalam bentuk apa ?

 - a. Pembuatan pupuk, pemilihan benih
 - b, Pelatihan lain, sebutkan
5. Apakah anda merasa pelatihan tersebut memberikan banyak informasi kepada anda ?
 - a. Ya
 - b. Tidak
6. Apakah ada usaha yang Ibu/Bapak kembangkan dari hasil PHBM?
 - a. Ada dan sudah berjalan
 - b. Ada dan masih merintis
 - c. Tidak ada

Jika ada usaha apa yang sedang di kembangkan ?

MONITORING DAN EVALUASI

1. Apakah anda ikut serta dalam proses evaluasi program?
 - a. Ya
 - b. Tidak
2. Intensitas keikutsertaan Ibu dalam rapat evaluasi :

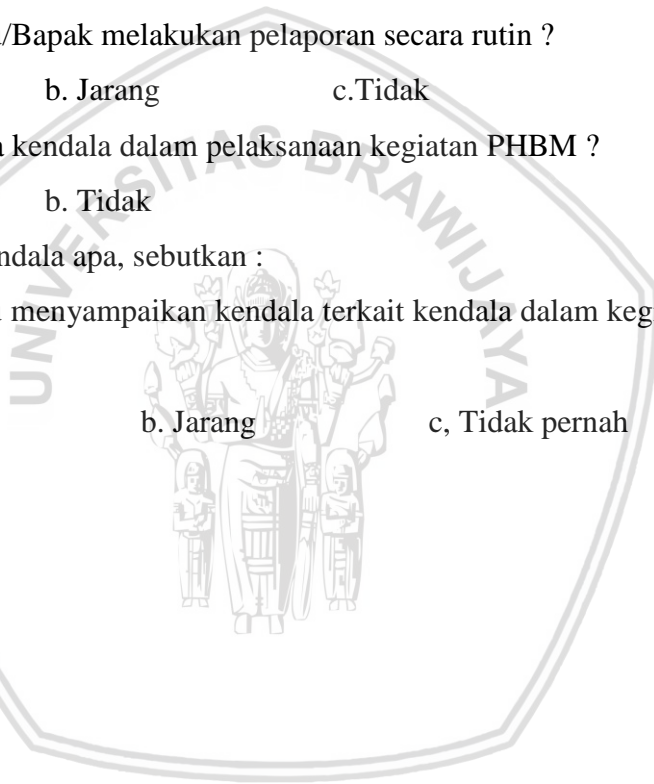
- a. Selalu hadir
 - b. Jarang, alasan :
 - c. Tidak pernah, alasan :
3. Apakah tiap waktu tertentu Ibu/bapak melakukan pelaporan kegiatan seperti :
- Hasil panen
 - Keadaan tanaman tumpang sari
 - Keadaan tanaman pokok

Jawab :

4. Apakah Ibu/Bapak melakukan pelaporan secara rutin ?
- a. Ya
 - b. Jarang
 - c. Tidak
5. Apakah ada kendala dalam pelaksanaan kegiatan PHBM ?
- a. Ya
 - b. Tidak

Jika Ya, kendala apa, sebutkan :

6. Apakah Ibu menyampaikan kendala terkait kendala dalam kegiatan PHBM ?
- a. Sering
 - b. Jarang
 - c. Tidak pernah



PANDUAN WAWANCARA

Harvard Analisis

A. Profil Aktifitas :

| Kegiatan | L | P | L & P |
|---|---|---|-------|
| Aktivitas Produksi pertanian | | | |
| Pembersihan lahan | | | |
| Persiapan benih | | | |
| Penanaman | | | |
| Penyiangan pembersihan | | | |
| Pemupukan | | | |
| Panen | | | |
| Pengeringan/penyimpanan | | | |
| Perawatan tanaman/pemusnahan hama atau penyakit | | | |
| Kegiatan Reproduksi | | | |
| Penyediaan air untuk keluarga | | | |
| Pengasuhan anak | | | |
| Memasak | | | |
| Membersihkan rumah | | | |
| Mengambil kayu bakar | | | |
| Mengawasi anak belajar | | | |
| Belanja di pasar | | | |
| Mengurus kesehatan keluarga | | | |
| Mengurus sekolah anak | | | |
| Pengelolaan keuangan keluarga | | | |
| Kegiatan Sosial | | | |
| PKK | | | |
| Perkumpulan organisasi tani | | | |
| menghadiri kegiatan KTH | | | |
| Pengajian | | | |
| Gotong royong | | | |
| ... | | | |
| ... | | | |

B. Akses :

| Indikator | L | P | L&P |
|-----------------------------------|---|---|-----|
| Akses Sumberdaya | | | |
| Lahan | | | |
| Informasi, inovasi, dan teknologi | | | |
| Pelatihan | | | |
| Modal | | | |
| Pasar | | | |
| Akses Manfaat | | | |
| Pendapatan | | | |
| Kesehatan | | | |
| Jaringan | | | |

C. Kontrol :**Kontrol terhadap kegiatan domestik**

| Jenis Aktifitas | L | P | L&P |
|---|---|---|-----|
| Pemeliharaan Pusaka (Rumah) | | | |
| Mengambil keputusan untuk keluarga | | | |
| Mengambil keputusan untuk pendidikan anak | | | |
| Menentukan aktifitas sekolah anak | | | |
| Menentukan keberlanjutan sekolah | | | |

Kontrol terhadap sumberdaya dan manfaat

| Indikator | L | P | L&P |
|-----------------------------------|---|---|-----|
| Kontrol Sumberdaya | | | |
| Lahan | | | |
| Informasi, inovasi, dan teknologi | | | |
| Pelatihan | | | |
| Modal | | | |
| Pasar | | | |
| Kontrol Manfaat | | | |
| Pendapatan | | | |
| Kesehatan | | | |
| Jaringan | | | |

PEDOMAN WAWANCARA MENDALAM
Peran Modal Sosial dalam Partisipasi Perempuan pada PHBM (Pengelolaan
Hutan Bersama Masyarakat)

(Desa Tambakasri Kec. Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang)

(Informan : Masyarakat Desa hutan, Tokoh Masyarakat, Pemerintah Setempat,
Perhutani, pengurus LKDPH)

Masyarakat terhadap Perhutani

1. Bagaimana Perhutani melakukan interaksi dengan masyarakat?
2. Apa saja yang dilakukan Perhutani untuk memenuhi kebutuhan masyarakat?
3. Apakah terdapat kerjasama antara masyarakat dan Perhutani selama ini, dan dalam bentuk apa?
4. Apa yang masyarakat keluhkan dari perhutani?
5. Bagaimana hubungan masyarakat dengan pemerintah dan perhutani saat sebelum dan sesudah PHBM?

Masyarakat terhadap PHBM

6. Sejak kapan PHBM diterapkan disini?
7. Apakah masyarakat sebelumnya tahu tentang PHBM?
8. Bagaimana sosialisasi PHBM pada saat ini?
9. Apakah masyarakat dilibatkan dalam perencanaan PHBM?
10. Masyarakat laki2 dan perempuan dalam perencanaan ?
11. Apakah masyarakat dilibatkan dalam bagi hasil dalam PHBM?
12. Apakah Masyarakat dilibatkan dalam pengambilan keputusan setiap kegiatan PHBM?
13. Masyarakat laki2 dan perempuan dalam pengambilan keputusan ?
14. Apa yang dirasakan masyarakat setelah adanya PHBM?
15. Apakah masyarakat diuntungkan setelah adanya PHBM?
16. Apakah PHBM memunculkan konflik yang baru?

LKDPH

17. Bagaimana proses terbentuknya LKDPH?
18. Bagaimana struktur organisasi dari LKDPH?
19. Bagaimana pembagian kerja dari LKDPH?
20. Apakah LKDPH mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat?
21. Bagaimana sosialisasi PHBM yang dilakukan LKDPH terhadap masyarakat?
22. Bagaimana tanggapan tentang perempuan yang terlibat dalam PHBM ?
23. Apakah kinerja LKDPH dalam melaksanakan PHBM sudah berjalan dengan baik?
24. Apakah LKDPH melakukan evaluasi secara berkala terhadap kegiatan PHBM?
25. Apa yang melatarbelakangi berdirinya PHBM di Desa Tambakasri?
26. Apakah PHBM sebagai suatu solusi dari masalah yang ada?
27. Bagaimana sistem yang diterapkan dalam PHBM?
28. Apakah sebelumnya terdapat pencurian kayu di Desa Tambakasri?
29. Apa tindakan Perhutani dengan adanya pencurian kayu yang terjadi?
30. Apakah PHBM sudah dapat diterima oleh masyarakat?
31. Adakah konflik konflik dari program PHBM ?
32. Apakah dapat terselesaikan ?
33. Bagaimana hubungan perhutani dengan masyarakat dan pemerintah saat sebelum dan sesudah PHBM?